

BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2023-2026

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja, serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) perlu menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan Kabupaten;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja, serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 53);
8. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 21 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Aceh;
9. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022 Nomor 13);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2023-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
2. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
3. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 4 (empat) tahun.

4. Rencana Aksi Tahunan adalah rencana kerja pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disebut TKPD Kabupaten adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di kabupaten.

BAB II

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Pasal 2

RPKD merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Daerah pada Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 dalam bentuk arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan beserta indikatif penganggarannya.

Pasal 3

- (1) RPKD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Kondisi Umum Daerah;
 - c. BAB III : Profil Kemiskinan Daerah;
 - d. BAB IV : Prioritas Program;
 - e. BAB V : Lokasi Prioritas; dan
 - f. BAB VI : Penutup.
- (2) RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

RPKD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dan mitra pembangunan lainnya dalam menyusun rencana kerja dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Daerah.

BAB III
PENJABARAN

Pasal 5

- (1) Sebagai penjabaran dari prioritas program penanggulangan kemiskinan 4 (empat) tahun RPKD dan tahun berjalan, maka TKPKD perlu Menyusun Rencana Aksi Tahunan (RAT);
- (2) RAT sekurang-kurangnya berisikan:
 - a. Hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya berdasarkan dokumen perencanaan dan pelaksanaan;
 - b. Kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan tahun berjalan;
 - c. Matriks Rencana Aksi Tahunan.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui TKPKD melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD.
- (2) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan bagi pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
BASIS DATA

Pasal 8

- (1) Basis data pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan daerah menggunakan data Penyesaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, dan/atau sumber data lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan verifikasi, validasi terhadap kelompok/individu penerima bantuan.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan kepada gubernur melalui Sekretaris Daerah Aceh selaku ketua TKPK Provinsi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

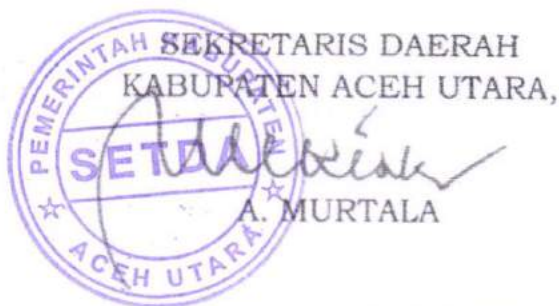
Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 10 Juli 2023 M
21 Dzulhijjah 1444 H



Pj. BUPATI ACEH UTARA,

AZWARDI

Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 10 Juli 2023 M
21 Dzulhijjah 1444 H



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2023-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan menjadi masalah serius yang sulit terurai bak lingkaran setan. Benih-benih kemiskinan terus tumbuh dan berkembang di antara ketersediaan sumber daya alam yang melimpah. Kemiskinan merupakan masalah yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi yang dihadapi oleh negara-negara di dunia. Salah satu isu global yang menjadi perhatian dunia Internasional yakni Kemiskinan. Kemiskinan menjadi salah satu target Sustainable Development Goals (SDGs). Dokumen Sustainable Development Goals (SDGs) telah disepakati oleh perwakilan 193 negara anggota PBB. Di Indonesia SDGs yang telah di adopsi oleh Pemerintah Republik Indonesia menjadi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017.

Upaya penanggulangan kemiskinan harus dilaksanakan secara struktural/berjenjang, terintegrasi dan komprehensif serta bersifat lintas sektor baik pada dimensi ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial dan dapat memenuhi hak-hak dasar masyarakat. Pada Level Nasional, Percepatan Penanggulangan Kemiskinan menjadi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 Tentang RPJMN Tahun 2020-2024. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan sampai mencapai angka 6,00–7,00 persen tahun 2024. Sedangkan untuk pengembangan kewilayahan, Persentase angka Kemiskinan di Provinsi Aceh ditargetkan sebesar 13,53 persen/tahun/2026. Sedangkan di Kabupaten Aceh Utara, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Aceh Utara tahun 2023-2026 ditargetkan penurunan angka kemiskinan mencapai

angka 14 persen diakhir periode pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Aceh Utara 2023-2026. Untuk mempercepat pencapaian target tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPK) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 050/216 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Aceh Utara.

Upaya Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk menurunkan persentase angka kemiskinan harus dilakukan secara terencana, terkoordinir dan terpadu sehingga permasalahan kemiskinan bisa dikendalikan oleh pemerintah daerah melalui Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Aceh Utara tahun 2023-2026.

1.2. Tujuan

Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 disusun dengan maksud Menyediakan Dokumen dan menjadi acuan dalam Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Aceh Utara. Adapun tujuan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Aceh Utara yakni sebagai berikut:

1. Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin;
2. Mengurangi beban hidup masyarakat miskin;
3. Meningkatkan akses dan Kualitas layanan infrastruktur dasar.

Tabel I-1 : Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Tahun | | | | Kebijakan |
|----|---|---|---|-------|-------|-------|------|--|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1. | Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin | Menurunnya tingkat penangguran terbuka | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja | | | | | Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap modal kerja dan kompetensi kerja |
| | | | Pertumbuhan Ekonomi | | | | | Meningkatkan akses masyarakat Miskin terhadap modal usaha |
| 2. | Mengurangi beban hidup masyarakat miskin | Meningkatnya akses layanan bantuan sosial bagi masyarakat miskin | Rata-rata lama sekolah (tahun) | | | | | Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap kualitas dan layanan Pendidikan melalui merdeka belajar |
| | | | Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun) | | | | | |
| | | | Angka Harapan Hidup | 68,85 | 68,90 | 68,95 | 69 | Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap layanan Kesehatan yang berkualitas dan terjangkau serta Jaminan Kesehatan yang memadai melalui merdeka sehat |
| | | | Presentase Ketersediaan Pangan (Beras/Jagung) Kabupaten/Kota (%) | | | | | Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap Kecukupan pangan dan Gizi |
| | | | Presentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial | | | | | Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap layanan bantuan Sosial yang memadai |
| 3. | Meningkatkan akses dan kualitas layanan infrastruktur dasar layak masyarakat miskin | Meningkatnya akses dan kualitas layanan infrastruktur Dasar masyarakat Miskin | Persentase penduduk yang terlayani akses sanitasi atau air limbah | 70,43 | 73,95 | 77 | 80 | Meningkatkan akses masyarakat Miskin terhadap Kualitas dan layanan infrastruktur perumahan yang Layak Huni |

1.3. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021-2026 meliputi :

1. Pasal 4 Ayat (1), Pasal 28 C ayat (1) dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana Telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024;
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
11. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Peningkatan dan Perluasan Program Pro-Rakyat;
12. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
14. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 32 tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
15. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 30 tahun 2022 tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
16. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Pengelolaan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
17. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 tahun 2022 tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024;

18. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 21 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Aceh;
19. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026;

BAB II

KONDISI UMUM DAERAH

2.1 Kondisi Geografi

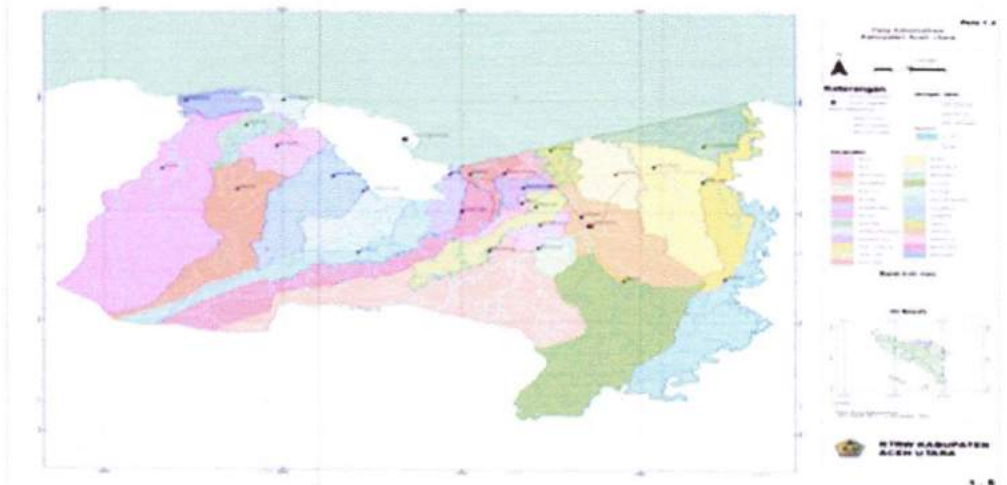
Aspek geografi dan demografi mengkaji segala fenomena yang ada di geosfer yang dapat mempengaruhi keberlangsungan hidup manusia. Dalam aspek ini membahas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan karakteristik lokasi dan wilayah, demografi dan potensi pengembangan wilayah. Karakteristik lokasi dan wilayah menyajikan letak geografis, topografi dan morfologi wilayah, jenis tanah dan kedalaman efektif tanah, geologi serta kondisi iklim dari suatu wilayah.

Berdasarkan Peta Bakosurtanal, Kabupaten Aceh Utara terletak pada bagian utara Provinsi Aceh. Secara geografis, batas wilayah Kabupaten Aceh Utara dengan wilayah lainnya mengalami perubahan seiring adanya beberapa pemekaran wilayah antara lain berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe dan terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Aceh Utara dari Wilayah Kota Lhokseumawe ke Lhoksukon di Wilayah Kabupaten Aceh Utara. Implikasi perubahan mempengaruhi batas wilayah kabupaten Aceh Utara dengan kabupaten yang melingkupinya. Batas wilayah Kabupaten Aceh Utara saat ini bersebelahan :

- Sebelah utara : Selat Malaka dan Kota Lhokseumawe
- Sebelah timur : Kabupaten Aceh Timur
- Sebelah selatan : Kabupaten Bener Meriah
- Sebelah barat : Kabupaten Bireuen

Gambaran tematik batas wilayah Kabupaten Aceh Utara sebagaimana Gambar 2.1 berikut :

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Aceh Utara



Sumber: RTRW Kabupaten Aceh Utara Tahun 2013

Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2013 Tentang RTRW Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2032 disebutkan bahwa luas wilayah berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara, dikurangi dengan luas wilayah pembentukan Kabupaten Bireuen berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Simeulue dan luas wilayah pembentukan Kota Lhokseumawe berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe, maka luas Kabupaten Aceh Utara sebesar 3.296,86 km² atau 329.686 Ha.

Secara administrasi wilayah Kabupaten Aceh Utara terdiri dari 27 kecamatan 76 kemukiman 852 gampong. Sejak tahun 2009, secara administrasi perdesaan Kabupaten Aceh Utara hanya memiliki wilayah gampong sebagaimana Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kabupaten Aceh Utara. Kecamatan Paya Bakong merupakan kecamatan terluas dengan luas 418,32 km² atau 12,69 persen dari luas Kabupaten Aceh Utara. Masing-masing kecamatan dibagi dalam 1 sampai 4 kemukiman. Pemerintahan Mukim diatur dalam Qanun Provinsi Aceh Nomor 4 Tahun 2003 dan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Mukim, disebutkan kedudukan mukim sebagai unit pemerintah yang membawahi

beberapa gampong yang dipimpin oleh seorang Imum Mukim yang bertanggung jawab kepada Camat. Luas wilayah, jumlah kemukiman dan jumlah gampong di Kabupaten Aceh Utara dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Luas Wilayah, Jumlah Kemukiman dan Jumlah Gampong
di Kabupaten Aceh Utara menurut Kecamatan

| No. | Kecamatan | Luas Wilayah (Km ²) | Persentase | Jumlah Kemukiman | Jumlah Gampong |
|-------|------------------|---------------------------------|------------|------------------|----------------|
| 1. | Sawang | 384,65 | 11,67 | 2 | 39 |
| 2. | Nisam | 114,74 | 3,48 | 3 | 29 |
| 3. | Nisam Antara | 84,38 | 2,56 | 2 | 6 |
| 4. | Banda Baro | 42,35 | 1,28 | 2 | 9 |
| 5. | Kuta Makmur | 151,32 | 4,59 | 3 | 39 |
| 6. | Simpang Keuramat | 79,78 | 2,42 | 2 | 16 |
| 7. | Syamtalira Bayu | 77,53 | 2,35 | 4 | 38 |
| 8. | Geureudong Pase | 269,28 | 8,17 | 2 | 11 |
| 9. | Meurah Mulia | 202,57 | 6,15 | 3 | 50 |
| 10. | Matangkuli | 56,94 | 1,73 | 4 | 49 |
| 11. | Paya Bakong | 418,32 | 12,69 | 4 | 39 |
| 12. | Pirak Timu | 67,70 | 2,05 | 2 | 23 |
| 13. | Cot Girek | 189,00 | 5,73 | 3 | 24 |
| 14. | Tanah Jambo Aye | 162,98 | 4,94 | 4 | 47 |
| 15. | Langkahan | 150,52 | 4,57 | 3 | 23 |
| 16. | Seunuddon | 100,63 | 3,05 | 3 | 33 |
| 17. | Baktiya | 158,67 | 4,81 | 3 | 57 |
| 18. | Baktiya Barat | 83,08 | 2,52 | 3 | 26 |
| 19. | Lhoksukon | 243,00 | 7,37 | 4 | 75 |
| 20. | Tanah Luas | 30,64 | 0,93 | 3 | 57 |
| 21. | Nibong | 44,91 | 1,36 | 2 | 20 |
| 22. | Samudera | 43,28 | 1,31 | 3 | 40 |
| 23. | Syamtalira Aron | 28,13 | 0,85 | 4 | 34 |
| 24. | Tanah Pasir | 20,38 | 0,62 | 2 | 18 |
| 25. | Lapang | 19,27 | 0,59 | 2 | 11 |
| 26. | Muara Batu | 33,34 | 1,01 | 2 | 24 |
| 27. | Dewantara | 39,47 | 1,20 | 2 | 15 |
| TOTAL | | 3.296,86 | 100,00 | 76 | 852 |

Sumber: Bagian Pemerintahan Mukim Setdakab Aceh Utara Tahun 2022 (Data diolah)

Dilihat berdasarkan kemukiman, Kecamatan Syamtalira Bayu, Matangkuli, Paya Bakong, Tanah Jambo Aye, Lhoksukon dan Syamtalira Aron masing-masing memiliki 4 kemukiman. Sedangkan jumlah gampong terbanyak di Kecamatan Lhoksukon yaitu sebanyak 75 gampong, sementara itu jumlah gampong paling sedikit yakni

sebanyak 6 gampong berada di Kecamatan Nisam Antara yang merupakan kecamatan hasil pemekaran dari Kecamatan Nisam.

1. Topografi dan Morfologi Wilayah

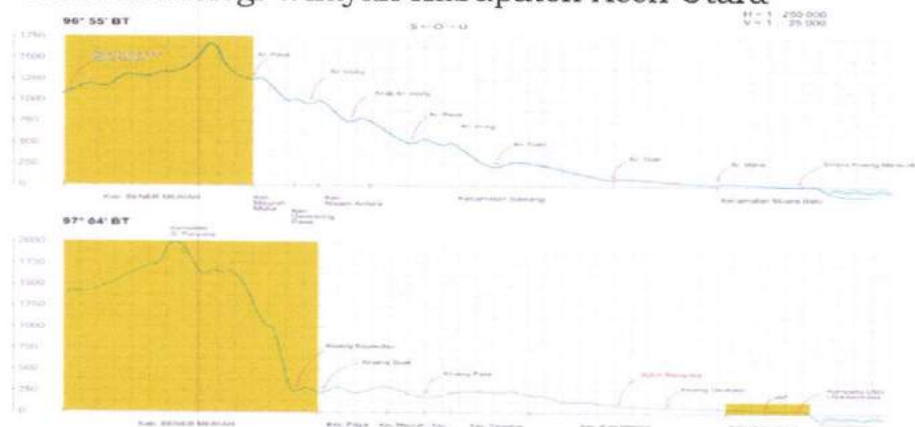
Sebelah utara berbatasan dengan laut, yaitu Selat Malaka dan di sebelah selatan adalah kaki atau lereng pegunungan, maka secara umum bentuk permukaan bumi atau geomorfologi Kabupaten Aceh Utara dari arah pantai ke arah pegunungan adalah :

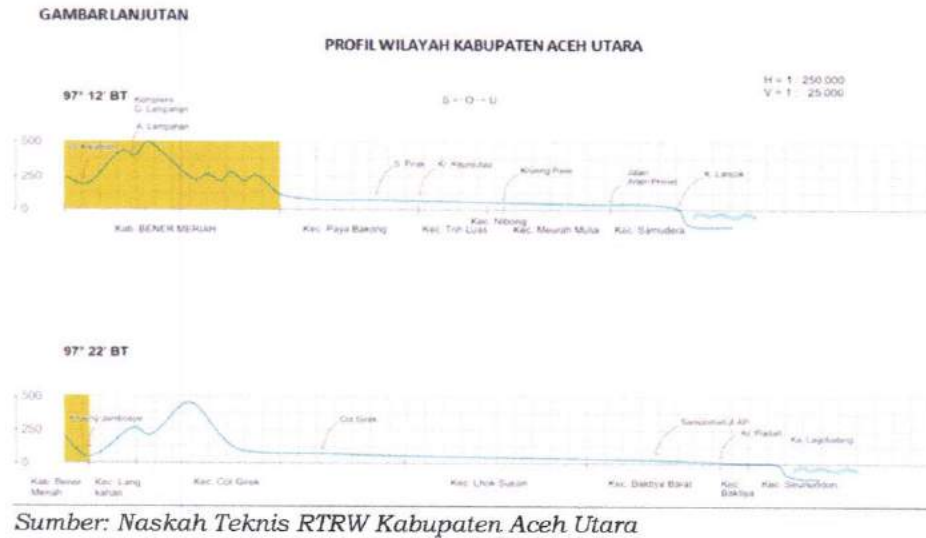
- Dataran pantai, yang terletak sepanjang tepi pantai.
- Dataran aluvial, yang terletak relative memanjang di belakang dataran pantai.
- Zona lipatan, yang terletak relative memanjang di belakang dataran aluvial.
- Zona volkanik, yang merupakan kaki/lereng sampai punggung pegunungan.

Selaras dengan geomorfologi tersebut pada Gambar 2.2 diperlihatkan profil wilayah menurut arah utara-selatan, masing-masing pada garis $96^{\circ} 55'$, $97^{\circ} 04'$, $97^{\circ} 12'$, dan $97^{\circ} 22'$ BT. Berdasarkan Peta Rupa Bumi skala 1 : 50.000 (BAKOSURTANAL), yang menggambarkan topografi menurut garis ketinggian (kontur) Aceh Utara sebaran utamanya menurut selang ketinggian yaitu:

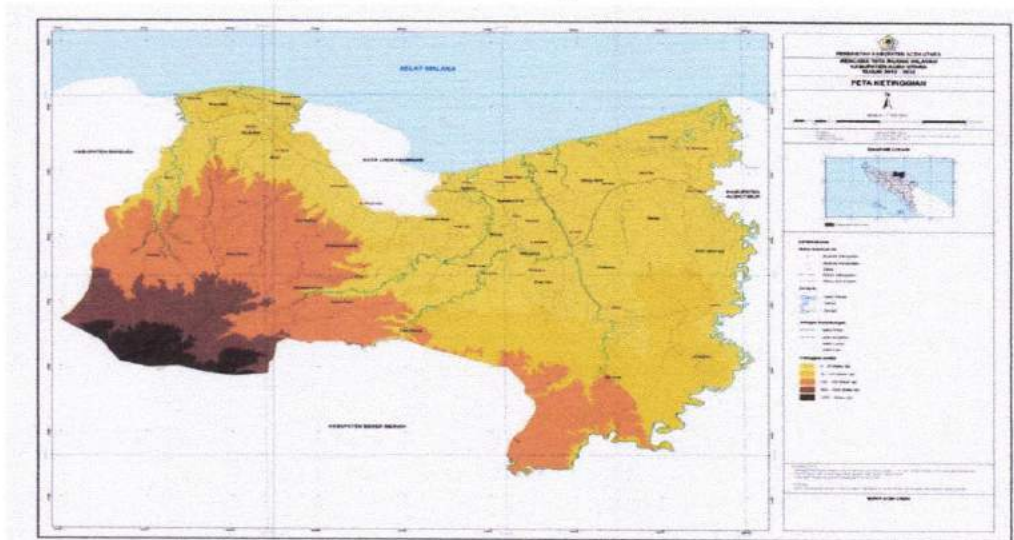
- 0 – 25 m dpl : 146.096 Ha, atau 44,31 %;
- 25 – 100 m dpl : 63.781 Ha, atau 19,35 %;
- 100 – 500 m dpl : 88.526 Ha, atau 26,85 %;
- 500 – 1000 m dpl : 20.932 Ha, atau 6,35 %;
- Di atas 1000 m dpl : 10.351 Ha, atau 3,14%

Gambar 2.2
Profil Morfologi Wilayah Kabupaten Aceh Utara





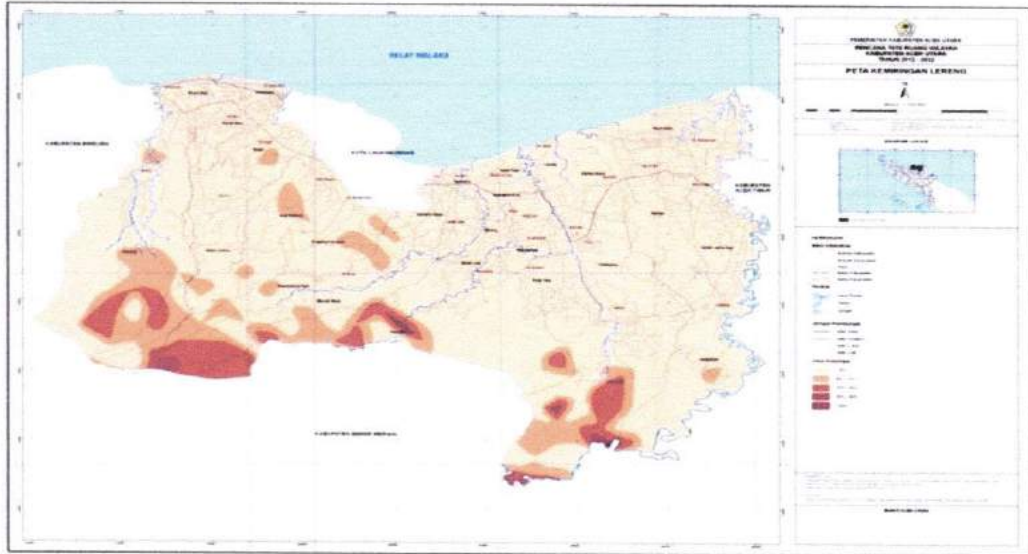
Gambar 2.3
Peta Ketinggian Lahan Kabupaten Aceh Utara



Berdasarkan Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Aceh Utara dari Yayasan Leuser Internasional (YLI), dapat dikemukakan sebaran kemiringan lahan di Aceh Utara yaitu :

- 0 – 2% : 50,38 %, atau sekitar 166.063 Ha;
- 2 – 8% : 18,85 %, atau sekitar 62.146 Ha;
- 8 – 15% : 10,54 %, atau sekitar 34.749 Ha;
- 15 – 25% : 9,59 %, atau sekitar 31.617 Ha;
- 25 – 40% : 7,26 %, atau sekitar 23.935 Ha;
- >40% : 3,39 %, atau sekitar 11.176 Ha.

Gambar 2.4
Peta Kemiringan Lahan Kabupaten Aceh Utara



Sumber: Naskah Teknis RTRW Kabupaten Aceh Utara

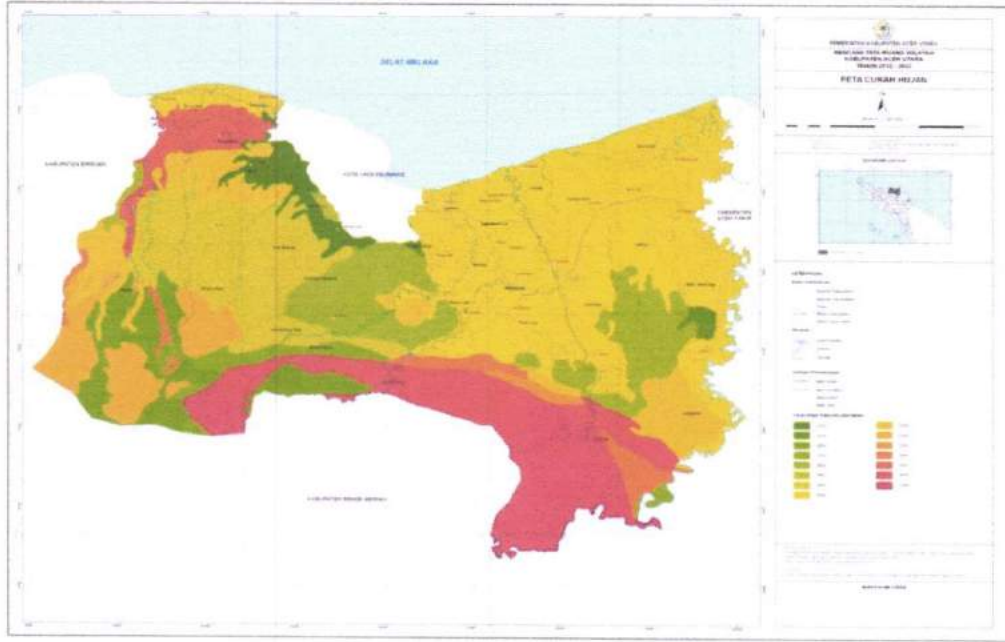
2. Iklim

Wilayah Kabupaten Aceh Utara sebagai bagian dari wilayah Provinsi Aceh, termasuk tipe iklim muson dan klasifikasi menurut Mohr, Schmid dan Ferguson termasuk iklim tipe C. Wilayah Kabupaten Aceh Utara relatif lebih kering dibandingkan dengan wilayah lainnya di Provinsi Aceh karena pengaruh pegunungan Bukit Barisan, di mana wilayah sebelah utara dan timur pegunungan Bukit Barisan cenderung lebih kering dibandingkan wilayah sebelah barat dan selatannya.

Curah hujan tahunan di wilayah Kabupaten Aceh Utara berkisar antara 1000 – 2500 mm, dengan hari hujan 92 hari. Musim hujan terjadi pada bulan Agustus sampai Januari, dengan curah hujan maksimal terjadi di bulan Oktober-November yang mencapai di atas 350 mm per bulan dengan hari hujan lebih dari 14 hari. Sementara musim dengan curah hujan lebih rendah (cenderung kemarau) terjadi pada bulan Februari sampai Juli dan yang cenderung terendah adalah sekitar bulan Maret-April.

Rata-rata suhu udara adalah 30°C dengan kisaran antara 26°C sampai 36°C. Suhu rata-rata pada musim penghujan adalah 28°C dan pada musim kemarau suhu rata-rata adalah 32,8°C. Kelembaban udara berkisar antara 84–89% dengan rata-rata 86,6%. Lebih jelasnya sebagaimana tercantum pada gambar berikut :

Gambar 2.5
Peta Curah Hujan Kabupaten Aceh Utara



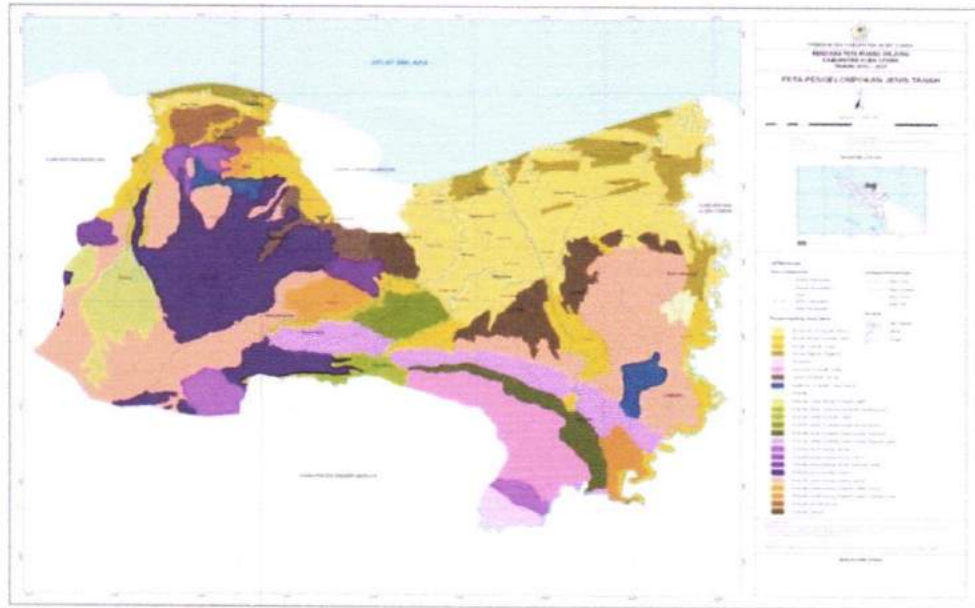
Sumber: Naskah Teknis RTRW Kabupaten Aceh Utara

3. Jenis Tanah dan Kedalaman Efektif Tanah

Jenis tanah mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kesesuaian lahan untuk budidaya pertanian maupun non-pertanian yang akan dikembangkan. Pengenalan terhadap karakteristik dan sebaran jenis tanah sangat penting terkait dengan upaya pemanfaatan sumberdaya tanah/lahan di Kabupaten Aceh Utara.

Secara umum sebaran jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Aceh Utara dapat dibedakan atas 2 kelompok besar yaitu dominan kelompok hidromorf di pesisir, sementara kelompok podsolik dominan di pedalaman. Karakter ini selaras pula dengan kedalaman efektif tanah, di mana sejak dari yang terdalam (>90 cm) sampai yang ter dangkal (<30 cm) adalah mengikuti pola dari pesisir ke pedalaman. Jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.6
Peta Jenis Tanah Kabupaten Aceh Utara



Sumber : Naskah Teknis RTRW Kabupaten Aceh Utara

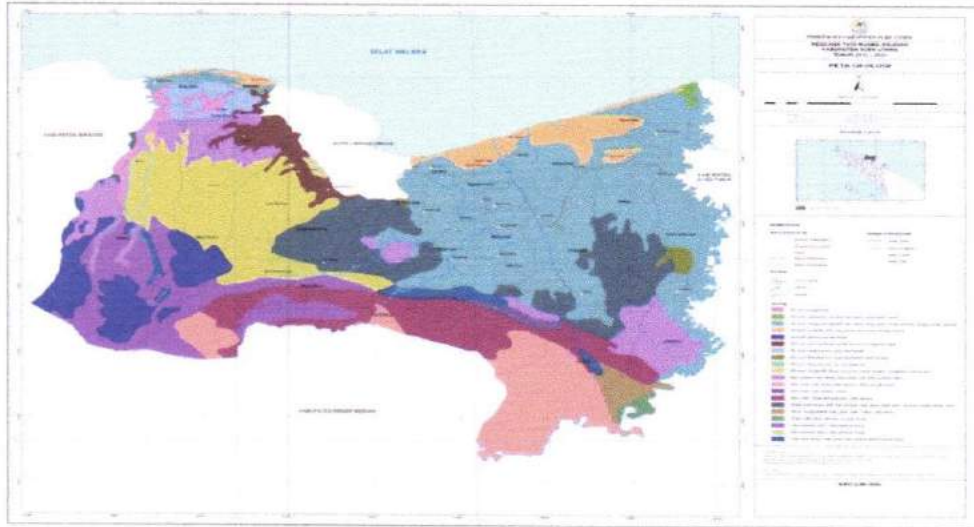
4. Geologi

Struktur geologi yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Utara secara garis besar terdiri atas batuan Quarter yang cenderung di bagian pesisir (bagian utara), dan batuan Tersier yang cenderung di bagian pedalaman (bagian selatan). Sebaran ini selaras dengan topografi yang menaik dari utara ke selatan dan selaras pula dengan pola hilir ke hulu dalam DAS. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, karakteristik DAS merupakan gambaran spesifik mengenai DAS yang dicirikan oleh parameter yang berkaitan dengan keadaan morfometri, topografi, tanah geologi, vegetasi, penggunaan lahan, hidrologi dan manusia. Suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

Wilayah Kabupaten Aceh Utara masuk kedalam klasifikasi WS Jambo Aye (01.05.A3) dan WS Pase-Peusangan (0.1.03.B). WS Jambo Aye mencakup DAS Jambo Aye, Krueng Keureutou, dan Krueng Lueng. WS Pase-Peusangan mencakup DAS Krueng Geukeuh, Krueng Mane, Krueng Pase, dan Peusangan (Berdasarkan Lampiran V.4

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 Tanggal 18 Maret 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai).

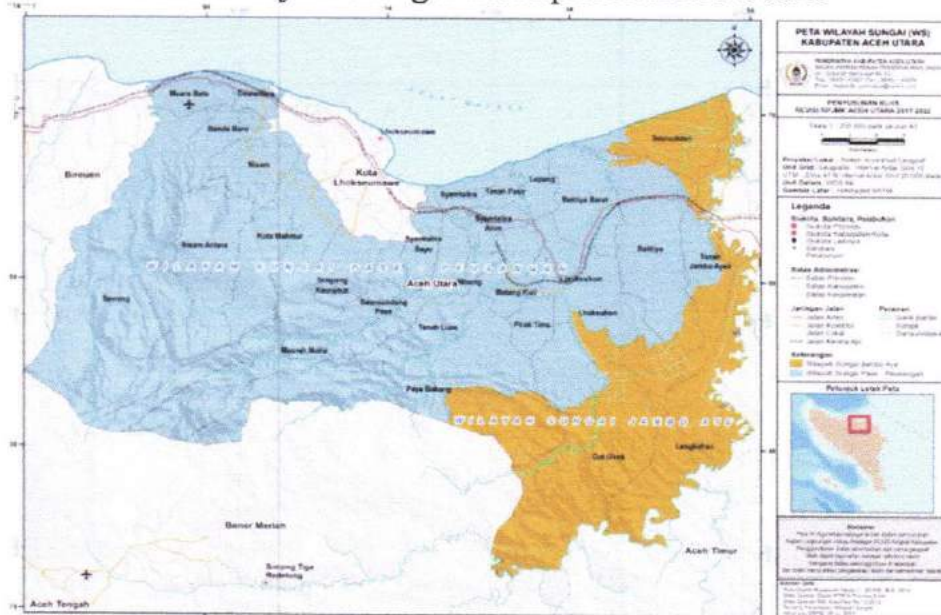
Gambar 2.7
Peta Geologi Kabupaten Aceh Utara



Sumber: Naskah Teknis RTRW Kabupaten Aceh Utara

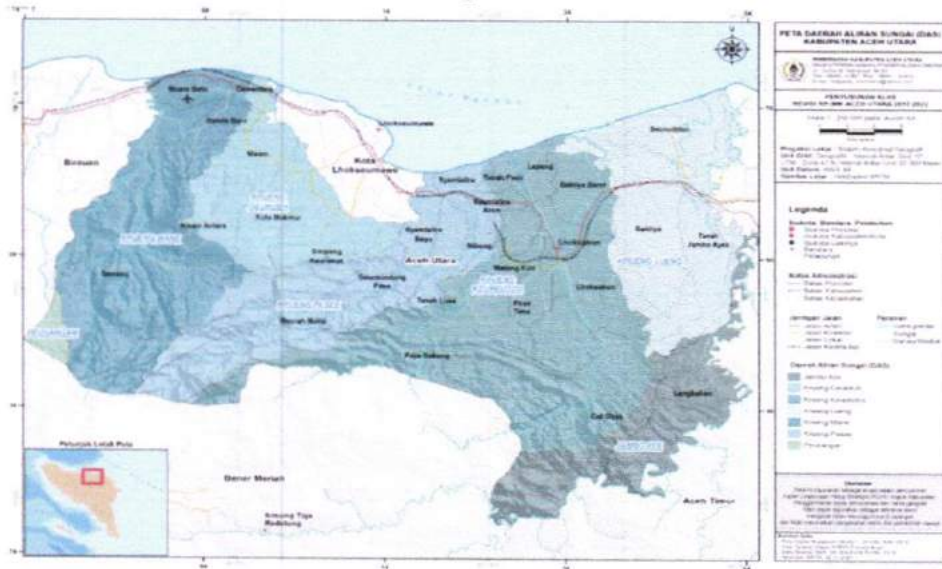
WS Jambo-Aye merupakan wewenang pemerintah Pusat yang langsung di bawah pengelolaan Balai Wilayah Sungai Sumatera-I dan dikelompokkan menjadi satu Wilayah Sungai berdasarkan wilayah strategis nasional dan lintas kabupaten. WS Peusangan merupakan lintas kabupaten yang menjadi wewenang Provinsi Aceh.

Gambar 2.8
Peta Wilayah Sungai Kabupaten Aceh Utara



Sumber: KLHS Perubahan RPJMK Aceh Utara Tahun 2017-2022

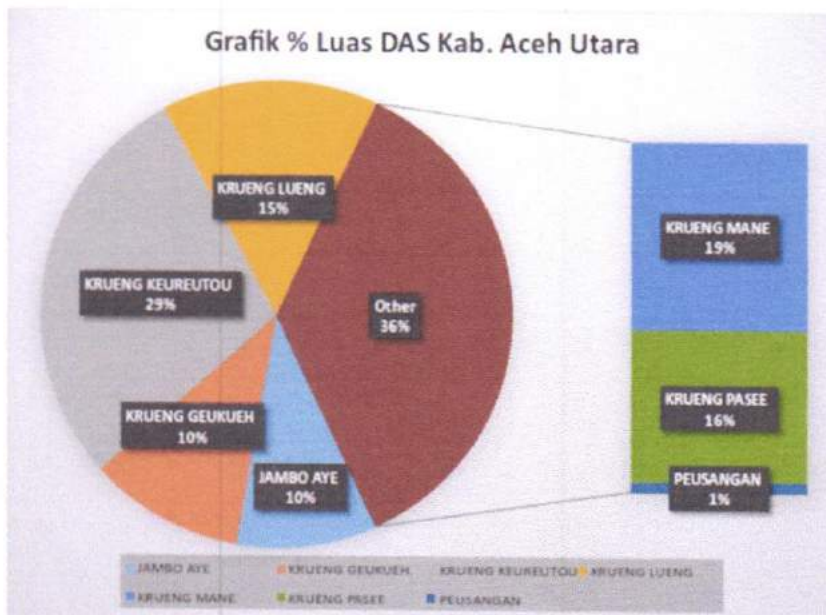
Gambar 2.9
Peta DAS Kabupaten Aceh Utara



Sumber: KLHS Perubahan RPJMK Aceh Utara Tahun 2017-2022

Sementara itu, Peta WS dan DAS menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.304/ MENLHK/ PDASHL/ DAS.0/7/2018 tentang penetapan peta daerah aliran sungai diperlihatkan pada Gambar 2.8 dan 2.9. Secara keseluruhan persenta seluas DAS yang berada di dalam batas administrasi Kabupaten Aceh Utara disajikan dalam Gambar 2.10 berikut:

Gambar 2.10
Persen Luas DAS di Kabupaten Aceh Utara



Sumber: KLHS Perubahan RPJMK Aceh Utara Tahun 2017-2022

2.2. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2020 sebanyak 602.793 jiwa. Luas wilayah 3.296,86 km² maka kepadatan penduduk mencapai 183 jiwa/km² dengan sebaran di 27 kecamatan. Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah Lhoksukon sebanyak 49.733 jiwa, sedangkan kepadatan penduduk terbesar di Kecamatan Dewantara mencapai 1.162 jiwa/Km². Sebaliknya jumlah dan kepadatan penduduk terkecil di Kecamatan Geureudong Pase 5.534 jiwa dengan kepadatan 21 jiwa/Km², sebagaimana yang disajikan pada Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Utara, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk berdasarkan Kecamatan Tahun 2020

| No. | Kecamatan | Jumlah Penduduk (Jiwa) | Luas Wilayah (Km ²) | Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²) |
|-----|-----------------|------------------------|---------------------------------|--|
| 1. | Sawang | 39.063 | 384,65 | 102 |
| 2. | Nisam | 19.663 | 114,74 | 171 |
| 3. | Nisam Antara | 13.465 | 84,38 | 160 |
| 4. | Banda Baro | 7.926 | 42,35 | 187 |
| 5. | Kuta Makmur | 26.379 | 151,32 | 174 |
| 6. | Simpang Kramat | 9.957 | 79,78 | 125 |
| 7. | Syamtalira Bayu | 22.393 | 77,53 | 289 |
| 8. | Geureudong Pase | 5.534 | 269,28 | 21 |
| 9. | Meurah Mulia | 21.024 | 202,57 | 104 |
| 10. | Matangkuli | 18.756 | 56,94 | 329 |
| 11. | Paya Bakong | 15.555 | 418,32 | 37 |
| 12. | Pirak Timu | 8.799 | 67,70 | 130 |
| 13. | Cot Girek | 20.305 | 189,00 | 107 |
| 14. | Tanah Jambo Aye | 44.222 | 162,98 | 271 |
| 15. | Langkahan | 22.518 | 150,52 | 150 |
| 16. | Seunuddon | 25.982 | 100,63 | 258 |
| 17. | Baktiya | 37.657 | 158,67 | 237 |
| 18. | Baktiya Barat | 18.980 | 83,08 | 228 |
| 19. | Lhoksukon | 49.733 | 243,00 | 205 |
| 20. | Tanah Luas | 25.193 | 30,64 | 822 |
| 21. | Nibong | 10.778 | 44,91 | 240 |
| 22. | Samudera | 27.147 | 43,28 | 627 |
| 23. | Syamtalira Aron | 19.345 | 28,13 | 688 |

| No. | Kecamatan | Jumlah Penduduk (Jiwa) | Luas Wilayah (Km ²) | Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²) |
|-------|-------------|------------------------|---------------------------------|--|
| 24. | Tanah Pasir | 9.978 | 20,38 | 490 |
| 25. | Lapang | 8.806 | 19,27 | 457 |
| 26. | Muara Batu | 27.753 | 33,34 | 832 |
| 27. | Dewantara | 45.882 | 39,47 | 1.162 |
| TOTAL | | 602.793 | 3.296,86 | 183 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021

Bila dilihat dari letaknya, maka dapat diindikasikan bahwa kecamatan-kecamatan di sekitar sumbu wilayah atau di sekitar jalan nasional cenderung mempunyai jumlah dan kepadatan penduduk lebih besar.

1. Distribusi Jumlah Penduduk

Distribusi penduduk Kabupaten Aceh Utara periode tahun 2017-2020 tersebar di 27 Kecamatan ditunjukkan dalam Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Perkembangan Distribusi Penduduk Kabupaten Aceh Utara
Menurut Kecamatan Tahun 2017-2021

| No. | Kecamatan | Tahun | | | | |
|-----|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Sawang | 39.175 | 38.769 | 39.470 | 39.063 | 39.470 |
| 2 | Nisam | 19.404 | 19.350 | 19.700 | 19.663 | 19.853 |
| 3 | Nisam Antara | 13.740 | 13.786 | 14.035 | 13.465 | 13.554 |
| 4 | Banda Baro | 8.185 | 8.330 | 8.481 | 7.926 | 7.951 |
| 5 | Kuta Makmur | 25.244 | 25.085 | 25.539 | 26.379 | 26.742 |
| 6 | Simpang Keuramat | 9.788 | 9.904 | 10.083 | 9.957 | 10.049 |
| 7 | Syamtalira Bayu | 21.471 | 21.380 | 21.767 | 22.393 | 22.671 |
| 8 | Geureudong Pase | 4.907 | 5.109 | 5.202 | 5.534 | 5.631 |
| 9 | Meurah Mulia | 20.153 | 20.085 | 20.448 | 21.024 | 21.306 |
| 10 | Matangkuli | 18.913 | 18.866 | 19.208 | 18.756 | 18.927 |
| 11 | Paya Bakong | 14.422 | 14.455 | 14.717 | 15.555 | 15.804 |
| 12 | Pirak Timu | 8.302 | 8.444 | 8.597 | 8.799 | 8.912 |
| 13 | Cot Girek | 21.147 | 21.061 | 21.442 | 20.305 | 20.428 |
| 14 | Tanah Jambo Aye | 45.968 | 45.442 | 46.264 | 44.222 | 44.578 |
| 15 | Langkahan | 23.951 | 23.816 | 24.247 | 22.518 | 22.591 |
| 16 | Seunuddon | 26.536 | 26.354 | 26.831 | 25.982 | 26.162 |
| 17 | Baktiya | 38.018 | 37.632 | 38.313 | 37.657 | 38.057 |
| 18 | Baktiya Barat | 19.518 | 19.461 | 19.813 | 18.980 | 19.117 |
| 19 | Lhoksukon | 51.679 | 51.050 | 51.974 | 49.733 | 50.134 |
| 20 | Tanah Luas | 25.538 | 25.374 | 25.833 | 25.193 | 25.425 |

| No. | Kecamatan | Tahun | | | | |
|--------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 21 | Nibong | 10.277 | 10.385 | 10.573 | 10.778 | 10.921 |
| 22 | Samudera | 28.393 | 28.178 | 27.147 | 27.147 | 27.326 |
| 23 | Syamtalira Aron | 18.949 | 18.902 | 19.345 | 19.345 | 19.576 |
| 24 | Tanah Pasir | 9.345 | 9.469 | 9.978 | 9.978 | 10.110 |
| 25 | Lapang | 8.936 | 9.067 | 9.231 | 8.806 | 8.864 |
| 26 | Muara Batu | 28.486 | 28.270 | 28.782 | 27.753 | 27.996 |
| 27 | Dewantara | 50.990 | 50.373 | 51.285 | 45.882 | 45.951 |
| Jumlah | | 602.554 | 608.397 | 619.407 | 602.793 | 608.106 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

2. Pertumbuhan Penduduk

a. Laju Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk adalah besaran persentase perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah pada waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk pada waktu sebelumnya. Angka pertumbuhan penduduk merupakan salah satu indikator yang berguna untuk melihat kecenderungan dan memproyeksikan jumlah penduduk di masa depan. Secara umum Angka Pertumbuhan Penduduk menggambarkan perubahan penduduk yang dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah maupun karena migrasi penduduk. Tabel 2.4 berikut menampilkan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2010 dan 2020.

Tabel 2.4
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2010 dan 2020

| No. | Kecamatan | Jumlah Penduduk (Jiwa) | Jumlah Penduduk (Jiwa) | Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun (%) | Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun (%) |
|--------------|------------------|------------------------|------------------------|---|---|
| | | 2010 | 2020 | 2010 | 2020 |
| 1. | Sawang | 34.024 | 39.063 | 2,06 | 1,39 |
| 2. | Nisam | 17.255 | 19.663 | 1,08 | 1,31 |
| 3. | Nisam Antara | 12.195 | 13.465 | 0,60 | 1,00 |
| 4. | Banda Baro | 7.437 | 7.926 | 0,24 | 0,64 |
| 5. | Kuta Makmur | 22.208 | 26.379 | 0,86 | 1,74 |
| 6. | Simpang Keuramat | 8.781 | 9.957 | 3,58 | 1,26 |
| 7. | Syamtalira Bayu | 19.110 | 22.393 | 2,31 | 1,60 |
| 8. | Geureudong Pase | 4.484 | 5.534 | 1,94 | 2,13 |
| 9. | Meurah Mulia | 17.756 | 21.024 | 0,89 | 1,70 |
| 10. | Matangkuli | 16.558 | 18.756 | 1,12 | 1,25 |
| 11. | Paya Bakong | 12.794 | 15.555 | 1,70 | 1,97 |
| 12. | Pirak Timu | 7.474 | 8.799 | 1,66 | 1,65 |
| 13. | Cot Girek | 18.492 | 20.305 | -0,48 | 0,94 |
| 14. | Tanah Jambo Aye | 39.461 | 44.222 | 1,95 | 1,15 |
| 15. | Langkahan | 21.090 | 22.518 | 3,91 | 0,66 |
| 16. | Seunuddon | 23.457 | 25.982 | 3,81 | 1,03 |
| 17. | Baktiya | 32.731 | 37.657 | 1,41 | 1,41 |
| 18. | Baktiya Barat | 17.082 | 18.980 | 1,11 | 1,06 |
| 19. | Lhoksukon | 44.358 | 49.733 | 1,87 | 1,15 |
| 20. | Tanah Luas | 22.217 | 25.193 | 1,40 | 1,27 |
| 21. | Nibong | 9.121 | 10.778 | 0,45 | 1,68 |
| 22. | Samudera | 24.589 | 27.147 | 2,31 | 0,99 |
| 23. | Syamtalira Aron | 16.591 | 19.345 | 2,15 | 1,55 |
| 24. | Tanah Pasir | 8.445 | 9.978 | 2,61 | 1,68 |
| 25. | Lapang | 7.974 | 8.806 | 1,14 | 1,00 |
| 26. | Muara Batu | 24.585 | 27.753 | 3,08 | 1,22 |
| 27. | Dewantara | 43.797 | 45.882 | 1,15 | 0,47 |
| TOTAL | | 534.085 | 602.793 | 1,69 | 1,22 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021

b. Perkembangan Pertumbuhan Penduduk

Gambaran perkembangan pertumbuhan penduduk dari tahun 2019 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut :

Tabel 2.5
Perkembangan Angka Pertumbuhan Penduduk Kabupaten
Aceh Utara Tahun 2017-2021

| No. | Kecamatan | Angka Pertumbuhan Penduduk (%) | | | | |
|-----|-----------------|--------------------------------|------|------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Sawang | 1,55 | 2,12 | 1,78 | 1,39 | 1,04 |
| 2 | Nisam | 1,53 | 1,89 | 1,57 | 1,31 | 0,97 |
| 3 | Nisam Antara | 1,53 | 2,00 | 1,68 | 1,00 | 0,66 |
| 4 | Banda Baro | 1,58 | 1,87 | 1,56 | 0,64 | 0,32 |
| 5 | Kuta Makmur | 1,54 | 1,99 | 1,67 | 1,74 | 1,38 |
| 6 | Simpang Kramat | 1,50 | 1,97 | 1,65 | 1,26 | 0,92 |
| 7 | Syamtalira Bayu | 1,51 | 1,85 | 1,54 | 1,60 | 1,24 |
| 8 | Geureudong Pase | 1,50 | 2,12 | 1,78 | 2,13 | 1,75 |
| 9 | Meurah Mulia | 1,56 | 2,01 | 1,68 | 1,70 | 1,34 |
| 10 | Matangkuli | 1,53 | 2,12 | 1,78 | 1,25 | 0,91 |
| 11 | Paya Bakong | 1,52 | 2,00 | 1,67 | 1,97 | 1,60 |
| 12 | Pirak Timu | 1,53 | 2,00 | 1,67 | 1,65 | 1,28 |
| 13 | Cot Girek | 1,51 | 2,11 | 1,77 | 0,94 | 0,61 |
| 14 | Tanah Jambo Aye | 1,53 | 2,27 | 1,92 | 1,15 | 0,81 |
| 15 | Langkahan | 1,48 | 1,98 | 1,65 | 0,66 | 0,32 |
| 16 | Seunuddon | 1,52 | 1,91 | 1,60 | 1,03 | 0,69 |
| 17 | Baktiya | 1,54 | 2,25 | 1,89 | 1,41 | 1,06 |
| 18 | Baktiya Barat | 1,52 | 2,12 | 1,78 | 1,06 | 0,72 |
| 19 | Lhoksukon | 1,52 | 2,27 | 1,91 | 1,15 | 0,81 |
| 20 | Tanah Luas | 1,52 | 2,15 | 1,81 | 1,27 | 0,92 |
| 21 | Nibong | 1,55 | 2,11 | 1,77 | 1,68 | 1,33 |
| 22 | Samudera | 1,52 | 2,20 | 1,85 | 0,99 | 0,66 |
| 23 | Syamtalira Aron | 1,54 | 2,12 | 1,78 | 1,55 | 1,19 |
| 24 | Tanah Pasir | 1,56 | 1,89 | 1,57 | 1,68 | 1,32 |
| 25 | Lapang | 1,54 | 2,10 | 1,75 | 1,00 | 0,66 |
| 26 | Muara Batu | 1,53 | 2,25 | 1,90 | 1,22 | 0,88 |
| 27 | Dewantara | 1,53 | 2,26 | 1,90 | 0,47 | 0,15 |
| | Jumlah | 1,53 | 2,12 | 1,78 | 1,22 | 0,88 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

2.3. Akses Pelayanan Publik

a. Pelayanan Dasar

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan,

pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan.

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan sarana untuk menstabilkan norma dan nilai masyarakat, begitu pentingnya masalah pendidikan sebagai media untuk mensosialisasikan dan mereproduksi nilai-nilai tata susila keyakinan dan nilai-nilai dasar agar masyarakat luas berfungsi secara baik dalam berbangsa dan bernegara, maka diperlukan 4 pilar yang kokoh yang bersinergi untuk menunjang hal dimaksud yaitu perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, tata kelola dan akuntabilitas publik, dan pendidikan yang bernuansa islami. Indikator kinerja pelayanan pendidikan dapat dilihat dari tingkat partisipasi sekolah, ketersediaan sarana dan prasarana, ketersediaan tenaga pengajar serta tingkat kelulusan.

a. Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal (PAUDNI)

Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal yang diarahkan pada pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berakhlak mulia sebagai insane pembelajar sepanjang hayat yang mampu mengaktualisasikan dirinya secara optimal dalam berbagai keadaan dan tantangan masa depan. Misi PAUDNI adalah memfasilitasi layanan pendidikan kepada peserta didik secara merata, bermutu, relevan, dan menjangkau sasaran yang tak terlayani oleh pendidikan formal melalui penyelenggaraan pelayanan pendidikan anak usia dini, penyediaan pelayanan masyarakat, penyelenggaraan kursus dan pelatihan, penyediaan pelayanan pendidik dan tenaga kependidikan pendidik non formal, pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan dan potensi peserta didik. Perkembangan jumlah pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Aceh Utara tahun 2017-2021 sebagaimana terlihat pada Tabel 2.6 berikut:

Tabel 2.6
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2021

| No | Jenjang Pendidikan | Jumlah Satuan Pendidikan/Siswa | | | | |
|----|---------------------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Jumlah Siswa TK/RA/PAUD Sejenis | 30.158 | 31.806 | 15.714 | 18.346 | 18.866 |
| 2 | Jumlah penduduk usia 3-6 tahun | 42.028 | 48.189 | 48.428 | 48.568 | 48.632 |
| | APK (%) | 62,79 | 66,00 | 32,45 | 37,77 | 38,79 |

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

a. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar adalah perbandingan antara jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase, APK untuk mengetahui banyaknya siswa yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu makin tinggi APK berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di jenjang pendidikan tertentu atau banyak anak diluar usia sekolah.

Tabel 2.7
Angka Partisipasi Kasar SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2017-2021

| Uraian | Tahun | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Jumlah Murid SD/MI | 71.294 | 72.945 | 72.810 | 74.393 | 73.877 |
| Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun | 67.007 | 68.317 | 68.820 | 70.747 | 72.682 |
| APKSD/MI (%) | 106,4 | 106,77 | 105,80 | 105,15 | 101,64 |
| Jumlah Siswa SMP/MTs | 34.616 | 34.473 | 33.708 | 36.800 | 37.365 |
| Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun | 33.768 | 33.143 | 32.393 | 36.348 | 37.589 |
| APK SMP/MTs (%) | 102,51 | 104,01 | 104,06 | 101,24 | 99,40 |

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

b. Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT)

Angka Pendidikan yang Ditamatkan adalah menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah disekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan surat tanda tamat belajar/ijazah. Komposisi penduduk menurut tingkat

pendidikan yang ditamatkan memberikan gambaran terhadap kualitas sumber daya manusia. Semakin banyak penduduk yang berpendidikan tinggi menunjukkan keadaan kualitas penduduk yang semakin baik.

Tabel 2.8 menunjukkan *trend* angka penduduk yang menamatkan sekolah pada jenjang pendidikan SMP keatas menunjukkan perkembangan yang cenderung meningkat dalam 5 (lima) tahun terakhir. Meningkatnya jumlah penduduk yang menamatkan sekolah pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi menunjukkan tingkat kesejahteraan dan kesadaran penduduk terhadap pendidikan terus meningkat.

Tabel 2.8
Persentase Penduduk Kabupaten Aceh Utara Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki Tahun 2017-2021

| Pendidikan | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Tidak Mempunyai Ijazah | 12,21 | 13,28 | 9,76 | 7,40 | 10,42 |
| SD/MI | 34,59 | 30,47 | 28,25 | 26,95 | 22,88 |
| SMP/MTs | 24,99 | 24,13 | 24,89 | 25,37 | 27,07 |
| SMA/SMK/MA | 21,93 | 25,15 | 30,14 | 32,42 | 31,29 |
| DI/DII/DIII | 2,08 | 1,77 | 1,67 | 1,85 | 2,1 |
| DIV/S1/S2/S3 | 4,20 | 5,20 | 5,29 | 6,01 | 6,25 |
| Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2022, Data diolah

c. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. APM digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada jenjang yang sesuai. Makin tinggi APM berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah sesuai usia yang tepat di jenjang pendidikan tertentu. Angka Partisipasi Murni Kabupaten Aceh Utara dapat dilihat pada Tabel 2.9 berikut :

Tabel 2.9
Angka Partisipasi Murni Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2017-2021

| Uraian | Tahun | | | | |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Jumlah Murid SD/MI usia 7-12 tahun | 62.556 | 63.735 | 64.119 | 68.057 | 64.876 |
| Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun | 67.007 | 68.317 | 68.820 | 70.747 | 72.682 |
| APM SD/MI (%) | 93,36 | 93,29 | 93,17 | 96,20 | 89,26 |
| Jumlah Siswa SMP/MTs Usia 13-15 tahun | 25.714 | 25.773 | 24.744 | 27.671 | 26.327 |
| Jumlah Penduduk kelompok Usia 13-15 | 33.768 | 33.143 | 32.393 | 36.348 | 37.589 |
| APM SMP/MTs (%) | 76,15 | 77,76 | 76,39 | 76,13 | 70,04 |

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

APM Kabupaten Aceh Utara untuk jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs dari tahun 2017 sampai 2021 fluktuatif namun cenderung menurun, hal ini menggambarkan bahwa masih terdapat masyarakat yang menyekolahkan anak tidak tepat waktu untuk jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs.

d. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Persentase penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat diketahui dengan menggunakan indikator yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Kenaikan persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. APS adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar, SD (7-15 tahun) dan SMP (15-18 tahun) yang masih menempuh pendidikan per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Perkembangan APS kabupaten Aceh Utara dapat dilihat pada Tabel 2.10 berikut :

Tabel 2.10
Perkembangan APS Menurut Jenjang Pendidikan
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2021

| Jenjang Pendidikan | Tahun | | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| SD/MI | 100% | 99,64% | 99,24% | 99,99% | 98,75% |
| SMP/MTs | 96,79% | 97,60% | 97,99% | 98,38% | 98,49% |

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2022

e. Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah adalah perbandingan antara jumlah capaian kinerja APS tingkat jenjang pendidikan tertentu sekabupaten dengan jumlah seluruh APS jenjang pendidikan tertentu sekabupaten dikalikan dengan seratus persen. Angka putus sekolah menunjukkan tingkat putus sekolah di suatu jenjang pendidikan, misalnya angka putus sekolah SD menunjukkan persentase anak yang berhenti sekolah sebelum tamat SD yang dinyatakan dalam persen sebagaimana terlihat pada Tabel 2.11 berikut :

Tabel 2.11
Angka Putus Sekolah Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2017-2021 (Persen)

| No | Jenjang Pendidikan | Tahun | | | | |
|----|--------------------|-------|------|------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | SD/MI | 0,14 | 0,13 | 0,17 | 0,16 | 0,35 |
| 2 | SMP/MTs | 0,47 | 0,33 | 0,66 | 0,56 | 1,76 |

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

f. Angka Kelulusan

Angka kelulusan adalah perbandingan jumlah lulusan pada jenjang pendidikan tertentu dibandingkan dengan jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang pendidikan tertentu tahun sebelumnya. Tingkat kelulusan bias menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan proses pendidikan. Tabel 2.12 menunjukkan tingkat kelulusan dari tahun ke tahun dalam periode 2017- 2021.

Tabel 2.12
Angka Kelulusan Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2017-2021 (Persen)

| No | Jenjang Pendidikan | Tahun | | | | |
|----|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | SD/MI | 97,80 | 99,79 | 99,56 | 99,56 | 99,99 |
| 2 | SMP/MTs | 98,00 | 99,80 | 92,97 | 99,49 | 99,99 |

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

g. Angka Melanjutkan Sekolah

Angka melanjutkan sekolah merupakan perbandingan jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang pendidikan tertentu tahun tertentu dengan jumlah lulusan pada jenjang pendidikan dibawahnya tahun ajaran sebelumnya dikalikan seratus persen. Angka melanjutkan sekolah mulai SD/MI ke SMP/MTs dan dari SMP/MTs ke SMU/SMK/MA pada periode tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.13 berikut:

Tabel 2.13
Angka Melanjutkan Sekolah Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2017-2021 (Persen)

| No | Jenjang Pendidikan | Tahun | | | | |
|----|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Dari SD/MI ke SMP/MTs | 84,23 | 84,80 | 85,76 | 90,56 | 86,56 |
| 2 | Dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK | 89,21 | 86,29 | 85,75 | 84,97 | 86,68 |
| | Rata-rata | 86,72 | 85,55 | 85,76 | 87,77 | 86,62 |

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

h. Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan merupakan salah satu bagian penting yang akan mendukung terwujudnya proses belajar mengajar yang kondusif. Kebijakan peningkatan fasilitas pendidikan yaitu dengan menyediakan Ruang Kegiatan Belajar-mengajar (RKB), Laboratorium dan fasilitas pendukung lainnya akan membantu tindakan guru dalam mengajar. Ketersediaan fasilitas pendidikan di Kabupaten Aceh Utara dapat dilihat pada Tabel 2.14 berikut:

Tabel 2.14
Jumlah Fasilitas Pendidikan
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2021

| No | Jenjang Pendidikan | Tahun | | | | |
|--------|--------------------|-------|------|------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | SD/MI | 412 | 412 | 412 | 413 | 366 |
| 2 | SMP/MTs | 175 | 188 | 188 | 198 | 145 |
| Jumlah | | 587 | 600 | 600 | 611 | 511 |

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

Teknologi pendidikan bukan dipandang secara fasilitas seperti laptop dan infokus. Akan tetapi teknologi merupakan ide untuk merancang program tersebut dan sarana prasarana tersebut hanya merupakan alat bantu pendidikan. Teknologi pendidikan yang terpenting adalah ide guru, rancangan guru, dan cara guru dalam mengajar. Teknologi pendidikan adalah tindakan guru untuk mengarahkan siswa pada tujuan pendidikan. Alat bantu yang merupakan fasilitas tersebut yaitu gedung RKB (Ruang Kegiatan Belajar-mengajar) yang merupakan sarana pembantu dari tindakan guru dalam mengajar.

Kondisi fasilitas sekolah dapat juga dilihat dari akreditasi sekolah. Pada tahun 2021, PAUD yang telah terakreditasi berjumlah 105 dari 514 sekolah atau hanya sebesar 20,43 persen. Untuk jenjang Pendidikan SD, 363 sekolah atau 99,18 persen telah terakreditasi dengan status akreditasi A sebesar 18,85 persen. Sedangkan untuk jenjang SMP, 129 sekolah atau 88,97 persen telah terakreditasi dengan status akreditasi A sebesar 26,21 persen. Sekolah yang telah memperoleh akreditasi A untuk semua jenjang Pendidikan berjumlah 112 dari 1.025 sekolah atau 10,92 persen. Jumlah sekolah yang telah terakreditasi untuk setiap jenjang pendidikan adalah sebagaimana Tabel 2.15 berikut :

Tabel 2.15
Jumlah Sekolah yang Terakreditasi Tahun 2021

| No | Jenjang | Jumlah Sekolah | Status Akreditasi | Jumlah Terakreditasi | Persentase |
|----|------------------------------------|----------------|---------------------|----------------------|------------|
| 1 | PAUD (TK, Paud, SBB, SPS) | 514 | Akreditasi A | 5 | 0,97 |
| | | | Akreditasi B | 63 | 12,26 |
| | | | Akreditasi C | 37 | 7,20 |
| | | | Belum Terakreditasi | 409 | 79,57 |
| 2 | SD | 366 | Akreditasi A | 69 | 18,85 |
| | | | Akreditasi B | 255 | 69,67 |
| | | | Akreditasi C | 39 | 10,66 |
| | | | Belum Terakreditasi | 3 | 0,82 |
| 3 | SMP | 145 | Akreditasi A | 38 | 26,21 |
| | | | Akreditasi B | 64 | 44,14 |
| | | | Akreditasi C | 27 | 18,62 |
| | | | Belum Terakreditasi | 16 | 11,03 |

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

i. Guru yang Memenuhi Kualifikasi

Kualifikasi guru merupakan faktor yang sangat penting dalam rangka mendorong peningkatan mutu pendidikan. Peningkatan jumlah guru yang berkualifikasi S1/D.IV selama periode 2017-2021 sangat dipengaruhi oleh faktor tuntutan peraturan yang mensyaratkan kualifikasi S1/D.IV untuk mendapatkan tunjangan profesi/sertifikasi. Persentase guru yang berpendidikan S1/D.IV selama tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.16 berikut:

Tabel 2.16
Guru dengan Kualifikasi S1/D-IV
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2021

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|----|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Jumlah Guru SD/MI ≥ S1/D4 | 4.955 | 4.122 | 4.771 | 5.047 | 4.779 |
| | Jumlah Guru | 7.007 | 4.734 | 5.482 | 5.270 | 5.590 |
| | Persentase SD/MI | 70,71 | 87,07 | 87,03 | 95,77 | 85,49 |
| 2 | Jumlah Guru SMP/MTs ≥ S1/D4 | 4.046 | 2.513 | 2.747 | 2.666 | 2.780 |
| | Jumlah Guru | 4.512 | 2.691 | 2.923 | 2.761 | 2.943 |
| | Persentase SMP/MTs | 88,67 | 93,39 | 93,98 | 96,56 | 94,46 |

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara 2022

j. Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar meliputi: Kompetensi pedagogik; Kompetensi kepribadian; Kompetensi profesional; dan Kompetensi sosial. Pendidik meliputi pendidik pada TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs. Kompetensi guru dapat dilihat dari hasil uji kompetensi guru. Hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) yang dilaksanakan pada tahun 2019, hanya 67 persen guru yang lulus UKG.

2. Kesehatan

a. Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayi (AKB) merupakan indikator keberhasilan pembangunan pada sektor kesehatan dimana dapat menggambarkan perkembangan derajat kesehatan, dapat juga digunakan sebagai indikator penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan dan program pembangunan kesehatan lainnya. Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Trend AKB di Kabupaten Aceh Utara tahun 2017-2021 berada pada 3-5 per 1000 kelahiran hidup.

Tabel 2.17
Angka Kematian Bayi Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2017-2021

| Uraian | Tahun | | | | |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Angka Kematian Bayi (AKB) | 5/ 1000 | 3/ 1000 | 4/ 1000 | 5/ 1000 | 5/ 1000 |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

b. Angka Kematian Ibu (AKI)

Indikator lainnya untuk menilai derajat Kesehatan masyarakat adalah Angka Kematian Ibu (AKI). AKI merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan upaya kesehatan ibu. AKI adalah rasio kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan atau insidental di setiap 100.000 kelahiran hidup. AKI di Kabupaten Aceh Utara selama tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.18
Angka Kematian Ibu Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2017-2021

| Uraian | Tahun | | | | |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Angka Kematian Ibu (AKI) | 149/ 100.000 | 111/ 100.000 | 207/ 100.000 | 138/ 100.000 | 228/ 100.000 |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Aceh Utara masih berfluktuasi, pada tahun 2017 sejumlah 149 dan terjadi penurunan pada tahun 2018 menjadi 111 dan pada tahun 2021 kembali naik mencapai 228 per 100.000 kelahiran hidup. Upaya penurunan AKI harus dilakukan sedini mungkin dengan melakukan *screening* bagi ibu-ibu hamil yang resiko tinggi, riwayat penyakit kronis dan gangguan kesehatan lainnya, adanya upaya pencegahan dan perhatian khusus bagi ibu-ibu yang mengalami kondisi seperti tersebut diatas sehingga dapat diambil tindakan yang tepat dan cepat dalam mengatasi terjadinya kasus-kasus penyebab kematian pada ibu melahirkan.

c. Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Pemeliharaan kesehatan ibu dan anak-anak sejak usia dini merupakan suatu strategi dalam upaya pemenuhan pelayanan kesehatan dasar yang meliputi peningkatan status kesehatan dan gizi yang baik, lingkungan yang sehat dan aman, pengembangan psikososial/emosi, kemampuan berbahasa dan pengembangan kemampuan kognitif (daya pikir dan daya cipta) serta perlindungan anak.

Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat, dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Jumlah Posyandu dan jumlah balita yang dilayani di Kabupaten Aceh Utara selama tahun 2017–2021 dapat dilihat pada Tabel 2.19 berikut :

Tabel 2.19
Jumlah Posyandu dan Jumlah Balita
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017–2021

| URAIAN | Tahun | | | | |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Jumlah Posyandu | 952 | 952 | 962 | 969 | 969 |
| Jumlah Balita | 64.763 | 42.160 | 53.563 | 54,494 | 51.909 |
| Rasio Posyandu/Satuan Balita | 14,70 | 22,58 | 18,09 | 17,78 | 18,66 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

Rasio posyandu pada tahun 2017-2021 berada antara 14-22 posyandu per 1.000 balita, rasio ini telah memenuhi standar yaitu 12-50 posyandu per 1.000 balita.

3. Pekerjaan Umum

a. Jalan

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsure penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jalan sebagai bagian system transportasi mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan.

Bahwa untuk terpenuhinya peranan jalan sebagaimana mestinya, pemerintah mempunyai hak dan kewajiban menyelenggarakan jalan. Dan agar penyelenggaraan jalan dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna, diperlukan keterlibatan masyarakat. Penyelenggaraan jalan itu sendiri meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.

Penyelenggaraan jalan dilakukan dengan mengutamakan pembangunan jaringan jalan di pusat-pusat produksi serta jalan-jalan yang menghubungkan pusat-pusat produksi dengan daerah pemasaran. Penyelenggaraan jalan diarahkan untuk pembangunan jaringan jalan dalam rangka memperkuat kesatuan wilayah nasional sehingga menjangkau daerah terpencil. Arah dari penyelenggaraan jalan adalah untuk mewujudkan:

- Perikehidupan rakyat yang serasi dengan tingkat kemajuan yang sama, merata, dan seimbang
- Daya guna dan hasil guna upaya pertahanan keamanan negara.
- Proporsi jaringan jalan dalam kondisi baik

Panjang jalan Kabupaten Aceh Utara secara keseluruhan hingga tahun 2021 adalah sepanjang 2.032,80 Km, dengan kondisi sebagai berikut: Kondisi jalan mantap sekitar 42 persen; kondisi jalan tidak mantap sebesar 58 persen dari total panjang jalan Kabupaten Aceh Utara. Untuk kondisi Jalan Tahun 2017-2021 dan persentase perkembangan kondisi jalan dapat dilihat pada Tabel 2.20 berikut :

Tabel 2.20
Persentase Kondisi Jalan di Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2017-2021

| Uraian | Tahun | | | | |
|---|-------|------|------|--------|------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Kondisi Jalan Mantap (Baik + Sedang) | 72% | 29% | 31% | 26,17% | 42% |
| Kondisi Jalan Tidak Mantap (Rusak Ringan + Rusak Berat) | 28% | 71% | 69% | 73,83% | 58% |

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Aceh Utara 2022

Pada tahun 2018, terjadi penurunan yang signifikan kondisi jalan mantap. Penurunan kondisi jalan umumnya disebabkan oleh berbagai hal, di antaranya: umur konstruksi, cuaca, bencana alam, pemanfaatan melebihi kapasitas jalan, dan sebagainya. Namun, penyebab paling utama penurunan kondisi jalan pada tahun 2018 adalah perubahan metode penilaian.

Jika sejak tahun 2013, penilaian kondisi jalan dibagi menjadi 2 (dua) kelompok jenis lapis permukaan, masing-masing untuk lapis permukaan aspal dan untuk lapis permukaan perkerasan berbutir, maka sejak tahun 2018, Dinas PUPR Kabupaten Aceh Utara mulai mengadakan penilaian dengan metode yang berbeda. Penilaian kondisi jalan tidak lagi membagi jenis lapis permukaan aspal dengan lapis permukaan perkerasan berbutir. Penilaian dengan cara tersebut memiliki konsekuensi semua jalan dengan jenis lapis permukaan perkerasan berbutir secara otomatis masuk kedalam kategori rusak.

b. Jaringan Irigasi

Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, pemanfaatan dan pembuangan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak. Air irigasi merupakan air baku yang berasal dari sumbernya dan disalurkan melalui jaringan primer, sekunder atau tersier yang dialokasikan untuk menunjang pertanian, sedangkan air yang berasal dari jaringan tersier yang dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian. Irigasi berfungsi mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi. Keberlanjutan sistem irigasi dilakukan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara bersifat partisipatif dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani. Kabupaten Aceh Utara memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk Daerah irigasi (DI) dengan luas <1.000 hektar yang berada dalam wilayah aceh utara. Sedangkan selebihnya, Daerah Irigasi (DI) dengan luas 1.000 hektar sampai dengan 3.000 hektar adalah menjadi wewenang dan tanggung jawab provinsi, dan Daerah Irigasi (DI) dengan luas >3.000 hektar menjadi tanggung kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Pusat. Penetapan Status Daerah Irigasi yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah

Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2015 tanggal 21 April 2015. Luas daerah irigasi di Kabupaten Aceh Utara adalah 56.136 Ha yang terdiri dari 125 Daerah Irigasi (DI) merupakan kewenangan Pemerintah pusat, Provinsi dan Kabupaten sebagaimana disajikan pada Tabel 2.21 berikut :

Tabel 2.21
Luasan Daerah Irigasi di Kabupaten Aceh Utara
Berdasarkan Kewenangan

| No | Kewenangan | Jumlah DI | Luas (Ha) |
|----|--------------------------|-----------|-----------|
| 1 | Pemerintah | 3 | 29.059 |
| | a. Lintas Kabupaten/Kota | 1 | 15.993 |
| | b. Utuh Kabupaten | 2 | 13.066 |
| 2 | Pemerintah Provinsi | 4 | 6.434 |
| | a. Lintas Kabupaten/Kota | - | - |
| | b. Utuh Kabupaten | 4 | 6.434 |
| 3 | Pemerintah Kabupaten | 118 | 20.643 |
| | Total | 125 | 56.136 |

Sumber : Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2015

Luas baku irigasi kewenangan kabupaten 20.643 hektar dengan luas potensial 4.993 hektar. Peran sektor pertanian sangat strategis dalam perekonomian Nasional dan daerah, dan kegiatan pertanian tidak terlepas dari irigasi, oleh sebab itu irigasi merupakan salah satu komponen pendukung keberhasilan pembangunan pertanian yang mempunyai peran yang sangat penting. Adanya perubahan tujuan pembangunan pertanian dari meningkatkan produksi untuk swasembada beras menjadi kelestarian ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan petani, kesempatan kerja di perdesaan, perbaikan gizi keluarga dan perlu menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Nilai SPM andalan ketersediaan air irigasi merupakan rasio ketersediaan air di petek-petak sawah dalam jumlah, waktu, dan tempat pada setiap musim tanam terhadap kebutuhan air irigasi berdasarkan rencana tata tanam yang telah ditetapkan. Rasio perkembangan jaringan irigasi dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.22
Rasio Perkembangan Jaringan Irigasi
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2021

| Uraian | Tahun | | | | |
|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Panjang Saluran (m) | 564.366 | 564.366 | 567.188 | 567.188 | 567.188 |
| Luas Lahan Budidaya Pertanian (Ha) | 52.481 | 52.481 | 52.481 | 52.481 | 52.481 |
| Rasio Andalan | 1:11 | 1:11 | 1:11 | 1:11 | 1:11 |

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

Upaya pencapaian target SPM dicapai melalui pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan (O&P) jaringan irigasi sesuai kewenangan pemerintah termasuk di dalamnya adalah kegiatan-kegiatan penunjang seperti perencanaan, pengawasan dan pemberdayaan lembaga dan masyarakat petani.

Tabel 2.23
Kondisi Irigasi Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2021

| Uraian | Tahun | | | | |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Kondisi Baik (%) | 35,27 | 35,59 | 35.91 | 36.23 | 40.00 |
| Kondisi Rusak (%) | 64,73 | 64,41 | 64.09 | 63.77 | 60.00 |

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Aceh Utara Tahun 2021

c. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Peningkatan pelayanan dasar bidang air bersih terus diupayakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui berbagai kolaborasi program dan pendanaan. Air bersih adalah salah satu jenis sumber daya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari termasuk diantaranya adalah sanitasi. Kebutuhan air untuk suatu daerah ditentukan oleh 2 (dua) parameter yaitu jumlah penduduk dan tingkat konsumsi air. Sumber air yang dapat digunakan sebagai air baku meliputi air sungai, air hujan, air tanah, air permukaan dari air mata air. Kualitas umum air dapat diukur dengan parameter seperti bau, rasa, tingkat kekeruhan dan warna. Perkembangan pengguna air bersih ini terus meningkat dari tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat sebagaimana Tabel 2.24 berikut:

Tabel 2.24
Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Tahun 2017–2021

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|----|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Jumlah rumah tangga pengguna air bersih | 88.920 | 93.845 | 99.743 | 103.217 | 104.820 |
| 2 | Jumlah seluruh rumah tinggal | 139.846 | 140.035 | 142.587 | 142.821 | 142.846 |
| | Persentase | 63.58 | 67.02 | 69,95 | 72,27 | 73,38 |

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Aceh Utara 2022

d. Rumah Tangga Bersanitasi

Peningkatan pelayanan dasar sanitasi merupakan kewajiban pemerintah dalam menjamin tersedianya akses sanitasi layak bagi lingkungan masyarakat. Pemerintah daerah berupaya keras untuk memenuhi akses pelayanan sanitasi terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah melalui pembangunan sarana prasarana sanitasi yang berkesinambungan. Hal ini terlihat dari capaian akses sanitasi yang layak.

Tabel 2.25
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Tahun 2017–2021

| Uraian | Tahun | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi | 80.895 | 85.952 | 91.610 | 95.657 | 96.292 |
| Jumlah seluruh rumah tinggal | 139.846 | 140.035 | 142.587 | 142.821 | 142.846 |
| Persentase | 57.85 | 61.38 | 64,25 | 66,98 | 67,41 |

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Aceh Utara 2022

Capaian pembangunan rumah tangga bersanitasi pada tahun 2017 sampai dengan 2021 cenderung meningkat, dari tahun sebelumnya peningkatan rumah tinggal bersanitasi difokuskan terutama pada rumah tangga berpenghasilan rendah/miskin.

e. Infrastruktur Drainase

Fungsi komponen drainase adalah upaya pembuangan air hujan keluar dari lokasi permukiman perumahan, pasar dan fasilitas umum lainnya untuk mengurangi atau menghindari terjadinya genangan air, mengendalikan volume air yang dapat berpotensi menggenangi di lokasi tanpa sumur resapan. Drainase mempunyai beberapa sistem yang terdiri dari drainase Primer, drainase sekunder, dan drainase tersier.

Tabel 2.26
Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran
Pembuangan Air (Minimal 1,5 m) Tahun 2017–2021

| Uraian | Tahun | | | | |
|--|----------|---------|---------|---------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Panjang Jalan Bertrotoar dan Drainase (Km) | 253,52 | 262.19 | 265,49 | 268,54 | 269,37 |
| Panjang Jalan Lingkungan | 2.120,43 | 2152.43 | 2155,06 | 2157,02 | 2.182,23 |
| Persentase | 11,96 | 12.18 | 12,32 | 12,45 | 12,34 |

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman Kab. Aceh Utara Tahun 2022

Pembangunan drainase lingkungan perdesaan, perkotaan dan kawasan pasar dilaksanakan melalui peningkatan program pembangunan Saluran drainase/gorong-gorong. Peningkatan kualitas saluran drainase yang baik (lancar) harus diupayakan pemerintah untuk menjaga kondisi lingkungan dan pusat-pusat aktifitas masyarakat dalam kondisi bersih, sehat dan tertata dengan baik. Gerakan gotong royong untuk menjaga kualitas saluran dalam kondisi lancar perlu di tingkatkan, selain untuk menjaga kondisi lingkungan juga terjalin hubungan kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun daerah.

f. Infrastruktur Bangunan Gedung dan Fasilitas Umum

Gedung yaitu segala sarana, prasarana atau infrastruktur dalam kebudayaan atau kehidupan manusia dalam membangun peradabannya. Bangunan memiliki beragam bentuk, ukuran, dan fungsi, serta telah mengalami penyesuaian sepanjang sejarah yang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti bahan bangunan, kondisi cuaca, harga, kondisi tanah, dan alasan estetika. Pembangunan Infrastruktur dan fasilitas publik dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam lingkup sosial dan ekonomi.

Pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Utara saat ini berada di Lhoksukon, sehingga perlu pemindahan kegiatan perkantoran yang selama ini ada di Lhokseumawe. Pembangunan beberapa kantor pemerintahan telah dilakukan yang sebagian besar berlokasi di Gampong Alue Drien Kecamatan Lhoksukon yang lebih dikenal dengan sebutan Landing. Saat ini, baru 16 dari 33 SKPK yang telah berkantor di wilayah Kabupaten Aceh Utara.

g. Rumah Layak Huni

Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuninya. Penyediaan rumah layak huni juga merupakan layanan dasar publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi dan melindungi masyarakatnya terutama masyarakat berpenghasilan rendah/miskin. Persentase tahun ketahun semakin meningkat dibandingkan persentase rumah layak huni tahun sebelumnya. Perkembangan persentase rumah layak huni dilihat pada Tabel 2.27 berikut:

Tabel 2.27
Persentase Rumah Layak Huni Tahun 2017–2021

| Prasarana | Tahun | | | | |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Rumah Layak Huni | 119.497 | 121.399 | 123.152 | 124.497 | 124.610 |
| Jumlah Rumah Tinggal | 139.846 | 140.035 | 142.687 | 142.821 | 142.846 |
| Persentase | 85,45 | 86,69 | 86,37 | 87,17 | 87,23 |

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Aceh Utara 2022

Upaya pembangunan rumah layak huni terus dikembangkan dengan pemanfaatan dari berbagai sumber pendanaan seperti pemanfaatan dana DOKA, TDBH Migas, ZIS serta dana desa.

4. Koperasi

Koperasi merupakan salah satu usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperluas lapangan pekerjaan. Semakin banyaknya koperasi aktif, maka diharapkan semakin menurunnya angka kemiskinan dan mengurangi angka pengangguran. Jumlah keseluruhan koperasi di Kabupaten Aceh Utara sampai dengan tahun 2021 sebanyak 486 unit yang terdiri dari 163 koperasi aktif dan 323 koperasi tidak aktif. Persentase koperasi aktif dari tahun 2017 s.d 2021 terus menunjukkan peningkatan, sebagaimana yang tercantum pada Tabel 2.28 berikut ini :

Tabel 2.28
 Persentase Koperasi Aktif di Kab. Aceh Utara Tahun 2017-2021

| No. | Uraian | Tahun | | | | |
|-----|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Jumlah Koperasi | 462 | 466 | 468 | 471 | 486 |
| 2 | Jumlah Koperasi Aktif | 138 | 141 | 148 | 153 | 163 |
| 3 | Jumlah Koperasi Tidak Aktif | 324 | 325 | 320 | 318 | 323 |
| 4 | Persentase Koperasi Aktif | 29,87 | 30,26 | 30,77 | 32,48 | 33,54 |
| 5 | Persentase Koperasi Tidak Aktif | 70,13 | 69,74 | 68,38 | 67,52 | 66,46 |

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kab. Aceh Utara Tahun 2022

Dengan meningkatnya jumlah Koperasi aktif di Kabupaten Aceh Utara diharapkan Koperasi yang ada di kabupaten Aceh Utara dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan kepada semua anggota koperasi, sehingga koperasi dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan salah satunya dapat menurunkan angka kemiskinan. Persoalan yang dihadapi saat ini oleh koperasi dan usaha mikro kecil, menengah adalah menyangkut dengan terbatasnya jaringan usaha dan informasi pasar. Untuk ke depan langkah yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara adalah melakukan perubahan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengurus koperasi melalui pelatihan pendampingan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja koperasi dan pelatihan pendampingan penyusunan laporan keuangan kepada manajemen dan pengurus koperasi. Selain itu juga supaya koperasi dapat berjalan dengan baik, maka perlu adanya petugas konsultasi koperasi lapangan (PKPL) untuk dapat memberikan bimbingan dan konsultasi kepada manajemen dan pengurus koperasi di dalam Kabupaten Aceh Utara.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan suatu peluang usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan usaha mikro, kecil dan menengah, sehingga sangat berperan untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan menyerap tenaga kerja di Kabupaten Aceh Utara. Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) selama tahun 2017-2021 terus mengalami peningkatan yaitu sebesar 16.791 UMKM atau mengalami peningkatan sebesar 64,91 persen sedangkan pada Tahun 2019 terjadi penurunan

sebesar 0.95 persen atau menurun 564 UMKM dari tahun 2018. Bertambahnya UMKM disebabkan jumlah pengusaha (wira usaha baru) di kabupaten Aceh Utara bertambah. Namun demikian UMKM di Kabupaten Aceh Utara masih menghadapi kendala, yaitu terbatas akses permodalan, bahan baku, informasi pasar serta jaringan kerja dan kemitraan, sehingga masih sulit berdaya saing dengan daerah lain. Pada Tabel 2.29 berikut ini dapat dilihat jumlah UMKM di Kabupaten Aceh Utara.

Tabel 2.29
Jumlah UMKM di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017–2021

| No. | Usaha | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|-----|----------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| | | unit | (%) | unit | (%) | unit | (%) | unit | (%) | unit | (%) |
| 1 | Usaha Mikro | 6.352 | 58,28 | 5.635 | 50,69 | 5.710 | 50,24 | 10.607 | 64,97 | 10.576 | 62,99 |
| 2 | Usaha Kecil | 4.190 | 38,44 | 4.915 | 44,21 | 5.026 | 44,36 | 5.131 | 31,43 | 5.621 | 33,48 |
| 3 | Usaha Menengah | 357 | 3,28 | 567 | 5,10 | 592 | 5,40 | 587 | 3,6 | 594 | 3,54 |
| | Jumlah UMKM | 10.899 | 100 | 11.117 | 100 | 10.653 | 100 | 16.325 | 100 | 16.791 | 100 |

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kab. Aceh Utara Tahun 2022

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terdiri dari 7 sektor ekonomi, seperti ditunjukkan pada Tabel di bawah dapat dilihat bahwa dari 7 sektor ekonomi yang bergerak untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), masih sedikit UMKM yang bergerak di sektor pertanian, perikanan dan peternakan. Selanjutnya akses modal untuk mendukung pengembangan UMKM masih terbatas.

Tabel 2.30
Jumlah UMKM Berdasarkan Sektor Ekonomi di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017–2021

| No | Sektor Ekonomi | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|----|---------------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| | | Unit UMKM | (%) | Unit UMKM | (%) | Unit UMKM | (%) | Unit UMKM | (%) | Unit UMKM | (%) |
| 1 | Perdagangan/ Jasa | 10,191 | 93,50 | 10,409 | 93,63 | 10.563 | 93,25 | 14.073 | 86,21 | 14.478 | 86,62 |
| 2 | Pertanian | 167 | 1,53 | 167 | 1,50 | 189 | 1,67 | 189 | 1,16 | 202 | 1,20 |
| 3 | Pertambangan | 12 | 0,11 | 12 | 0,11 | 13 | 0,11 | 13 | 0,08 | 14 | 0,08 |
| 4 | Industri | 441 | 4,06 | 441 | 3,97 | 472 | 4,17 | 1.384 | 8,48 | 1.404 | 8,36 |
| 5 | Perikanan/ Kelautan | 28 | 0,28 | 28 | 0,25 | 28 | 0,25 | 28 | 0,17 | 52 | 0,31 |
| 6 | Peternakan | 23 | 0,21 | 23 | 0,21 | 26 | 0,23 | 607 | 3,72 | 610 | 3,63 |
| 7 | Transportasi | 37 | 0,34 | 37 | 0,33 | 37 | 0,33 | 31 | 0,19 | 31 | 0,16 |
| | T o t a l | 10,899 | 100 | 11,117 | 100 | 11.328 | 100 | 16.325 | 100 | 16.791 | 100 |

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kab. Aceh Utara Tahun 2022

5. Penanaman Modal

Investasi menjadi hal penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini perlu didukung oleh kehadiran pihak swasta untuk membuka investasi di Kabupaten Aceh Utara. Perkembangan investasi setiap tahunnya mengalami peningkatan, sebagaimana pada Tabel 2.31 berikut :

Tabel 2.31
Perkembangan Jumlah Investor Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2017-2021

| Uraian | Tahun (Jumlah Perusahaan) | | | | |
|----------------------------|---------------------------|------|------|------|-------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Investor PMDN Dalam Daerah | 52 | 751 | 411 | 994 | 1.267 |
| Investor PMA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 54 | 751 | 411 | 994 | 1.267 |

Sumber : Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Aceh Utara Tahun 2022

Sedangkan untuk perkembangan Nilai Investasi tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.32 berikut:

Tabel 2.32
Perkembangan Nilai Investasi Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2017-2021

| Uraian | Nilai Investasi (Rp.) | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Investasi PMDN dalam Daerah | 5.712.451.374.869 | 550.239.815.078 | 268.940.000.000 | 2.105.842.849.950 | 474.609.756.808 |
| Investasi PMA | 2.918.832.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 8.631.83.374.869 | 550.239.815.078 | 268.940.000.000 | 2.107.842.849.950 | 474.609.756.808 |

Sumber : Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Aceh Utara Tahun 2022

2.4. Sosial Budaya

Kondisi lain dalam fokus kesejahteraan masyarakat adalah usaha meningkatkan ekspresi masyarakat dalam melestarikan seni budaya, ini sangat sesuai dengan Kabupaten Aceh Utara yang berjuduk sebagai “Bumi Samudera Pase” memiliki beragam budaya yang khas dan unik serta sejarah Kerajaan Samudera Pase yang pernah muncul pada abad ke-13 Masehi.

Tabel. 2.33
Jumlah Grup Kesenian di Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2017-2021

| Uraian | Tahun | | | | |
|-------------------------|-------|------|------|------|------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Jumlah sanggar kesenian | 82 | 121 | 121 | 121 | 121 |
| Jumlah museum | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Jumlah pusat Kebudayaan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2021

Tabel 2.34
Pegiat Seni dan Budaya
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2021

| Uraian | Tahun | | | | |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Pegiat Seni dan Budaya | | | | | |
| Seni Rupa | | | | | |
| Jumlah Kelompok Seni Lukis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Jumlah Kelompok Seni Kriya | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Jumlah Kelompok Seni Dekorasi | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Jumlah Kelompok Seni Reklame | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Seni Tari/Gerak | | | | | |
| a. Tari Klasik | | | | | |
| Jumlah Kelompok | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Jumlah Anggota | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| b. Tari Kreasi Baru | | | | | |
| Jumlah Kelompok | 51 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Jumlah Anggota | 1.007 | 1.592 | 1.592 | 1.592 | 1.592 |
| c. Tari Tradisional | | | | | |
| Jumlah Kelompok | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Jumlah Anggota | 1.070 | 1.568 | 1.568 | 1.568 | 1.568 |
| Seni Suara | | | | | |
| Jumlah Kelompok | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Jumlah Anggota | 370 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Seni Musik Tradisional | | | | | |
| Jumlah Kelompok | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Jumlah Anggota | 139 | 148 | 148 | 148 | 148 |
| Seni Sastra | | | | | |
| Jumlah Kelompok | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Jumlah Anggota | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 |

| Uraian | Tahun | | | | |
|-------------------------------|-------|------|------|------|------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Seni Teater/Drama | | | | | |
| Jumlah Kelompok | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Jumlah Anggota | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Pagelaran/Pameran Seni Budaya | | | | | |
| a. Pagelaran Seni Budaya | | | | | |
| Jumlah Pagelaran | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Jumlah Pengunjung | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| b. Pameran Seni Budaya | | | | | |
| Jumlah Pameran | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jumlah Pengunjung | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat perkembangan penggiat seni dan budaya di Kabupaten Aceh Utara terus meningkat. Banyaknya potensi Seni Budaya dan Pariwisata di kabupaten Aceh Utara mestinya menjadi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan perekonomiannya, tetapi potensi ini belum dikelola dengan baik sehingga belum banyak memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian seni budaya di kabupaten Aceh Utara, pada tahun 2022 ditargetkan semua potensi dari sektor seni budaya dan pariwisata dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan promosi, sosialisasi, dan pagelaran seni budaya serta ekonomi kreatif.

2.5. Perekonomian

Untuk dapat memberikan gambaran kondisi ekonomi daerah adalah dengan mengetahui struktur ekonomi suatu daerah yang antara lain dapat diketahui dengan melihat perkembangan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), tingkat pendapatan per kapita masyarakat serta pergeseran struktur perekonomian daerah, dan perkembangan laju inflasi.

2.5.1 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Aceh Utara periode 2017–2021 merupakan perkembangan perekonomian Kabupaten Aceh Utara selama 5 (lima) tahun terakhir. Perlu diinformasikan bahwa data yang telah direvisi yaitu tahun 2019 dan akan menjadi angka tetap, tahun 2020 masih bersifat sementara dan tahun 2021 masih sangat sementara. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 II. 28 Produk Domestik Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar “harga berlaku” dan atas dasar “harga konstan”. Disebut harga berlaku karena seluruh agregat nilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu, dalam hal ini digunakan harga tahun 2010. Perkembangan nilai PDRB Kabupaten Aceh Utara atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha tahun 2017–2021 dapat dilihat pada Tabel di bawah. Nilai PDRB ADHB Aceh Utara selama periode 2017-2021 cenderung meningkat yaitu dari 17,5 triliun rupiah pada tahun 2017 menjadi 23,19 triliun rupiah di tahun 2021. Sedangkan nilai PDRB Kabupaten Aceh Utara atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha selama periode 2017-2020 cenderung meningkat yaitu dari 15,54 triliun rupiah pada tahun 2017 menjadi 17,02 triliun rupiah di tahun 2020, namun pada tahun 2021 menurun menjadi 16,92 triliun rupiah yang disebabkan oleh menurunnya PDRB pada lapangan usaha pertambangan dan penggalian dari 4,49 triliun rupiah menjadi 3,97 triliun rupiah.

Tabel 2.35
 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
 di Kabupaten Aceh Utara Menurut Lapangan Usaha (Milliar Rupiah)
 Tahun 2017-2021

| No. | Lapangan Usaha | TAHUN | | | | |
|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2017 | 2018 | 2019r | 2020* | 2021** |
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 5.987,64 | 6.381,92 | 6.714,77 | 7.164,37 | 7.492,14 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 2.883,48 | 3.352,04 | 3.476,58 | 3.103,02 | 5.370,81 |
| C | Industri Pengolahan | 1.703,13 | 1.823,60 | 1.714,52 | 1.663,78 | 1.878,07 |
| D | Listrik dan Gas | 15,53 | 16,83 | 18,15 | 18,79 | 18,78 |
| E | Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 4,03 | 4,38 | 5,48 | 5,49 | 5,79 |
| F | Konstruksi | 979,09 | 1.033,89 | 1.113,90 | 1.207,58 | 1.219,58 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 2.229,64 | 2.352,47 | 2.428,47 | 2.325,64 | 2.564,11 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 979,11 | 953,19 | 982,37 | 799,84 | 996,02 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 91,49 | 104,22 | 116,22 | 118,31 | 118,51 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 295,60 | 293,12 | 309,22 | 333,61 | 367,21 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 279,70 | 291,19 | 337,26 | 337,41 | 338,61 |
| L | Real Estate | 501,22 | 533,01 | 580,01 | 596,51 | 628,95 |
| M,N | Jasa Perusahaan | 53,63 | 56,59 | 59,99 | 61,29 | 62,32 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial | 598,00 | 645,26 | 701,86 | 722,28 | 788,93 |
| P | Jasa Pendidikan | 302,95 | 337,87 | 396,37 | 443,69 | 475,75 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 400,63 | 426,38 | 489,38 | 553,33 | 613,86 |
| R,S, T,U | Jasa Lainnya | 197,52 | 209,39 | 230,39 | 247,73 | 252,79 |
| PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO | | 17.502,34 | 18.815,38 | 19.674,95 | 19.702,65 | 23.192,24 |
| PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO NON MIGAS | | 14.843,04 | 15.674,82 | 16.425,39 | 16.840,67 | n/a |

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Tabel 2.36
 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010
 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Aceh Utara (Milyar rupiah),
 Tahun 2017-2021

| No. | Lapangan Usaha | 2017 | 2018 | 2019 ^r | 2020 [*] | 2021 ^{**} |
|--|--|-----------|-----------|-------------------|-------------------|--------------------|
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 4.522,90 | 4.702,79 | 4.894,40 | 5.046,48 | 5.054,11 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 3.754,80 | 3.965,26 | 4.155,54 | 4.494,14 | 3.971,66 |
| C | Industri Pengolahan | 1.683,88 | 1.883,77 | 1.702,24 | 1.586,65 | 1.594,82 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 15,23 | 16,25 | 17,44 | 18,29 | 18,30 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 2,55 | 2,70 | 3,38 | 3,35 | 3,53 |
| F | Konstruksi | 769,88 | 792,47 | 832,24 | 876,14 | 872,83 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 1.818,17 | 1.887,50 | 1.947,79 | 1.850,18 | 1.965,14 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 840,84 | 858,16 | 899,38 | 703,05 | 871,07 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 64,18 | 70,04 | 75,01 | 74,11 | 73,96 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 259,51 | 264,89 | 278,32 | 302,93 | 332,93 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 193,94 | 194,83 | 220,58 | 221,76 | 210,49 |
| L | Real Estate | 398,28 | 414,87 | 440,29 | 435,49 | 458,65 |
| M,N | Jasa Perusahaan | 45,15 | 47,14 | 49,09 | 48,12 | 48,92 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 446,99 | 469,55 | 492,60 | 476,53 | 506,33 |
| P | Jasa Pendidikan | 233,34 | 252,41 | 274,62 | 283,11 | 301,93 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan | 339,47 | 357,62 | 392,86 | 413,07 | 453,87 |
| R,S, T,U | Jasa lainnya | 155,83 | 163,47 | 176,89 | 184,06 | 185,57 |
| PRODUK DOMESTIK REGIONAL | | 15.544,94 | 16.286,46 | 16.852,70 | 17.017,45 | 16.924,10 |
| PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO NON MIGAS | | 11.981,81 | 12.508,88 | 12.885,77 | 12.712,88 | n/a |

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

- ^r Angka revisi
- ^{*} Angka sementara
- ^{**} Angka sangat sementara

Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Utara menurut ADHK 2010 selama tahun 2017-2021 berfluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan berada di bawah Aceh dan nasional sebagaimana dapat dilihat pada Gambar berikut ini. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Utara mengalami penurunan dari 3,48 menjadi 0,98 akibat dampak dari pandemi Covid-19, tetapi masih berada di atas pertumbuhan ekonomi Aceh dan nasional. Pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan sebesar -0,55 akibat penurunan pada lapangan usaha pertambangan dan penggalian.

Gambar 2.11
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Utara,
Aceh dan Nasional Tahun 2017-2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

Tabel 2.37
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
Kabupaten Aceh Utara ADHK Menurut Lapangan Usaha (Persen)
Tahun 2017-2021

| No. | Lapangan Usaha | 2017 | 2018 | 2019r | 2020* | 2021** |
|----------|--|--------|------|-------|--------|--------|
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 5,24 | 3,98 | 4,07 | 3,11 | 0,15 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 5,99 | 5,40 | 5,00 | 8,15 | -11,63 |
| C | Industri Pengolahan | -22,62 | 8,94 | -7,21 | -6,79 | 0,51 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 11,94 | 6,69 | 7,29 | 4,88 | 0,77 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 10,82 | 6,17 | 25,06 | -0,95 | 5,37 |
| F | Konstruksi | 8,11 | 2,93 | 5,02 | 5,27 | -0,38 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 6,87 | 3,81 | 3,19 | -5,01 | 6,21 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 4,33 | 2,03 | 4,83 | -21,83 | 23,90 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 9,60 | 9,12 | 7,11 | -1,20 | -0,21 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 2,20 | 2,07 | 5,07 | 8,84 | 9,90 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 9,93 | 0,46 | 13,22 | 0,53 | -5,08 |
| L | Real Estate | 9,61 | 4,17 | 6,13 | -1,09 | 5,32 |
| M,N | Jasa Perusahaan | 3,91 | 4,41 | 4,15 | -1,99 | 1,66 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 14,46 | 5,05 | 4,91 | -3,26 | 6,25 |
| P | Jasa Pendidikan | 11,67 | 8,18 | 8,80 | 3,09 | 6,65 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 10,65 | 5,35 | 9,85 | 5,14 | 9,88 |
| R,S, T,U | Jasa lainnya | 9,89 | 4,90 | 8,21 | 4,05 | 0,82 |
| | PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO | 2,30 | 4,77 | 3,48 | 0,98 | -0,55 |
| | PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO NON MIGAS | 1,09 | 4,40 | 3,01 | -1,36 | n/a |

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

r Angka revisi

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Ditinjau dari distribusi persentase PDRB ADHB, struktur perekonomian Kabupaten Aceh Utara tahun 2017-2021 masih didominasi oleh sektor primer (pertanian, kehutanan dan perikanan) dengan kontribusi terendah sebesar 32,30 persen pada tahun 2021 dan tertinggi 36,36 persen pada tahun 2020. Lapangan usaha pertambangan dan penggalian menjadi sektor terbesar kedua dengan kontribusi terendah sebesar 15,75 persen pada tahun 2020 dan tertinggi sebesar 23,16 persen pada tahun 2021. Selanjutnya sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor menjadi sektor terbesar ketiga, kontribusinya cenderung menurun dari 12,74 persen pada tahun 2017 menjadi 11,06 persen pada tahun 2021. Sektor industri pengolahan menjadi sektor terbesar keempat, kontribusinya cenderung menurun dari 9,73 persen pada tahun 2017 menjadi 8,10 persen pada tahun 2021.

Tabel 2.38
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Aceh Utara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen), Tahun 2017-2021

| No. | Lapangan Usaha | 2017 | 2018 | 2019r | 2020* | 2021** |
|----------------|--|-------|-------|-------|-------|--------|
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 34,21 | 33,92 | 34,13 | 36,36 | 32,30 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 16,47 | 17,82 | 17,67 | 15,75 | 23,16 |
| C | Industri Pengolahan | 9,73 | 9,69 | 8,71 | 8,44 | 8,10 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,08 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
| F | Konstruksi | 5,59 | 5,49 | 5,66 | 6,13 | 5,26 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 12,74 | 12,50 | 12,34 | 11,80 | 11,06 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 5,59 | 5,07 | 4,99 | 4,06 | 4,29 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 0,52 | 0,55 | 0,59 | 0,60 | 0,51 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 1,69 | 1,56 | 1,57 | 1,69 | 1,58 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 1,60 | 1,55 | 1,71 | 1,71 | 1,46 |
| L | Real Estate | 2,86 | 2,83 | 2,95 | 3,03 | 2,71 |
| M,N | Jasa Perusahaan | 0,31 | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,27 |
| O ¹ | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 3,42 | 3,43 | 3,57 | 3,67 | 3,40 |

| No. | Lapangan Usaha | 2017 | 2018 | 2019 _r | 2020* | 2021** |
|--------------------------------|------------------------------------|------|------|-------------------|-------|--------|
| P | Jasa Pendidikan | 1,73 | 1,80 | 2,01 | 2,25 | 2,05 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 2,29 | 2,27 | 2,49 | 2,81 | 2,65 |
| R,S, T,U | Jasa lainnya | 1,13 | 1,11 | 1,17 | 1,26 | 1,09 |
| PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

r Angka revisi

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

PDRB pengeluaran ADHB dari tahun 2017-2021 cenderung meningkat dari 7,5 Triliun rupiah pada tahun 2017 menjadi 23,19 triliun rupiah pada tahun 2021. Kontribusi terbesar pada sektor pengeluaran konsumsi rumah tangga yang meningkat dari 10,02 triliun rupiah pada tahun 2017 menjadi 12,18 triliun rupiah pada tahun 2021. Perkembangan PDRB pengeluaran ADHK Tahun 2010 di Kabupaten Aceh Utara tahun 2017-2020 cenderung meningkat dari 15,54 triliun rupiah pada tahun 2017 menjadi 17,02 triliun rupiah pada tahun 2020, sedangkan pada tahun 2021 turun menjadi 16,92 triliun rupiah.

Tabel 2.39

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Aceh Utara (Milyar Rupiah), Tahun 2017-2021

| No. | Lapangan Usaha | 2017 | 2018 | 2019 _r | 2020* | 2021** |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| A | Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 10.018,04 | 10.546,86 | 11.190,66 | 11.252,34 | 12.175,34 |
| B | Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 342,29 | 379,62 | 418,28 | 429,83 | 434,31 |
| C | Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 2.726,20 | 2.742,12 | 2.848,28 | 2.650,74 | 2.899,02 |
| D | Pembentukan Modal Tetap Bruto | 5.288,98 | 5.759,57 | 6.236,21 | 6.588,65 | 7.244,57 |
| E | Perubahan Inventori | 183,10 | 259,61 | 218,10 | 94,51 | 53,53 |
| F | Net Ekspor Barang dan Jasa | -1.056,26 | -872,39 | -1.236,58 | -1.313,43 | 385,47 |
| PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO | | 17.502,34 | 18.815,38 | 19.674,95 | 19.702,65 | 23.192,24 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

r Angka revisi

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tabel 2.40
 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Jenis
 Pengeluaran di Kabupaten Aceh Utara (Milyar Rupiah),
 Tahun 2017-2021

| No. | Lapangan Usaha | 2017 | 2018 | 2019r | 2020* | 2021** |
|-----|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| A | Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 7.639,32 | 7.907,84 | 8.172,49 | 8.081,07 | 8.025,71 |
| B | Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 240,10 | 258,12 | 283,11 | 280,68 | 281,13 |
| C | Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 2.102,05 | 2.144,59 | 2.221,18 | 2.039,63 | 2.040,61 |
| D | Pembentukan Modal Tetap Bruto | 4.352,80 | 4.550,20 | 4.802,87 | 5.048,65 | 5.049,63 |
| E | Perubahan Inventori | 37,07 | 82,84 | 109,66 | 90,39 | 25,76 |
| F | Net Ekspor Barang dan Jasa | 1.173,61 | 1.342,86 | 1.263,39 | 1.477,04 | 1.501,25 |
| | PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO | 15.544,94 | 16.286,46 | 16.852,70 | 17.017,45 | 16.924,10 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

- r Angka revisi
- * Angka sementara
- ** Angka sangat sementara

2.5.2 Laju Inflasi

Laju Inflasi menunjukkan tingkat perubahan harga-harga yang terjadi di suatu daerah. Laju inflasi Kabupaten Aceh Utara disetarakan dengan Kota Lhokseumawe. Perkembangan inflasi Kabupaten Aceh Utara dan Lhokseumawe selama 5 tahun terakhir mengalami kondisi fluktuatif, dimana pada tahun 2018 realisasi inflasi sebesar 2,05 persen turun menjadi 1,2 persen pada tahun 2019, dan pada 2020 inflasi tersebut cenderung naik kembali menjadi 3,55 persen dan pada tahun 2021 turun menjadi 1,87 persen. Untuk inflasi Aceh juga fluktuatif, dimana pada tahun 2018 sebesar 1,84 persen turun menjadi 1,69 persen pada tahun 2019 meningkat kembali sebesar 3,59 persen dan tahun 2021 turun menjadi 2,24. Sedangkan inflasi secara nasional terus mengalami ke arah yang lebih baik dan menurun selama 5 tahun terakhir dari 3,13 persen tahun 2018 menjadi 1,68 persen tahun 2020 dan kembali meningkat menjadi 1,87 persen pada tahun 2021.

Tabel 2.41
 Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2017-2021

| Uraian | Tahun | | | | |
|----------------------------|-------|------|------|------|------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Lhokseumawe/ Aceh Utara | 2,87 | 2,05 | 1,2 | 3,55 | 1,97 |
| Aceh | 4,25 | 1,84 | 1,69 | 3,59 | 2,24 |
| Nasional | 3,61 | 3,13 | 2,37 | 1,68 | 1,87 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh 2022 dan Bank Indonesia KPW Lhokseumawe

2.5.3 Pendapatan Regional Perkapita

Angka PDRB mencerminkan produktivitas secara umum, tanpa mempertimbangkan pembagiannya ke masing-masing penduduk. Dengan membagi PDRB dengan jumlah penduduk, akan diketahui tingkat produktivitas per kapita (PDRB per kapita). PDRB per kapita sering digunakan sebagai indikator awal untuk mengukur kesejahteraan penduduk sesuatu daerah. Untuk membandingkan kesejahteraan antar daerah yang sering dipakai adalah PDRB per kapita ADHB sedangkan untuk membandingkan antar waktu, PDRB perkapita ADHK lebih tepat. Perkembangan PDRB per kapita ADHK Aceh Utara dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 cenderung meningkat, dari Rp 25,80 juta pada tahun 2017 menjadi Rp.28,29 juta pada tahun 2020, namun pada tahun 2021 turun 1,63 persen menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 II. 34 Rp. 27,83 juta. Untuk perkembangan ADHB pada tahun 2017 mencapai 29,05 Juta terus meningkat sampai dengan tahun 2021 sebesar 38,14 Juta.

Tabel 2.42
 PDRB Per Kapita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2021

| Nilai PDRB (miliar rupiah) | | | | | |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| ADHB | 17.502,34 | 18.815,38 | 19.674,95 | 19.702,65 | 23.192,24 |
| ADHK | 15.544,94 | 16.286,46 | 16.852,70 | 17.017,45 | 16.924,10 |
| PDRB Perkapita (juta rupiah) | | | | | |
| ADHB | 29,05 | 30,77 | 31,96 | 32,76 | 38,14 |
| ADHK | 25,80 | 26,64 | 27,37 | 28,29 | 27,83 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|------|------|------|-------|-------|
| Pertumbuhan PDRB Per Kapita ADHB | 3,25 | 5,94 | 3,85 | 2,50 | 16,43 |
| Pertumbuhan PDRB Per Kapita ADHK 2010 | 0,76 | 3,25 | 2,77 | 3,35 | -1,63 |
| Jumlah Penduduk (ribu orang) | 603 | 611 | 616 | 602 | 608 |
| Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen) | 1,53 | 1,47 | 0,69 | -2,30 | 1,10 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh Tahun 2022

2.6. Capaian Pelaksanaan Kemiskinan

Pencapaian indikator kinerja sasaran mencerminkan capaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara. Visi Kabupaten Aceh Utara 2017-2022 yang ditetapkan di dalam RPJMD Kabupaten Aceh Utara 2017-2022 adalah “Terwujudnya Keberlanjutan Pembangunan Masyarakat Aceh Utara yang Berbudaya, Sejahtera, Mandiri dan Islami (BERSEMI)”. Capaian indikator kemiskinan mulai Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.43
Capaian Pelaksanaan Kemiskinan 2018-2020

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator | Satuan | Target | | | Realisasi | | | Evaluasi Capaian |
|----|--|--|---|-----------------------------|--------|-------|-------|-----------|-------|-------|------------------|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Meningkatkan Layanan Kesehatan yang Bermutu | Meningkatnya mutu layanan kesehatan masyarakat | Angka Harapan Hidup | tahun | 71 | 71.5 | 71.6 | 68.61 | 68,79 | 68.80 | Tidak Tercapai |
| | | Meningkatnya mutu layanan kesehatan ibu | Angka Kematian Ibu | Per 100.000 kelahiran hidup | 123 | 105 | 93 | 111 | 207 | 132 | Tidak Tercapai |
| | | Meningkatnya mutu layanan kesehatan Bayi | Angka Kematian Bayi | Per 1000 kelahiran hidup | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | Tidak Tercapai |
| 1 | Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi | Pertumbuhan Ekonomi | % | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.77 | 3.48 | 0.97 | Tidak Tercapai |
| | | Menurunnya ketimpangan pendapatan | Gini Rasio | indeks | 0.265 | 0.262 | 0.259 | 0.292 | 0.301 | 0.261 | Tercapai |
| 2 | Menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran | Menurunnya tingkat kemiskinan | Persentase tingkat kemiskinan | % | 17.25 | 18.27 | 15.55 | 17.25 | 17.39 | 17.02 | Tidak Tercapai |
| | | Menurunnya tingkat pengangguran terbuka | Persentase tingkat pengangguran terbuka | % | 10 | 8.5 | 8 | 10.14 | 8.65 | 8.56 | Tidak Tercapai |
| 3 | Mengendalikan Inflasi Daerah | Terkendalinya tingkat inflasi daerah | Tingkat inflasi | % | 4 | 3.5 | 3 | 2.05 | 1.22 | 2.87 | Tercapai |

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator | Satuan | Target | | | Realisasi | | | Evaluasi Capaian |
|----|--|--|--|--------|--------|------|------|-----------|-------|-------|------------------|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 4 | Menumbuhkembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan | Meningkatnya produksi hasil pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan perikanan | Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan | % | 5 | 5.25 | 5.4 | 33.92 | 34.11 | 36.38 | Tercapai |

BAB III PROFIL KEMISKINAN DAERAH

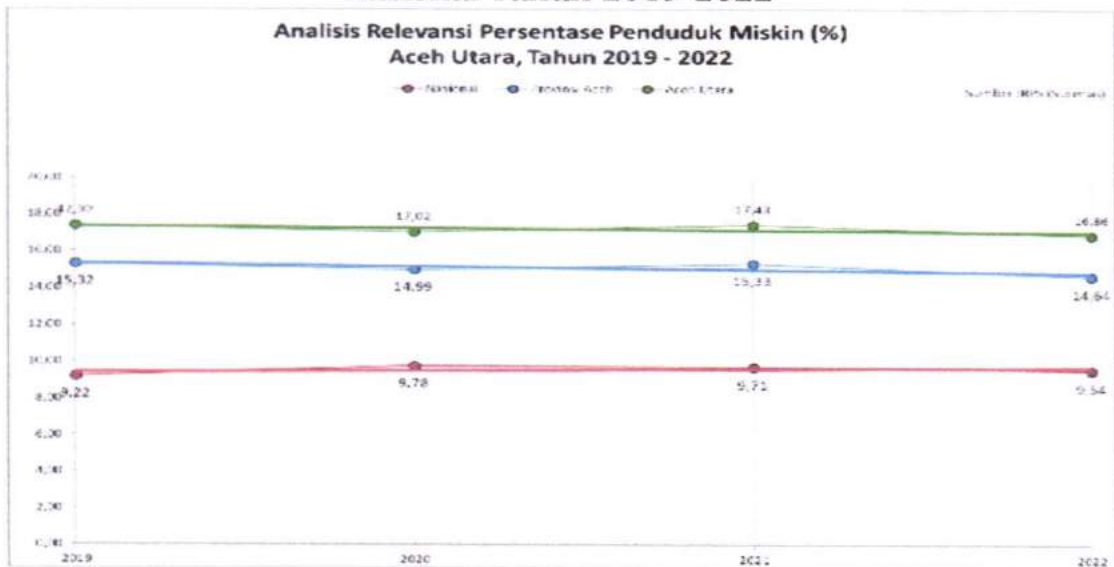
3.1. Indikator Kemiskinan Ekonomi/Konsumsi

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi Ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran yang dikonseptualisasikan dengan garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan representasi dari jumlah Rupiah Minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilo kalori perkapita perhari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

3.1.1 Persentase Penduduk Miskin

Kemiskinan merupakan persoalan makro yang harus diatasi secara berkelanjutan. Kemiskinan juga dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran, jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

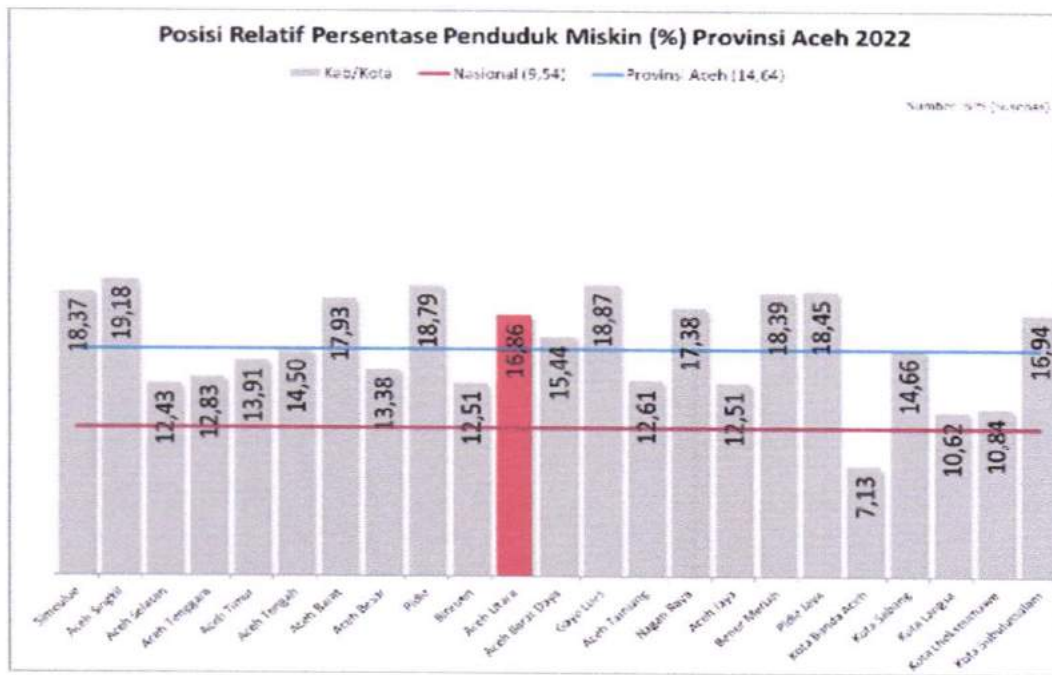
Grafik 3.1
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Aceh Utara, Aceh dan Nasional Tahun 2019-2022



Sumber : P3KE, Kemenko PMK Tahun 2022

Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara daritahun 2019-2022 cenderung menurun dari 17,39 persen pada tahun 2019 turun menjadi 16,86 pada tahun 2022, namun pada tahun 2021 meningkat menjadi 17,43 persen. Persentase kemiskinan Aceh Utara masih berada di atas Aceh dan Nasional sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.1 di atas.

Grafik 3.2
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Dalam Provinsi Aceh
Tahun 2019-2022



Sumber : P3KE, Kemenko PMK Tahun 2022

Proporsi penduduk miskin Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2022 adalah 16,86 persen. Ini menempatkan Kabupaten Aceh Utara dengan persentase penduduk miskin pada urutan ke sepuluh bila dibandingkan dengan kabupaten/kota dalam provinsi Aceh. Sehingga kondisi saat ini dapat dijadikan basis untuk meneruskan penurunan kemiskinan pada tahun-tahun mendatang, dengan catatan bahwa Kabupaten Aceh Utara dapat mempertahankan kecepatan penurunan persentase penduduk miskin dalam beberapa waktu terakhir.

3.1.2. Jumlah Penduduk Miskin

Kabupaten Aceh Utara terdiri dari 27 kecamatan, 852 gampong dengan jumlah penduduk sebanyak 608.106 jiwa pada tahun 2021. Dari jumlah penduduk tersebut terdapat tingkat kemiskinan sebesar 16,86 persen. Bila dilihat dari persentase tersebut jumlah penduduk miskin di Kabupaten Aceh Utara sebanyak 107.020 jiwa yang tersebar pada 852 gampong. Sejalan dengan penurunan tingkat kemiskinan, perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Aceh Utara juga mengalami penurunan. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2022 adalah 107.020 jiwa, menurun dibandingkan tahun 2021 (109.490 jiwa). Perkembangan jumlah penduduk kemiskinan dapat di lihat pada grafik di bawah.

Grafik 3.3
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Aceh Utara dan Aceh
Tahun 2019-2022



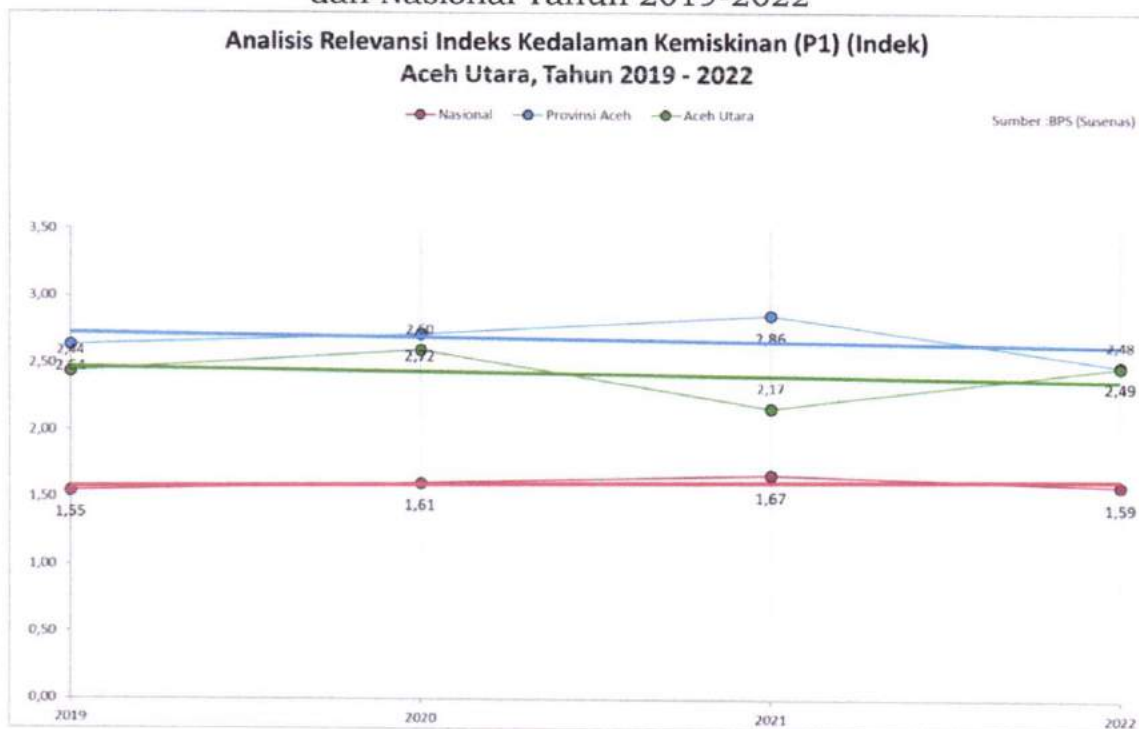
Sumber: BPS (Susenas) 2002

3.1.3 Indeks Kedalamam Kemiskinan (P1)

Untuk memahami kondisi kemiskinan yang lebih komprehensif, perlu diketahui indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan. Adapun indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata

kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, sedangkan indeks keparahan kemiskinan menggambarkan penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Perkembangan Indeks Kedalaman (*Poverty Gap Index-P1*) dan Kearifan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) Kabupaten Aceh Utara, Aceh dan Nasional periode tahun 2019-2021 dapat dilihat pada Tabel 3.4. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Kearifan Kemiskinan Kabupaten Aceh Utara cenderung menurun pada tahun 2021 menjadi 2,17 lebih rendah dari Aceh dan lebih tinggi dari nasional. Sedangkan tahun 2022 indeks kedalaman kemiskinan(P1) lebih tinggi mencapai 2,49 meningkat dibandingkan tahun 2021 (2,17).

Grafik 3.4
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Kabupaten Aceh Utara, Aceh dan Nasional Tahun 2019-2022



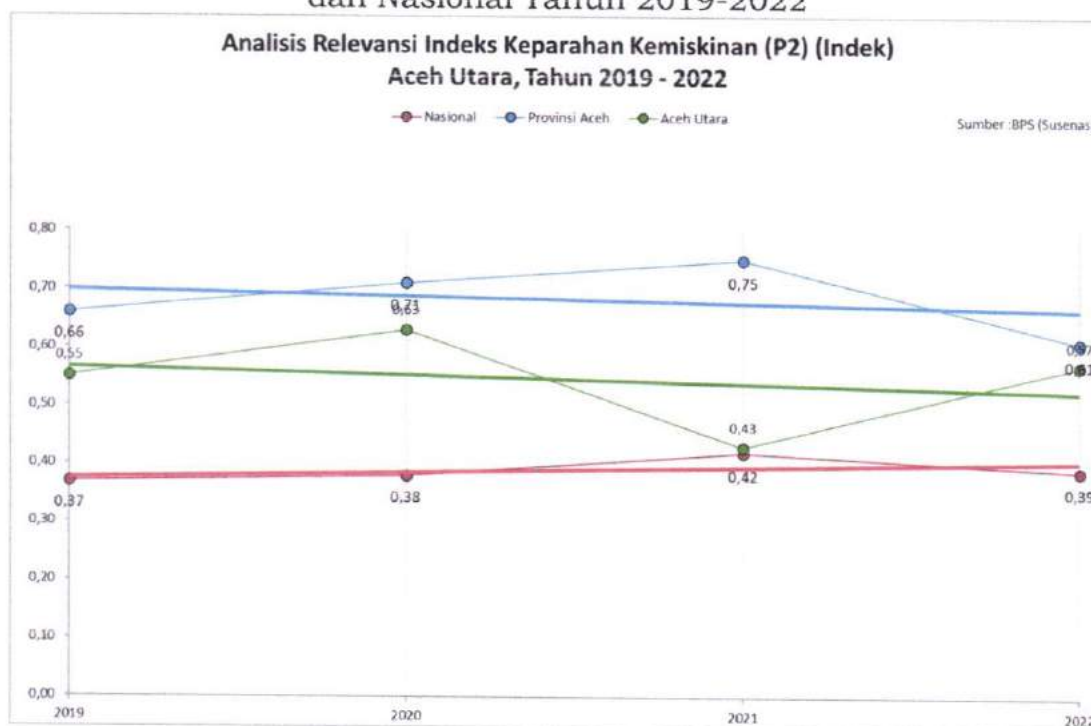
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

3.1.4. Indeks Kearifan Kemiskinan (P2)

Indeks Kearifan Kemiskinan merupakan Indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran

di antara penduduk miskin. Dalam kurun waktu empat tahun terakhir (2019-2022) indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Aceh Utara sangat fluktuatif. Hal ini dapat dilihat pada nilai indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Aceh Utara tahun 2019 yang berada pada angka 0,55 dan naik menjadi 0,63 tahun 2020. Namun demikian angka tersebut mengalami penurunan pada tahun 2021 mencapai angka 0,43 dan Kembali naik menjadi 0,61 tahun 2022. Perkembangan indeks Keparaharan Kemiskinan (P2) Kabupaten Aceh Utara tahun 2019-2022 dapat dilihat seperti tabel 3.5 dibawah ini.

Grafik 3.5
Indeks Keparaharan Kemiskinan (P2), Kabupaten Aceh Utara, Aceh dan Nasional Tahun 2019-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

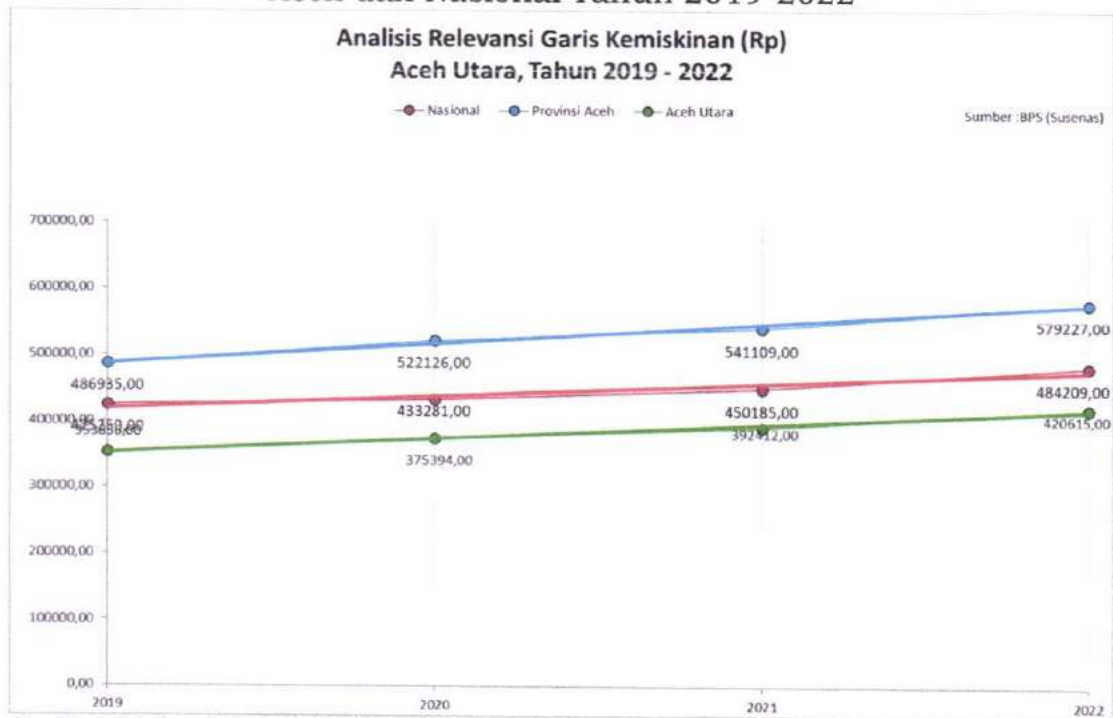
3.1.5. Garis Kemiskinan (GK)

Berdasarkan perhitungan oleh BPS metode yang digunakan dalam perhitungan kemiskinan ini didasarkan atas Garis Kemiskinan, yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

Perkembangan garis kemiskinan Kabupaten Aceh Utara dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 selalu mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2019 sebesar Rp 353.856,-/kapita/bulan dan terus

meningkat hingga mencapai Rp 420.615,-/kapita/bulan pada tahun 2022. Kondisi garis kemiskinan Kabupaten Aceh Utara ini relevan dengan provinsi Aceh dan Nasional yang juga meningkat. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik 3.6 berikut ini:

Grafik 3.6
Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Aceh Utara,
Aceh dan Nasional Tahun 2019-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh Tahun 2022

3.2. Analisa Kemiskinan Multidimensi

3.2.1. Bidang Pendidikan

a. Rasio Ketersediaan Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah merupakan indikator untuk mengukur kemampuan jumlah sekolah dalam menampung penduduk usia sekolah. Rasio ini adalah perbandingan jumlah sekolah berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan, yang dapat menunjukkan kemampuan untuk menampung penduduk usia pendidikan.

Tabel 3.1
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2021

| Jenjang Pendidikan | Tahun | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| SD/MI | | | | | |
| Jumlah Gedung Sekolah | 409 | 409 | 412 | 366 | 366 |
| Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Thn | 74.813 | 75,566 | 76.297 | 77,034 | 77,779 |
| Rasio/10.000 | 54,67 | 54,12 | 54,00 | 47,51 | 47,06 |
| SMP/MTs | | | | | |
| Jumlah Gedung Sekolah | 179 | 179 | 188 | 141 | 145 |
| Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Thn | 36.771 | 37,127 | 37.485 | 37.848 | 38,213 |
| Rasio/10.000 | 34,53 | 48,21 | 50,15 | 37,25 | 37,94 |

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

Rasio ketersediaan fasilitas pendidikan untuk menampung jumlah penduduk usia sekolah tertentu menunjukkan tingkat penyebaran layanan pendidikan juga meningkat. Hal ini terlihat dari pertumbuhan gedung sekolah untuk menjangkau akses layanan pendidikan di daerah-daerah yang terpencil dan terjauh.

b. Rasio Guru terhadap Murid

Rasio guru terhadap murid merupakan indikator untuk mengukur efektifitas dan efisiensi selama proses pembelajaran. Rasio ini adalah perbandingan jumlah guru dan murid berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 murid.

Tabel 3.2
Rasio Murid dan Guru Jenjang Pendidikan Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2017-2021

| No | Jenjang Pendidikan | Tahun | | | | |
|-----------|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| I | SD/MI | | | | | |
| | 1. Jumlah Guru | 7.035 | 5.632 | 5.482 | 5,270 | 5.590 |
| | 2. Jumlah Murid | 71.983 | 59.912 | 60.012 | 60,482 | 59.468 |
| | 3. Rasio Guru/Murid | 0,0977 | 0,094 | 0,0913 | 0,0871 | 0,0940 |
| | 4. Rasio Guru/murid per 10.000 | 977 | 940 | 913 | 871 | 940 |
| | 5. Rasio | 1 : 10 | 1 : 11 | 1 : 11 | 1 : 11 | 1 : 11 |
| II | SMP/MTS | | | | | |
| | 1. Jumlah Guru | 3.968 | 2.953 | 2.923 | 2,761 | 2.943 |
| | 2. Jumlah Murid | 33.928 | 25.184 | 24.307 | 24,973 | 24.970 |

| No | Jenjang Pendidikan | Tahun | | | | |
|----|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 3. Rasio Guru/Murid | 0,1169 | 0,1172 | 0,1202 | 0,1105 | 0,1178 |
| | 4. Rasio guru/murid per 10.000 | 116,9 | 117,2 | 120 | 110,5 | 117,8 |
| | 5. Rasio | 1 : 9 | 1 : 9 | 1 : 8 | 1 : 9 | 1 : 8 |

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

Rasio guru terhadap murid pada jenjang pendidikan SD/MI pada tahun 2021 adalah 940 artinya ada 940 guru yang melayani 10.000 murid atau 1 : 11. Sedangkan rasio guru terhadap murid jenjang Pendidikan SMP/MTs adalah 1 : 9. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa rasio guru terhadap murid di Kabupaten Aceh Utara berada di atas standar yaitu 1 : 20.

c. Rasio Guru/Murid Perkelas Rata-rata

Dalam rangka meningkatkan layanan pendidikan yang bermutu harus dijamin ketersediaan ruang kelas yang layak untuk masing-masing jenjang pendidikan. Rasio guru/murid per kelas rata-rata adalah perbandingan antara jumlah guru per kelas dengan jumlah murid dalam satuan pendidikan tertentu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3
Rasio Guru dan Murid Perkelas Rata-rata
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2021

| No | Jenjang Pendidikan | Tahun | | | | |
|-----------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| I | SD/MI | | | | | |
| | 1. Jumlah Guru | 7.035 | 5.632 | 5.482 | 5,270 | 5.590 |
| | 2. Jumlah Murid | 71.983 | 59.912 | 60.012 | 60,482 | 59.468 |
| | 3. Jumlah Ruang Kelas | 3.045 | 2.759 | 2.796 | 2.975 | 3.133 |
| | 4. Rasio guru per kelas | 2,31 | 2,04 | 1,96 | 1,77 | 1.78 |
| | 5. Rasio Murid per kelas | 23,64 | 21,72 | 21,46 | 20,33 | 18,98 |
| II | SMP/MTs | | | | | |
| | 1. Jumlah Guru | 3.986 | 2.953 | 2.923 | 2,761 | 2.943 |
| | 2. Jumlah Murid | 33.928 | 25.184 | 24.307 | 24,973 | 24.970 |
| | 3. Jumlah Ruang Kelas | 1.209 | 1.011 | 1.027 | 1,179 | 1.232 |

| No | Jenjang Pendidikan | Tahun | | | | |
|----|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 4. Rasio Guru per Kelas | 3,28 | 2,92 | 2,85 | 2,34 | 2,39 |
| | 5. Rasio Murid per Kelas | 28,06 | 24,90 | 23,67 | 21,18 | 20,27 |

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

Dari Tabel 3.9 dapat dilihat di tahun 2021 rasio guru per kelas rata-rata pada jenjang Pendidikan SD/MI adalah 1 : 1,78 : 18,98 dan pada jenjang Pendidikan SMP/MTs adalah 1 : 2,39 : 20,27 yang dapat diinterpretasikan bahwa satu kelas ditempati oleh sekitar 20 murid.

3.2.2. Bidang Kesehatan

a. Rasio Puskesmas, Pustu per Satuan Penduduk

Dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat dilakukan melalui salah satu sarana penunjang kesehatan yaitu Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu). Semakin banyak jumlah ketersediannya, maka semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan. Jumlah dan rasio prasarana kesehatan Kabupaten Aceh Utara tahun 2017–2021 dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut :

Tabel 3.4
Jumlah dan Rasio Prasarana Kesehatan
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2021

| Jumlah Prasarana dan Penduduk | Tahun | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Jumlah Puskesmas | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Jumlah Poliklinik | - | - | - | - | - |
| Jumlah Pustu | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Jumlah Prasarana Kesehatan | 117 | 117 | 118 | 224 | 224 |
| Jumlah Penduduk | 593.492 | 602.554 | 615.378 | 602.793 | 629.735 |
| Rasio Prasarana Kesehatan Per Satuan Penduduk | 0,19714 | 0,19417 | 0,19175 | 0,35710 | 0.35570 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk idealnya adalah 1:30.000 Berdasarkan data pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2020, 1 (satu) puskesmas melayani 35.710 penduduk sedangkan pada tahun 2021 satu puskesmas melayani 35.570

penduduk, dapat disimpulkan bahwa rasio puskesmas persatuan penduduk di Kabupaten Aceh Utara masih kurang. Selain jumlah fasilitas Kesehatan (Puskesmas, Pustu dan Poliklinik) yang memadai untuk melayani seluruh masyarakat, juga perlu diperhatikan kelengkapan sarana dan prasarana yang harus disediakan. Angka rata-rata kelengkapan sarana dan prasarana puskesmas di Kabupaten Aceh Utara adalah 63,42 persen. Kelengkapan sarana dan prasarana untuk masing-masing puskesmas dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut:

Tabel 3.5
Kelengkapan Alat Kesehatan di Puskesmas
Kabupaten Aceh Utara

| No | Puskesmas | Kelengkapan | | | Kumulasi (50S + 10P +40A) |
|----|------------------|-------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| | | Sarana | Prasarana | Alat Kesehatan | |
| 1 | Sawang | 77,5 | 65,45 | 26,81 | 56,02 |
| 2 | Nisam | 100 | 38,89 | 30,42 | 66,06 |
| 3 | Banda Baro | 100 | 25,45 | 11,4 | 57,11 |
| 4 | Kuta Makmur | 100 | 54,55 | 35,37 | 69,60 |
| 5 | Simpang Keuramat | 89,74 | 30,91 | 39,25 | 63,66 |
| 6 | Syamtalira Bayu | 95 | 40 | 11 | 55,90 |
| 7 | Nisam Antara | 61,54 | 33,96 | 73,62 | 63,61 |
| 8 | Geureudong Pase | 92,31 | 43,64 | 25,84 | 60,86 |
| 9 | Meurah Mulia | 97,5 | 36,36 | 29,23 | 64,08 |
| 10 | Matangkuli | 100 | 45,45 | 29,77 | 66,45 |
| 11 | Paya Bakong | 74,36 | 47,27 | 39,69 | 57,78 |
| 12 | Pirak Timu | 100 | 25,45 | 23,19 | 61,82 |
| 13 | Cot Girek | 100 | 24,53 | 11,23 | 56,95 |
| 14 | Tanah Jambo Aye | 100 | 47,27 | 38,73 | 70,22 |
| 15 | Lhok Beuringen | 84,62 | 30,91 | 29,95 | 57,38 |
| 16 | Langkahan | 76,92 | 57,41 | 21,43 | 52,77 |
| 17 | Simpang Tiga | 100 | 31,48 | 54,36 | 74,89 |
| 18 | Seunuddon | 100 | 86,79 | 46,5 | 77,28 |
| 19 | Blang Geulumpang | 80,95 | 50,94 | 40,51 | 61,77 |
| 20 | Baktiya | 76,74 | 35,85 | 12,72 | 47,04 |
| 21 | Sampoinit | 56,41 | 29,09 | 38,29 | 46,43 |
| 22 | Lhoksukon | 87,5 | 47,27 | 67,59 | 75,51 |
| 23 | Buket Hagu | 66,67 | 38,18 | 47,74 | 56,25 |
| 24 | Tanah Luas | 100 | 37,04 | 83,13 | 86,96 |
| 25 | Nibong | 69,05 | 35,85 | 10,77 | 42,42 |
| 26 | Samudera | 100 | 43,64 | 30 | 66,36 |
| 27 | Syamtalira Aron | 92,31 | 30,91 | 53,17 | 70,51 |
| 28 | Tanah Pasir | 87,5 | 36,36 | 27,31 | 58,31 |
| 29 | Lapang | 94,87 | 27,27 | 12,76 | 55,27 |

| No | Puskesmas | Kelengkapan | | | Kumulasi (50S + 10P +40A) |
|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| | | Sarana | Prasarana | Alat Kesehatan | |
| 30 | Muara Batu | 100 | 58,18 | 73,76 | 85,32 |
| 31 | Dewantara | 100 | 49,09 | 65,05 | 80,93 |
| 32 | Babah Buloh | 100 | 62,26 | 19,43 | 64,00 |
| Rata-rata | | 89,42 | 42,12 | 36,25 | 63,42 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

b. Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Dimensi kualitas pelayanan kesehatan masyarakat sangat ditentukan oleh jumlah tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan yang ada terdiri dari berbagai spesialisasi diantaranya dokter. Dokter merupakan tenaga kesehatan yang sangat menentukan dalam menjaga kualitas pelayanan kesehatan. Jumlah dokter pada Puskesmas-puskesmas dan rasionya terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Aceh Utara selama tahun 2017-2021, dapat dilihat pada Tabel 3.6 berikut:

Tabel 3.6
Rasio Jumlah Dokter terhadap Jumlah Penduduk
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2021

| Jumlah Dokter dan Penduduk | Tahun | | | | |
|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Jumlah Dokter | 53 | 54 | 94 | 96 | 93 |
| Jumlah Penduduk | 602.554 | 615.378 | 619.407 | 602.793 | 629.735 |
| Rasio Dokter/ Satuan Penduduk | 0,088 | 0,087 | 0,015 | 0,016 | 0,016 |
| Rasio (WHO) | 1:2500 | 1:2500 | 1:2500 | 1:2500 | 1:2500 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah dokter selama periode 2017-2021 mengalami fluktuasi, hal ini disebabkan adanya dokter yang menduduki jabatan struktural dan dokter yang pindah ke daerah lain, pada tahun 2021 jumlah dokter mengalami penurunan kembali dari sebelumnya yaitu 93 orang dengan demikian secara umum Kabupaten Aceh Utara masih kekurangan dokter.

Rasio dokter per satuan penduduk menurut WHO adalah 40/100.000 penduduk, artinya 1 dokter melayani 2.500 penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa dari tahun 2017 sampai tahun 2021

Kabupaten Aceh Utara kekurangan jumlah tenaga dokter, oleh karena jumlah penduduk yang dilayani melebihi dari target ideal yang ditetapkan WHO.

c. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Komplikasi kebidanan idealnya terjadi pada 20 persen dari total sasaran ibu hamil, sehingga semakin banyak sasaran ibu hamil maka semakin tinggi pula komplikasi kebidanan. Selain itu dari total estimasi ibu yang beresiko komplikasi yang telah dilaporkan tersebut tidak semuanya kasus berakhir dengan komplikasi kebidanan. Target penanganan definitif komplikasi kebidanan adalah 80 persen dari total komplikasi yang ditangani di Kabupaten Aceh Utara dan dapat dilihat pada Tabel 3.7 berikut:

Tabel 3.7
Jumlah Cakupan Komplikasi Kebidanan dan Penanganan Definitif terhadap Cakupan Komplikasi Kebidanan Tahun 2017-2021

| Uraian | Tahun | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Komplikasi Kebidanan | 2.919 | 2.768 | 2.827 | 2,650 | 2.822 |
| Penanganan Definitif Komplikasi Kebidanan | 2.518 | 2.110 | 2.261 | 2,588 | 2.822 |
| Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani (%) | 86,25 | 76,00 | 79,97 | 90,00 | 100 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

Dari data tersebut penanganan Komplikasi kebidanan mengalami peningkatan pada tahun 2020 dari 90 persen pada tahun 2021 naik menjadi 100 persen, hal ini disebabkan karena ada beberapa komplikasi kebidanan yang ditangani di Rumah Sakit ataupun di Klinik Swasta.

d. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Berdasarkan target SDG's yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesehatan ibu adalah menurunkan angka kematian ibu, dan salah satu periode yang berkontribusi besar terhadap angka

kematian ibu adalah periode persalinan. Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan adalah pelayanan persalinan yang aman yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan kompetensi kebidanan. Target persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan saat ini adalah 90% dari total sasaran ibu hamil. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan selama tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 3.8 berikut:

Tabel 3.8
Jumlah Sasaran Ibu Bersalin dan Ibu Bersalin yang Ditolong
Tenaga Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2021

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|----|---|---------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Jumlah Ibu Bersalin yang ditolong oleh Tenaga Kesehatan | 12.339 | 11.680 | 11.945 | 12,270 | 12.230 |
| 2. | Jumlah Seluruh Sasaran Ibu Bersalin | 14.597 | 13.838 | 14.134 | 13,656 | 13.656 |
| 3. | Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan | 84,53 % | 84,40% | 84,51% | 89,85% | 89,56% |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

Upaya peningkatan cakupan persalinan perlu dilakukan melalui upaya pelaksanaan program unggulan kesehatan ibu, diantaranya adalah kemitraan bidan dan dukun, peningkatan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan melalui Jampersal (JaminanPersalinan) serta Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS KIA). Persalinan yang dilakukan di sarana pelayanan kesehatan dapat menurunkan angka kematian ibu saat persalinan karena di tempat tersebut persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan dan tersedia sarana kesehatan yang memadai sehingga dapat menangani komplikasi yang mungkin terjadi pada saat persalinan yang membahayakan nyawa ibu dan bayi.

Berdasarkan data diatas ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan mengalami peningkatan yang dapat diartikan semakin

meningkatnya kesadaran masyarakat, tetapi pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan yaitu 12.230 atau sekitar 89%, penyebabnya sasaran ibu hamil pada trimester III akan melakukan persalinan pada tahun yang akan datang yaitu tahun 2022.

e. Cakupan Desa *Universal Child Immunization*

Pemerintah menargetkan program imunisasi dasar lengkap terhadap bayi yang menjadi sasaran harus mendapat imunisasi seluruhnya, sehingga target nasional *Universal Child Immunization* (UCI) sebesar 100 persen dapat tercapai. Dalam rangka mencapai hal tersebut Pemerintah Kabupaten Aceh Utara berupaya melaksanakan imunisasi dasar lengkap bayi secara merata pada bayi di 852 desa. Cakupan desa UCI di Kabupaten Aceh Utara selama tahun 2017–2021 dapat dilihat pada Tabel 3.9 berikut :

Tabel 3.9
Cakupan Desa UCI Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2017–2021

| Uraian | Tahun | | | | |
|------------------|-------|------|------|------|------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Cakupan Desa UCI | 70,2 | 45,8 | 46,1 | 35,3 | 38,1 |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa cakupan imunisasi di Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2017-2021 cenderung menurun dan pada tahun 2021 cakupan desa UCI masih rendah sebesar 38,1 persen. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor antara lain faktor internal seperti hubungan dengan lintas sektor terkait dan pelibatan tokoh masyarakat dalam program imunisasi belum maksimal dilakukan. Sedangkan faktor eksternalnya antara lain adanya isu vaksin haram juga masih menjadi faktor penyebab masyarakat tidak mau membawa bayi mereka untuk imunisasi, penolakan masyarakat terhadap vaksin suntikan khususnya oleh orang tua bayi, adanya efek Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) seperti terjadinya efek demam dan bengkak pada bagian yang diimunisasi.

f. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Pada dasarnya gizi balita dipengaruhi langsung oleh tingkat asupan dan kondisi kesehatan. Asupan balita berkaitan dengan pola asuh dan ketersediaan pangan dalam keluarga. Sedangkan status kesehatan balita dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan akses pelayanan kesehatan. Rendahnya pemberian Air Susu Ibu (ASI) pada bayi sejak lahir sampai berumur 6 (enam) bulan atau ASI Eksklusif merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya gizi buruk, disamping faktor budaya dan kurangnya pengetahuan dan pemahaman ibu tentang tahapan pemberian makanan pada bayi. Pemberian makan yang tidak sesuai dengan umur bayi, seperti pemberian pisang terlaludini yang berpotensi terhadap gagalnya pemberian ASI eksklusif yang seharusnya diberikan sejak lahir sampai dengan usia 6 bulan tanpa adanya pemberian makanan tambahan lain. Jumlah penderita gizi buruk di Kabupaten Aceh Utara selama tahun 2017–2021 bergerak fluktuatif seperti terdapat pada Tabel 3.10 dibawah ini:

Tabel 3.10
Cakupan Balita Gizi Buruk
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2021

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|----|--|-------|------|------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan | 18 | 492 | 362 | 955 | 741 |
| 2. | Cakupan Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

Berdasarkan data pada tabel diatas balita gizi buruk tahun 2020 terdapat 955 kasus, pada Tahun 2021 sudah mulai mengalami penurunan 741 kasus tahun 2021 dan semuanya mendapat perawatan atau cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan adalah 100 persen. Sedangkan prevalensi balita stunting di Kabupaten Aceh Utara berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11
Prevalensi Balita Stunting
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2021

| Uraian | Tahun | | | | |
|-------------------------------------|-------|------|-------|------|------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Prevalensi Balita Stunting (Persen) | N/A | 32,5 | 42,64 | N/A | 38,8 |

Sumber : Riskesdas (2018) dan SSGI (2021)

g. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC/BTA

Jumlah penderita TBC di Kabupaten Aceh Utara cukup tinggi, dimana pada tahun 2020 sebanyak 2956 kasus dan pada tahun 2021 turun menjadi 2151 kasus. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC/BTA dalam kurun waktu 5 tahun ini bisa dilihat pada Tabel 3.12 berikut ini:

Tabel 3.12
Perkiraan Penderita TBC dan Penderita yang Diobati
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2021

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|----|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Perkiraan Penderita TBC | 1807 | 2718 | 2177 | 2956 | 2151 |
| 2. | Penderita TBC Diobati | 1259 | 1247 | 813 | 857 | 672 |
| 3. | Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC/BTA | 69,67 | 45,88 | 37,34 | 28,99 | 31,24 |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

h. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Penderita DBD pada tahun 2019 merupakan kasus yang tertinggi selama periode 2017-2021. Angka cakupan penanganan mencapai 100 persen setiap tahunnya, terlihat sebagaimana Tabel 3.19. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD pada Tahun 2021 sebanyak 25 kasus yang terjadi diakhir tahun 2021 disebabkan tingginya curah hujan sehingga jentik-jentik nyamuk mulai bersarang disekitaran rumah yang terdapat banyak wadah genangan air.

Tabel 3.13
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2021

| Uraian | Tahun | | | | |
|--|-------|------|------|------|------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP | 60 | 43 | 61 | 19 | 25 |
| Jumlah penderita DBD yang ditemukan | 60 | 43 | 61 | 19 | 25 |
| Cakupan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

Setiap kasus DBD perlu dilakukan Penyelidikan Epidemiologi (PE), *Larvasiding* (pembunuhan larva nyamuk), dan Pengasapan (fogging). Semua kasus yang terjadi ditangani dengan baik. Masih dijumpainya kasus yang terjadi, diakibatkan oleh masihrendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap gerakan PSN DBD (pemberantasan sarang nyamuk DBD) yaitu dengan kegiatan 3M (Menguras, Menutup dan Mengubur).

Untuk keberhasilan program penanggulangan DBD perlu ditingkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap DBD (khususnya 3M). Selain itu ketercukupan ketersediaan anggaran khususnya untuk kegiatan sosialisasi dan fogging sangat mendukung keberhasilan kegiatan penanggulangan DBD.

h. Penemuan Kasus HIV/AIDS

Tingkat prevalensi HIV/AIDS cenderung meningkat di Kabupaten Aceh Utara, terutama pada kelompok risiko tinggi. Penyebab terbanyak tertular adalah pengguna narkoba suntik yang proses penggunaannya dilakukan diluar Aceh dan penyebab kedua terbanyak adalah seks bebas. Pendekatan untuk mengendalikan penyebaran penyakit ini diarahkan pada pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular. Selain itu, pengendalian penyakit harus melibatkan semua pemangku kepentingan dan memperkuat kegiatan promosi kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Sampai saat ini pihak Dinas Kesehatan bersama dengan Komisi Penanggulangan AIDS dan tim VCT

(*Voluntery Conseling Testing*) terus mencari dan melakukan penjangkauan kasus HIV/AIDS. Pada tahun 2019 cakupan HIV makin meluas dimana setiap orang beresiko HIV seperti ibu hamil, pasien TBC, pengguna narkoba suntik, IMS, Waria/transgender, LSL, pengguna Napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar atau ada 8 populasi kunci yang harus diperiksa/scrining HIV.

Tabel 3.14
Jumlah Penderita HIV/AIDS Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2017-2021

| Uraian | Tahun | | | | |
|-----------------------|-------|------|------|------|------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Jumlah Penderita HIV | 6 | 2 | 5 | 12 | 10 |
| Jumlah Penderita AIDS | 10 | 16 | 6 | 1 | 3 |
| Kematian Akibat AIDS | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

Berdasarkan data pada Tabel 3.14 pada tahun 2021 Jumlah kasus HIV mengalami penurunan yaitu dari tahun 2020 dari 12 orang menjadi 10 orang. Masyarakat mulai sadar makin cepat penderita-penderita HIV terdeteksi akan semakin cepat proses pemulihannya.

i. Cakupan Kunjungan Bayi

Dengan adanya pandemi Covid-19 selama kurun waktu 2 tahun ini berdampak pula terhadap jumlah kunjungan bayi yang mendapat pelayanan kesehatan dasar sesuai standar, dari data diatas cakupannya mencapai 95 persen, walaupun terjadi penurunan dari Tahun 2019 ke tahun 2020 namun ditahun 2021 terjadi peningkatan jumlah kunjungan. Data 2021 menunjukkan peningkatan melebihi 100 persen oleh karena jumlah kunjungan tersebut tidak hanya berasal dari wilayah Aceh Utara tetapi juga bersal dari wilayah Aceh Timur, Bireuen, Aceh Tengah dan daerah lainnya.

Tabel 3.15
Cakupan Kunjungan Bayi Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2017-2021

| Uraian | Tahun | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar | 12.046 | 10.688 | 12.434 | 11.304 | 13.130 |
| Jumlah seluruh bayi lahir hidup | 13.270 | 11.220 | 12.076 | 12.290 | 12.276 |
| Cakupan | 90,8 | 95,23 | 98,40 | 91,97 | 106 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

j. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada dasarnya merupakan sebuah upaya untuk menularkan pengalaman mengenai perilaku hidup sehat melalui individu, kelompok ataupun masyarakat luas dengan jalur-jalur komunikasi sebagai media berbagi informasi. Ada berbagai informasi yang dapat dibagikan seperti materi edukasi guna menambah pengetahuan serta meningkatkan sikap dan perilaku terkait cara hidup yang bersih dan sehat.

Edukasi melalui pendekatan pemuka atau pimpinan masyarakat, pembinaan suasana dan juga pemberdayaan masyarakat dengan tujuan kemampuan mengenal dan tahu masalah kesehatan yang ada di sekitar, perlu terus menerus digalakkan terutama pada tingkatan rumah tangga sebagai awal untuk memperbaiki pola dan gaya hidup agar lebih sehat. Selama lima tahun terakhir persentase rumah tangga yang menerapkan PHBS cenderung meningkat namun masih rendah yaitu sekitar 12,8 persen. Perkembangan jumlah dan persentase rumah tangga yang menerapkan PHBS tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 3.16 berikut :

Tabel 3.16
 Persentase Rumah Tangga yang Menerapkan Perilaku Hidup Bersih
 dan Sehat (PHBS) di Kabupaten Aceh Utara
 Tahun 2017-2021

| Uraian | Tahun | | | | |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Jumlah RT yang menerapkan PHBS | 20.855 | 21.340 | 21.950 | 22.112 | 22.202 |
| Jumlah Rumah Tangga | 171.112 | 171.250 | 171.919 | 172.450 | 172.480 |
| Persentase | 12,1% | 12,4% | 12,7% | 12,8% | 12,8% |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

3.2.3. Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni. Berdasarkan kriteria tersebut, Rumah layak huni di Kabupaten Aceh Utara mengalami peningkatan dari tahun 2017-2021.

a. Rumah Layak Huni

Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuninya. Penyediaan rumah layak huni juga merupakan layanan dasar publik yang menjadi tanggungjawab pemerintah untuk memenuhi dan melindungi masyarakatnya terutama masyarakat berpenghasilan rendah/miskin. Persentase tahun ke tahun semakin meningkat dibandingkan persentase rumah layak huni tahun sebelumnya. Perkembangan persentase rumah layak huni dilihat pada Tabel 3.17 berikut:

Tabel 3.17
 Persentase Rumah Layak Huni Tahun 2017-2021

| Prasarana | Tahun | | | | |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Rumah Layak Huni | 119.497 | 121.399 | 123.152 | 124.497 | 124.610 |
| Jumlah Rumah Tinggal | 139.846 | 140.035 | 142.687 | 142.821 | 142.846 |
| Persentase | 85,45 | 86,69 | 86,37 | 87,17 | 87,23 |

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Aceh Utara 2022

Data tersebut menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2017-2021, jumlah rumah layak huni di Kabupaten Aceh Utara mengalami peningkatan sebanyak 5.113 unit dengan rata-rata peningkatan pertahun sebanyak 1.022 unit. Meningkatnya jumlah rumah layak huni di kabupaten Aceh Utara juga mendorong peningkatan persentase Rumah layak huni dari tahun 2017-2021. Upaya pembangunan rumah layak huni terus dikembangkan dengan pemanfaatan dari berbagai sumber pendanaan seperti pemanfaatan dana DOKA, TDBH Migas, ZIS serta dana desa.

b. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Peningkatan pelayanan dasar bidang air bersih terus diupayakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui berbagai kolaborasi program dan pendanaan. Air bersih adalah salah satu jenis sumberdaya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari termasuk diantaranya adalah sanitasi.

Kebutuhan air untuk suatu daerah ditentukan oleh 2 (dua) parameter yaitu jumlah penduduk dan tingkat konsumsi air. Sumber air yang dapat digunakan sebagai air baku meliputi air sungai, air hujan, air tanah, air permukaan dari air mata air. Kualitas umum air dapat diukur dengan parameter seperti bau, rasa, tingkat kekeruhan dan warna. Perkembangan pengguna air bersih ini terus meningkat dari tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat sebagaimana Tabel 3.18 berikut:

Tabel 3.18
Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Tahun 2017-2021

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|----|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih | 88.920 | 93.845 | 99.743 | 103.217 | 104.820 |
| 2 | Jumlah Seluruh Rumah Tinggal | 139.846 | 140.035 | 142.587 | 142.821 | 142.846 |
| | Persentase | 63.58 | 67.02 | 69,95 | 72,27 | 73,38 |

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Aceh Utara 2022

Data diatas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2017-2021, Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak mengalami peningkatan sebesar 9,80 persen dengan rata-rata peningkatan pertahun sebesar 1,96 persen.

c. Rumah Tangga Bersanitasi

Peningkatan pelayanan dasar sanitasi merupakan kewajiban pemerintah dalam menjamin tersedianya akses sanitasi layak bagi lingkungan masyarakat. Pemerintah daerah berupaya keras untuk memenuhi akses pelayanan sanitasi terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah melalui pembangunan sarana prasarana sanitasi yang berkesinambungan. Hal ini terlihat dari capaian akses sanitasi yang layak.

Tabel 3.19
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Tahun 2017–2021

| Uraian | Tahun | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Jumlah Rumah Tinggal Berakses Sanitasi | 80.895 | 85.952 | 91.610 | 95.657 | 96.292 |
| Jumlah Seluruh Rumah Tinggal | 139.846 | 140.035 | 142.587 | 142.821 | 142.846 |
| Persentase | 57.85 | 61.38 | 64,25 | 66,98 | 67,41 |

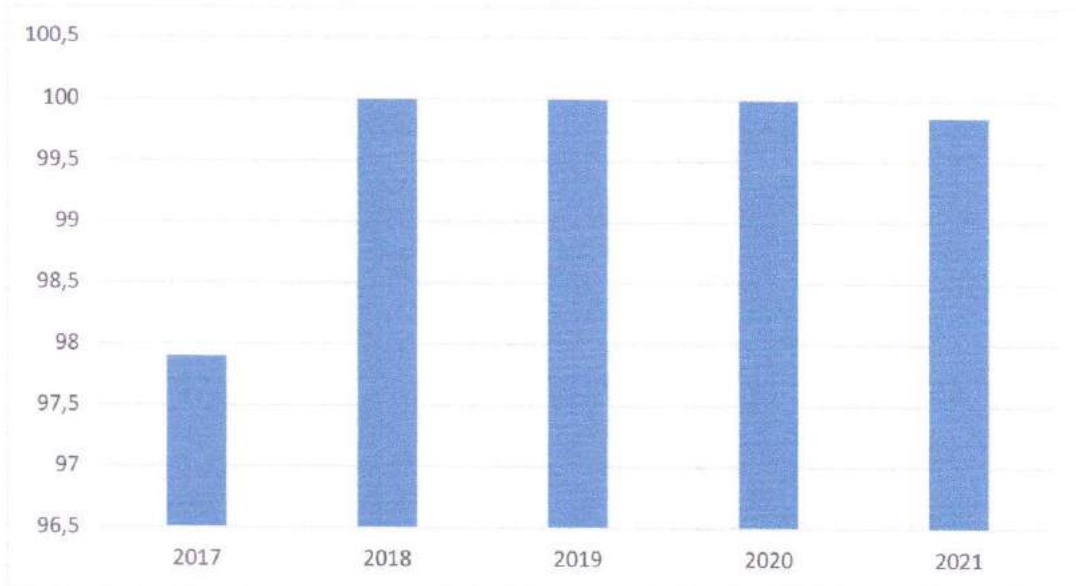
Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Aceh Utara 2022

Capaian pembangunan rumah tangga bersanitasi pada tahun 2017 sampai dengan 2021 cenderung meningkat, dari tahun sebelumnya peningkatan rumah tinggal bersanitasi difokuskan terutama pada rumah tangga berpenghasilan rendah/miskin.

d. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik

Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan listrik di Aceh Utara terus meningkat dari tahun ketahun. Sejak tahun 2017 hingga tahun 2021 jumlah persentase rumah tangga berlistrik di Aceh telah meningkat sebanyak 1,96 persen. Persentase jumlah rumah tangga berlistrik di Aceh Utara dapat di lihat pada Grafik 3.7.

Grafik 3.7
 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik
 di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2021

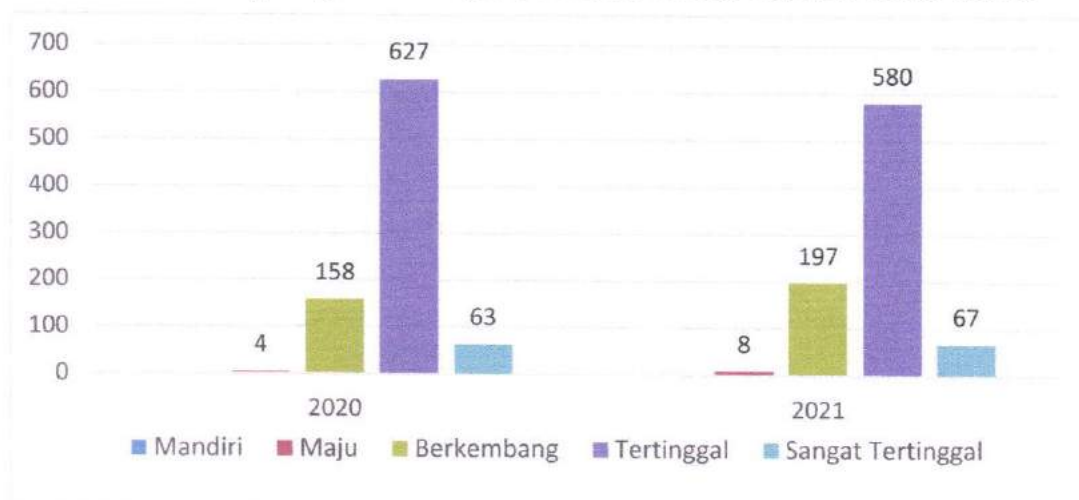


3.2.4. Bidang Pembangunan Desa

a. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi meluncurkan Indeks Desa Membangun (IDM) melalui Permendesa PDTT Nomor 2 Tahun 2016 tentang IDM dalam rangka mengurangi jumlah desa tertinggal dan meningkatkan jumlah desa mandiri. Perkembangan status desa di Kabupaten Aceh Utara dapat dilihat pada Grafik 3.8 berikut.

Grafik 3.8
 Status Gampong di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2021



Sumber : DPMPPKB Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

Dari Grafik 3.8 dapat dilihat bahwa belum ada satupun gampong di Kabupaten Aceh Utara yang berstatus mandiri, sedangkan gampong dengan status maju, pada tahun 2021 meningkat dari 4 gampong menjadi 8 gampong. Gampong dengan status berkembang juga meningkat dari 158 menjadi 197. Gampong dengan status tertinggal menurun dari 627 menjadi 580, namun gampong dengan status sangat tertinggal meningkat dari 63 menjadi 67 gampong. Persentase gampong maju dan berkembang meningkat dari 19,01 persen pada tahun 2020 menjadi 24,06 persen pada tahun 2021.

Dilihat dari pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), sampai dengan tahun 2021 jumlah BUMG yang aktif berjumlah 707 BUMG berdasarkan penyertaan modal dari Dana Desa. Kondisi BUMG secara rinci dapat dilihat dari Tabel 3.20.

Tabel 3.20
Kondisi BUMG di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021

| No | Uraian | Jumlah |
|----|---|--------------------|
| 1 | BUMG Aktif | 707 unit |
| 2 | Jumlah Penyertaan Modal | Rp.133.031.171.211 |
| 3 | Laba Usaha | Rp. 2.657.594.104 |
| 4 | Jumlah BUMG yang membuat laporan keuangan | 193 unit |
| 5 | Jumlah BUMG yang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Gampong | 89 unit |

Sumber : DPMPPKB Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

Pemberdayaan masyarakat, secara lugas dapat diartikan sebagai suatu proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat. Dari definisi tersebut terlihat ada 3 tujuan utama dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu mengembangkan kemampuan masyarakat, mengubah perilaku masyarakat, dan mengorganisir diri masyarakat. Tujuan utama tersebut diwujudkan salah satunya melalui Pembinaan Kesejahteraan Keluarga yang merupakan organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan dan kesejahteraan keluarga menjadi tujuan utama

PKK. Hal ini dikarenakan keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang akan berpengaruh besar terhadap kinerja pembangunan. Dari keluarga yang sejahtera ini, maka tata kehidupan berbangsa dan bernegara akan dapat melahirkan ketentraman, keamanan, keharmonisan dan kedamaian.

Tabel 3.21
Jumlah PKK Aktif, Posyandu Aktif dan
Jumlah Keseluruhan LPM di Kab. Aceh Utara Tahun 2017-2021

| Uraian | Tahun | | | | |
|----------------|-------|------|------|------|------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| PKK aktif | 516 | 526 | 852 | 852 | 852 |
| Posyandu Aktif | 894 | 953 | 952 | 952 | 952 |
| Jumlah LPM | 2185 | 2185 | 2185 | 2185 | 2185 |

Sumber : DPMPPKB Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

PKK merupakan suatu kelompok masyarakat yang terdiri dari ibu-ibu rumah tangga maupun ibu yang mempunyai karier di bidang lain, yang jelas bertujuan untuk mensejahterakan keluarga, kegiatan PKK setiap tahun dilakukan pembinaan untuk adanya peningkatan mutu dan kualitas dalam mengayomi keluarga namun ada sebagian kecil yang tidak bergabung. Tim penggerak PKK Kabupaten setiap tahun melakukan pembinaan di kecamatan.

3.2.5. Bidang Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja. Dalam UU No 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan mendefinisikannya sebagai segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Tabel 3.22
Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar per Tahun
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2021

| Uraian | Tahun | | | | |
|------------------------------|-------|------|------|-------|------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Jumlah Pencari Kerja (orang) | 912 | 403 | 367 | 1.409 | 400 |

Sumber : Dinas Penanaman Modal Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Tahun 2022

Jumlah pencari kerja di Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2017 yang terdaftar sebanyak 912 orang dan cenderung menurun di tahun 2018 dan 2019 menjadi 367 orang. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan mencapai 1.409 orang dan Kembali menurun menjadi 400 orang pada tahun 2021.

Besarnya partisipasi angkatan kerja dalam pasar kerja dapat diukur dengan menggunakan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesulitan angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Angka TPAK yang rendah menunjukkan kecilnya pasokan tenaga kerja yang tersedia. Sebaliknya, angka TPAK yang tinggi menunjukkan besarnya pasokan tenaga kerja yang tersedia.

Tabel 3.23
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Jiwa) Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2017-2021

| Uraian | Tahun | | | | |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Jumlah Angkatan Kerja | 235.420 | 265.708 | 260.721 | 267.235 | 263.205 |
| Jumlah Penduduk Usia Kerja | 411.472 | 418.034 | 424.713 | 443.103 | 450.160 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh, Tahun 2017-2021

Tabel dibawah menunjukkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada tahun 2017 sebesar 57,21 persen meningkat menjadi 63,56 pada tahun 2018 namun selanjutnya menunjukkan *trend* menurun menjadi 58,46 pada tahun 2021, namun Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Aceh Utara masih jauh di bawah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Aceh dan Nasional. Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja antara Kabupaten Aceh Utara, Aceh dan Nasional terlihat pada tabel 3.24 dibawah ini :

Tabel 3.24
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2017-2021

| Uraian | Tahun | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Aceh Utara (%) | 57,21 | 63,56 | 61,39 | 60,31 | 58,46 |
| Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Aceh (%) | 63,74 | 64,24 | 63,36 | 65,10 | 63,78 |
| Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Nasional (%) | 66,67 | 67,26 | 67,49 | 67,77 | 67,80 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh, Tahun 2017-2021

Tabel dibawah menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2017 sebesar 11,02 persen menunjukkan trend menurun menjadi 8,31 persen pada tahun 2021, namun Tingkat Pengangguran Terbuka Kerja Aceh Utara masih jauh di bawah Tingkat Pengangguran Terbuka Aceh dan Nasional. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka antara Kabupaten Aceh Utara, Aceh dan Nasional terlihat pada tabel 3.25 dibawah :

Tabel 3.25
Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen) Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2017-2021

| Uraian | Tahun | | | | |
|---|-------|-------|------|------|------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Tingkat Pengangguran Terbuka Aceh Utara (%) | 11,02 | 10,18 | 8,63 | 8,56 | 8,31 |
| Tingkat Pengangguran Terbuka Aceh (%) | 6,57 | 6,36 | 6,20 | 6,59 | 6,30 |
| Pengangguran Terbuka Nasional (%) | 5,50 | 5,34 | 5,28 | 7,07 | 6,49 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh, Tahun 2017-2021

Perbandingan antara TPAK perempuan dan laki-laki pada tahun 2021 menunjukkan perbedaan yang cukup besar, TPAK perempuan yaitu sebesar 41,95 persen lebih rendah bila dibandingkan dengan TPAK laki-laki yaitu sebesar 75,68 persen. Data tersebut menggambarkan bahwa partisipasi perempuan di Kabupaten Aceh Utara dalam bekerja lebih rendah dibandingkan laki-laki.

3.2.6. Bidang Ketahanan Pangan

Kondisi ketahanan pangan di kabupaten Aceh Utara dapat diketahui melalui beberapa indikator diantaranya ketersediaan pangan utama dan jumlah desa rawan pangan. Pada tahun 2017, ketersediaan pangan utama di kabupaten Aceh Utara sebesar 504,73 kg/kapita/tahun. Angka tersebut mengalami penurunan sampai mencapai angka 418,78 kg/kapita/tahun. Perkembangan ketersediaan pangan utama (kg/kap/tahun) di Kabupaten Aceh Utara tahun 2017-2021 dapat dijelaskan seperti tabel 3.26 berikut ini.

Tabel 3.26
Ketersediaan Pangan Utama
di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2021

| No | KOMODITI | TAHUN | | | | |
|----|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Rata-rata jumlah ketersediaan pangan Utama per tahun (kg) | 504,73 | 379,58 | 475,08 | 469,7 | 418,78 |
| 2 | Jumlah Penduduk | 602.554 | 608.397 | 619.407 | 602.793 | 608.106 |

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat, atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standard kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Kerawanan pangan juga didefinisikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan individu atau sekumpulan individu di suatu wilayah untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan aktif.

Kerentanan pangan dan gizi adalah masalah multi-dimensional yang memerlukan analisis dari sejumlah parameter. Kompleksitas masalah ketahanan pangan dan gizi dapat dikurangi dengan mengelompokkan beberapa indikator kedalam tiga kelompok yang berbeda tetapi saling berhubungan, yaitu ketersediaan pangan, akses terhadap pangan dan pemanfaatan pangan secara individu. Pertimbangan gizi, termasuk ketersediaan dan keterjangkauan bahan

pangan bergizi, tersebar di dalam tiga kelompok tersebut. Daerah Rentan Rawan Pangan, artinya daerah yang apabila tidak disupervisi dapat menjadi daerah rawan pangan.

Kondisi desa rawan pangan di Kabupaten Aceh Utara berdasarkan peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau yang lebih dikenal dengan peta FSVA (*Food Security and Vulnerability Atlas*) dari tahun 2019–2021 pada Tabel 3.27 berikut :

Tabel 3.27
Jumlah Desa Rawan Pangan di Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2019-2021

| No | Tahun | Jumlah Gampong Rawan Pangan | | |
|----|-------|-----------------------------|-------------|-------------|
| | | Prioritas 1 | Prioritas 2 | Prioritas 3 |
| 1 | 2019 | 17 | 57 | 171 |
| 2 | 2020 | 17 | 48 | 154 |
| 3 | 2021 | 13 | 37 | 110 |

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

3.2.7. Bidang Pertanian dan Perkebunan

Pembangunan sub sektor pertanian tanaman pangan lebih difokuskan pada komoditi unggulan pertanian berupa komoditi tanaman padi. Dengan luas baku sawah 38.417 ha merupakan potensi untuk pengembangan komoditi-komoditi unggulan terutama padi, kedelai dan jagung guna mendukung pertumbuhan PDRB daerah di sektor pertanian. Peningkatan kelembagaan kelompok tani merupakan langkah awal peningkatan kesejahteraan petani, hal ini dapat dilakukan dengan adanya pendampingan dan pembinaan yang berkelanjutan.

Selama beberapa tahun terakhir, daerah ini mengembangkan sejumlah tanaman pangan seperti padi, kedelai, jagung, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar, perkembangan produksi komoditi tanaman pangan unggulan tersaji pada Tabel 3.28 berikut:

Tabel 3.28
Perkembangan Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2017-2021

| No. | Komoditi | Tahun | | | | |
|-----|--------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Padi | 440.738,83 | 367.519,63 | 389.076,30 | 393.477,210 | 343.726,19 |
| 2 | Kedelai | 358,08 | 3.804,73 | 59,75 | 497,72 | 105,71 |
| 3 | Jagung | 14.120,56 | 10.989,22 | 14.647,67 | 10.436,60 | 13.500,95 |
| 4 | Kacang Tanah | 157,14 | 128,04 | 110,57 | 122,01 | 115,9 |
| 5 | Ubi Kayu | 46,20 | 45,60 | 22,77 | 3.482,31 | 3.331,48 |
| 6 | Ubi Jalar | 3.625,57 | 3.613,21 | 3.115,15 | 96,40 | 102,63 |
| 7 | Kacang Hijau | 228,66 | 187,15 | 156,96 | 60,82 | 48,58 |

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman dan Pangan Kab. Aceh Utara Tahun 2022

3.2.8. Bidang Kelautan dan Perikanan

Luas wilayah Kabupaten Aceh Utara terbagi kedalam 27 kecamatan yang mempunyai karakteristik wilayah masing-masing dengan panjang garis pantai mencapai 55,34 Km. Karakteristik wilayah Kabupaten Aceh Utara yang berkaitan dengan sektor kelautan dan perikanan dibagi menjadi 4 (empat) wilayah yaitu : 1) Wilayah Pengembangan Perikanan Tangkap (wilayah pantai), 2) Wilayah Pengembangan Perikanan Budidaya Air Payau (wilayah pesisir), 3) Wilayah Pengembangan Budidaya air Tawar (wilayah pedalaman), dan 4) Wilayah Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan.

Tabel 3.29
Jumlah Produksi Ikan di Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2017-2021

| Uraian | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Jumlah Produksi Ikan (ton) | 28.861,20 | 28.861,00 | 31.958,47 | 27.597,31 | 27.878,95 |
| Target Daerah | 33.149,79 | 35.978,57 | 28.668,63 | 29.195,05 | 29.718,37 |
| Rasio | 87,06 | 86,43 | 111,48 | 94,52 | 93,81 |

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Aceh Utara Tahun 2022

Tabel 3.29 diatas menunjukkan bahwa produksi ikan tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 281,64 ton bila dibandingkan pada tahun 2020. Bila dilihat dari tren selama 5 tahun produksi ikan mengalami peningkatan maksimal sebesar 31.958,47 ton dan initerjadi pada tahun 2019. Walaupun terjadi peningkatan produksi namun belum mencapai sesuai dengan target daerah.

3.2.9. Bidang Sosial

Populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Aceh Utara cenderung fluktuatif, hal ini dikarenakan masih terdapat masyarakat dengan kondisi kemiskinan, keterlantaran, disabilitas, ketunaan, korban tindak kekerasan dan perdagangan orang, serta perubahan lingkungan sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosial. Oleh sebab itu pemerintah daerah berupaya melaksanakan penanganan PMKS melalui perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, penanganan fakirmiskin, dan pemberdayaan sosial. Penanganan PMKS yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2017-2021 sekitar 0,1 s/d 2,26 persen.

Tabel 3.30
Penanganan PMKS di Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2017-2021

| Uraian | Tahun | | | | |
|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Jumlah Populasi PMKS | 147.357 | 147.357 | 147.357 | 167.253 | 165.980 |
| Jumlah PMKS yang dibantu | 290 | 140 | 445 | 3780 | 453 |
| Persentase PMKS yang dibantu (%) | 0,20 | 0,10 | 0,30 | 2,26 | 0,27 |

Sumber : Dinsos P3A Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021

3.2.10. Bidang Strategis Lainnya yang Berkaitan dengan Isu Kemiskinan

a. Penanggulangan Bencana

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau non alam serta manusia itu sendiri sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Secara kondisi sosial dan geografis wilayah Kabupaten Aceh Utara adalah daerah rawan bencana, baik bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial disebabkan oleh adanya jalur tiga lempeng dunia yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia dan Fasifik yang berpotensi terjadinya gempa bumi dan memicu timbulnya tsunami seperti yang

pernah dialami pada tahun 2004, disamping itu wilayah Kabupaten Aceh Utara memiliki geografi dengan tanah yang labil serta terdapatnya beberapa daerah aliran sungai besar yang menyebabkan terjadinya banjir luapan setiap tahunnya serta daerah yang merupakan wilayah rentan dengan konflik sosial lainnya.

Ada beberapa bencana yang pernah menimpa Kabupaten Aceh Utara seperti gempa bumi dan tsunami, banjir, angin topan/kencang/puting beliung, erosi dan abrasi, kekeringan, longsor, kebakaran pemukiman, kebakaran hutan dan korban tenggelam. Akibat dari bencana tersebut telah berdampak kepada kerugian materil dan imateril antara lain korban jiwa dan harta benda serta kerusakan infrastruktur lainnya.

Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tangga darurat, dan rehabilitasi. Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Aceh Utara saat ini telah bergerak mengikuti system penanggulangan bencana nasional. Perubahan cara pandang penanggulangan bencana dari yang bersifat tanggap darurat kearah pengurangan risiko bencana telah mulai berjalan. Untuk mengurangi terhadap resiko banjir yang terjadi hampir setiap tahun di Kabupten Aceh Utara, melalui bantuan anggaran yang dibiayai oleh APBN sejak tahun 2016 melakukan Pembangunan Waduk Krueng Keureuto yang diharapkan mampu mereduksi atau setidaknya mampu mengendalikan meluasnya banjir di wilayah timur dan tengah Kabupaten Aceh Utara. Namun upaya tersebut, tidaklah mudah karena dengan kondisi goeografis Kabupaten Aceh Utara di kelilingi atau dilintasi oleh beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS), sehingga diperlukan berbagai langkah atau upaya peningkatan dan kerjasama pemerintah daerah Kabupaten Aceh Utara dengan Pemerintah Daerah terkait lainnya serta dengan berbagai organisasi-organisasi pendukung lainnya yang membidangi masalah pengendalian banjir tentunya. Berikut disampaikan kondisi luas

wilayah banjir dari tahun 2017–2021 seperti yang tercantum dalam Tabel 3.31 di bawah ini :

Tabel 3.31
Jumlah Wilayah Terkena Dampak Banjir Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2017–2021

| No | Dampak Banjir | Tahun | | | | |
|----|------------------|-------|------|------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Jumlah Gampong | 397 | 238 | 50 | 396 | 74 |
| 2 | Jumlah Kecamatan | 26 | 13 | 13 | 24 | 17 |

Sumber : BPBD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

Pada tahun 2021, persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap adalah sebesar 65 persen. Tingkat resiko bencana dapat dinilai berdasarkan indeks risiko bencana. Dalam indeks risiko ini, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, keterpaparan, dan kapasitas pemerintah serta komunitas dalam menghadapi bencana. Penilaian tingkat risiko berdasarkan potensi kerugian di atas memungkinkan adanya perhitungan capaian suatu upaya pengurangan risiko bencana di suatu daerah. Risiko bencana akan mengalami penurunan atau peningkatan seiring adanya perubahan pada komponen tersebut. Oleh karena itu, program atau kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan kerentanan atau peningkatan kapasitas dapat dilihat kontribusinya secara kuantitatif dalam bentuk penurunan indeks risiko bencana. Berdasarkan penilaian indeks risiko bencana yang dikeluarkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Nasional, indeks risiko bencana Kabupaten Aceh Utara adalah 175,20 atau termasuk dalam kategori tinggi.

b. Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran

Kebakaran ialah nyala api baik kecil maupun besar pada tempat, situasi dan waktu yang tidak dikehendaki yang bersifat merugikan dan pada umumnya sulit untuk dikendalikan. Waktu Tanggap atau lebih dikenal dengan *respons time* adalah total waktu yang dihitung dari saat berita kebakaran diterima, pengiriman pasukan dan sarana

pemadam kebakaran kelokasi kebakaran sampai dengan kondisi siap untuk melaksanakan operasi pemadaman.

Secara Nasional Norma Waktu Tanggap yang harus di penuhi dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah 15 Menit sejak menerima pengaduan sampai gelar selang siap semprot di lokasi kebakaran. Standar Pelayanan ini harus benar-benar dikuasai dan dipedomani oleh semua personil atau petugas Damkar. Standar ini juga menjadi salah satu alat ukur keberhasilan petugas pemadam dalam memberikan layanan pemadam kebakaran.

Capaian tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran adalah sebesar 70 persen. Jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten Aceh Utara selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 3.32
Kejadian Kebakaran di Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2017-2021

| Uraian | Tahun | | | | |
|---------------------------|-------|------|------|------|------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Jumlah Kejadian Kebakaran | 163 | 171 | 165 | 131 | 88 |

Sumber : BPBD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

3.3. Kemiskinan Ekstrem

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan ini merupakan agenda prioritas nasional. Instruksi Presiden tersebut agar melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan melalui: (a) Pengurangan beban pengeluaran, (b) Peningkatan pendapatan masyarakat dan (c) Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Kemiskinan ekstrem dapat didefinisikan sebagai penduduk dengan pengeluaran 1,9 USD PPP, berdasarkan standar Work Bank. Berdasarkan perhitungan BPS bahwa 1,9 USD PPP perkapita perhari pada tahun 2022 adalah Rp. 10.739 perkapita perhari apabila dikalikan dengan 30 hari dalam sebulan, maka garis kemiskinan

ekstrem pada tahun 2022 adalah 322.170/kapita/bulan dan ini berlaku secara Nasional.

Berdasarkan tabel di atas persentase penduduk miskin ekstrem Kabupaten Aceh Utara tahun 2021 sebesar 2,65 persen atau 16.617 jiwa. Sedangkan tahun 2022 persentase penduduk miskin ekstrem sebesar 2,94 atau 18.653 jiwa. Jumlah persentase penduduk miskin ekstrem Aceh Utara masih berada di bawah Provinsi Aceh yaitu tahun 2021 sebesar 3,47 persen dan tahun 2022 sebesar 2,95 persen. Untuk melihat penduduk miskin ekstrem Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.33
Estimasi Kemiskinan Ekstrem Provinsi Aceh,
Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2021-2022

| No | Provinsi/ Kabupaten/Kota | Estimasi Persentase Penduduk Miskin Ekstrem (%) | | Estimasi Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem (%) | |
|------|-----------------------------|---|------|---|---------|
| | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 |
| 1 | Provinsi Aceh | 3,47 | 2,95 | 188.722 | 162.805 |
| 1.1 | Simeulue | 1,76 | 3,8 | 1.688 | 3.696 |
| 1.2 | Aceh Singkil | 5,8 | 3,52 | 7.264 | 4.460 |
| 1.3 | Aceh Selatan | 2,02 | 0,94 | 4.929 | 2.332 |
| 1.4 | Aceh Tenggara | 4,22 | 1,98 | 9.227 | 4.387 |
| 1.5 | Aceh Timur | 3,43 | 2,86 | 15.105 | 12.758 |
| 1.6 | Aceh Tengah | 5,01 | 4,69 | 10.742 | 10.199 |
| 1.7 | Aceh Barat | 6,05 | 2,12 | 12.806 | 4.538 |
| 1.8 | Aceh Besar | 2,75 | 2,75 | 11.791 | 11.950 |
| 1.9 | Pidie | 4,36 | 4,85 | 19.706 | 22.147 |
| 1.10 | Bireuen | 1,72 | 2,47 | 8.199 | 11.888 |
| 1.11 | Aceh Utara | 2,65 | 2,94 | 16.617 | 18.653 |
| 1.12 | Aceh Barat Daya | 3,96 | 1,24 | 6.075 | 1.923 |
| 1.13 | Gayo Lues | 1,63 | 4,18 | 1.547 | 4.005 |
| 1.14 | Aceh Tamiang | 1,74 | 2,05 | 5.226 | 6.225 |
| 1.15 | Nagan Raya | 5,39 | 3,63 | 9.072 | 6.190 |
| 1.16 | Aceh Jaya | 2,75 | 1,41 | 2.623 | 1.365 |
| 1.17 | Bener Meriah | 10,16 | 6,96 | 15.218 | 10.568 |
| 1.18 | Pidie Jaya | 7,26 | 4,37 | 11.798 | 7.205 |
| 1.19 | Banda Aceh | 1,71 | 2,14 | 4.718 | 5.975 |
| 1.20 | Sabang | 5,42 | 5,97 | 1.884 | 2.090 |
| 1.21 | Langsa | 1,89 | 3,46 | 3.401 | 6.321 |
| 1.22 | Lhokseumawe | 3,23 | 1,06 | 6.757 | 2.246 |
| 1.23 | Subulussalam | 2,9 | 2,03 | 2.379 | 1.684 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2022

Informasi 40 persen dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah (Desil 1, 2 dan 3) Menurut Kecamatan Dalam Kabupaten Aceh Utara dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 3.34
Usia Sekolah di Kabupaten Aceh Utara

| No | Kecamatan | Bersekolah | | | | Tidak Bersekolah | | | |
|-----|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | Jumlah | 7-12 Tahun | 13-15 Tahun | 16-18 Tahun | Jumlah | 7-12 Tahun | 13-15 Tahun | 16-18 tahun |
| | Total (27) | 65.231 | 28.829 | 19.205 | 17.197 | 13.520 | 12.781 | 471 | 268 |
| 1. | BAKTIYA | 5.336 | 2.268 | 1.475 | 1.593 | 1.024 | 986 | 22 | 16 |
| 2. | DEWANTARA | 2.093 | 884 | 634 | 575 | 427 | 405 | 16 | 6 |
| 3. | KUTA MAKMUR | 3.959 | 1.830 | 1.141 | 988 | 752 | 721 | 15 | 16 |
| 4. | LHOKSUKON | 4.830 | 2.209 | 1.409 | 1.212 | 937 | 902 | 26 | 9 |
| 5. | MATANGKULI | 1.721 | 701 | 510 | 180 | 167 | 129 | 21 | 14 |
| 6. | MUARA BATU | 2.408 | 1.054 | 689 | 665 | 482 | 457 | 20 | 5 |
| 7. | MEURAH MULIA | 2.628 | 1.211 | 730 | 687 | 537 | 512 | 14 | 11 |
| 8. | SAMUDERA | 2.358 | 981 | 700 | 677 | 648 | 572 | 53 | 23 |
| 9. | SEUNUDDON | 3.393 | 1.450 | 986 | 957 | 610 | 593 | 13 | 4 |
| 10. | SYAMTALIRA ARON | 1.808 | 804 | 548 | 456 | 311 | 304 | 3 | 4 |
| 11. | SYAMTALIRA BAYU | 2.666 | 1.121 | 828 | 717 | 519 | 508 | 4 | 7 |
| 12. | TANAH LUAS | 2.536 | 1.112 | 747 | 677 | 476 | 451 | 14 | 11 |
| 13. | TANAH PASIR | 1.338 | 587 | 383 | 368 | 243 | 235 | 6 | 2 |
| 14. | T. JAMBO AYE | 4.981 | 2.277 | 1.460 | 1.244 | 961 | 923 | 22 | 16 |
| 15. | SAWANG | 4.987 | 2.080 | 1.575 | 1.332 | 1.209 | 1.101 | 67 | 41 |
| 16. | NISAM | 2.572 | 1.201 | 760 | 611 | 523 | 503 | 12 | 8 |
| 17. | COT GIREK | 1.645 | 714 | 475 | 456 | 312 | 289 | 14 | 9 |
| 18. | LANGKAHAN | 2.603 | 1.167 | 768 | 668 | 468 | 450 | 11 | 7 |
| 19. | BAKTIYA BARAT | 1.894 | 852 | 540 | 502 | 407 | 382 | 16 | 9 |
| 20. | PAYA BAKONG | 1.488 | 714 | 432 | 342 | 426 | 402 | 16 | 8 |
| 21. | NIBONG | 1.169 | 525 | 336 | 308 | 342 | 307 | 26 | 9 |
| 22. | SIMPANG KRAMAT | 1.431 | 650 | 431 | 350 | 325 | 295 | 19 | 11 |
| 23. | LAPANG | 935 | 396 | 245 | 294 | 165 | 158 | 6 | 1 |
| 24. | PIRAK TIMU | 962 | 443 | 291 | 228 | 171 | 166 | 5 | 0 |
| 25. | GEUREDONG PASE | 757 | 337 | 244 | 176 | 169 | 162 | 4 | 3 |
| 26. | BANDA BARO | 899 | 401 | 290 | 208 | 176 | 173 | 2 | 1 |
| 27. | NISAM ANTARA | 1.834 | 860 | 548 | 426 | 433 | 395 | 21 | 17 |

Sumber : P3KE, Kemenko PMK RI Tahun 2021

Bila di lihat pada tabel 3.34 diatas, lokasi untuk intervensi program di bidang pendidikan bagi anak yang tidak bersekolah usia 7-12 tahun lebih diutamakan pada kecamatan Sawang, Tanah Jambo Aye, Lhoksukon dan Baktiya. Sedangkan yang tidak bersekolah pada usia 13-15 tahun lokus untuk program pendidikan adalah kecamatan

Sawang, Nibong, Samudera, Lhoksukon dan Baktiya. Selanjutnya yang tidak bersekolah usia 16–18 tahun lokasi program yaitu kecamatan Nisam Antara, Sawang, Samudera, Tanah Jambo Aye, Kuta Makmur dan Baktiya.

Tabel 3.35
Status Kesejahteraan di Kabupaten Aceh Utara

| No. | Kecamatan | Keluarga | | | | | Individu | | | | |
|-----|-------------------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|
| | | Jumlah | Desil 1 | Desil 2 | Desil 3 | Desil 4 | Jumlah | Desil 1 | Desil 2 | Desil 3 | Desil 4 |
| | Total (27) | 61.798 | 16.873 | 18.199 | 14.777 | 11.949 | 274.728 | 90.505 | 81.156 | 59.273 | 43.794 |
| 1. | BAKTIYA | 5.637 | 1.224 | 1.685 | 1.493 | 1.235 | 23.727 | 6.539 | 7.461 | 5.631 | 4.096 |
| 2. | DEWANTARA | 1.638 | 278 | 413 | 453 | 494 | 7.988 | 1.573 | 2.079 | 2.066 | 2.270 |
| 3. | KUTA MAKMUR | 3.982 | 1.445 | 1.179 | 794 | 564 | 17.301 | 7.602 | 4.917 | 2.886 | 1.896 |
| 4. | LHOKSUKON | 4.363 | 1.249 | 1.271 | 1.027 | 816 | 19.978 | 6.714 | 5.705 | 4.351 | 3.208 |
| 5. | MATANGKULI | 1.631 | 430 | 496 | 406 | 299 | 7.615 | 2.492 | 2.341 | 1.677 | 1.105 |
| 6. | MUARA BATU | 2.192 | 588 | 612 | 550 | 442 | 10.006 | 3.183 | 2.774 | 2.309 | 1.740 |
| 7. | MEURAH MULIA | 2.605 | 822 | 821 | 553 | 409 | 11.170 | 4.310 | 3.440 | 2.060 | 1.360 |
| 8. | SAMUDERA | 2.158 | 586 | 638 | 495 | 439 | 10.058 | 3.187 | 2.896 | 2.195 | 1.780 |
| 9. | SEUNUDDON | 2.860 | 689 | 830 | 703 | 638 | 13.052 | 3.786 | 3.893 | 2.960 | 2.413 |
| 10. | SYAMTALIRA ARON | 1.596 | 357 | 474 | 389 | 376 | 7.198 | 1.925 | 2.124 | 1.685 | 1.464 |
| 11. | SYAMTALIRA BAYU | 2.639 | 645 | 745 | 630 | 619 | 11.346 | 3.442 | 3.249 | 2.456 | 2.199 |
| 12. | TANAH LUAS | 2.469 | 606 | 730 | 628 | 505 | 10.578 | 3.217 | 3.198 | 2.383 | 1.780 |
| 13. | TANAH PASIR | 1.240 | 264 | 371 | 313 | 292 | 5.533 | 1.391 | 1.731 | 1.273 | 1.138 |
| 14. | T. JAMBO AYE | 4.680 | 1.396 | 1.440 | 1.034 | 810 | 20.926 | 7.493 | 6.338 | 4.130 | 2.965 |
| 15. | SAWANG | 4.801 | 1.561 | 1.415 | 1.066 | 759 | 21.891 | 8.531 | 6.443 | 4.279 | 2.638 |
| 16. | NISAM | 2.582 | 884 | 714 | 551 | 433 | 11.360 | 4.665 | 3.072 | 2.143 | 1.480 |
| 17. | COT GIREK | 1.575 | 338 | 449 | 449 | 339 | 6.646 | 1.744 | 1.953 | 1.750 | 1.199 |
| 18. | LANGKAHAN | 2.439 | 449 | 694 | 737 | 559 | 10.280 | 2.375 | 3.103 | 2.879 | 1.923 |
| 19. | BAKTIYA BARAT | 1.713 | 462 | 447 | 432 | 372 | 7.879 | 2.559 | 2.030 | 1.804 | 1.486 |
| 20. | PAYA BAKONG | 1.459 | 400 | 446 | 375 | 238 | 6.510 | 2.152 | 1.998 | 1.485 | 875 |
| 21. | NIBONG | 1.237 | 294 | 378 | 312 | 253 | 5.435 | 1.581 | 1.713 | 1.230 | 911 |
| 22. | SIMPANG KRAMAT | 1.349 | 398 | 407 | 303 | 241 | 6.017 | 2.120 | 1.793 | 1.252 | 852 |
| 23. | LAPANG | 919 | 161 | 253 | 245 | 260 | 3.957 | 769 | 1.125 | 1.053 | 1.010 |
| 24. | PIRAK TIMU | 814 | 266 | 275 | 156 | 117 | 3.785 | 1.447 | 1.270 | 639 | 429 |
| 25. | GEUREDONG PASE | 648 | 164 | 206 | 164 | 114 | 2.941 | 856 | 957 | 698 | 430 |
| 26. | BANDA BARO | 887 | 353 | 267 | 141 | 126 | 3.902 | 1.739 | 1.115 | 561 | 487 |
| 27. | NISAM ANTARA | 1.685 | 564 | 543 | 378 | 200 | 7.649 | 3.113 | 2.438 | 1.438 | 660 |

Sumber : P3KE, Kemenko PMK RI Tahun 2021

Pada tabel di atas lokus program di bidang sosial bila dilihat dari status kesejahteraan pada desil 1 untuk keluarga dan individu perlu dilakukan intervensi program yaitu pada kecamatan Sawang, Tanah Jambo Aye, Kuta Makmur, Baktiya dan Lhoksukon.

Tabel 3.36
Jenis Pekerjaan Individu di Kabupaten Aceh Utara

| No | Kecamatan | Tidak Bekerja | Petani | Nelayan | Pedagang | Pegawai Swasta | Wiraswasta | Pensiunan | Pekerja Lepas | Lainnya |
|-----|-------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|---------------|------------|---------------|---------|
| | Total (27) | 180.517 | 55.184 | 1.970 | 4.558 | 1.566 | 18.019 | 179 | 11.279 | 1.456 |
| 1. | BAKTIYA | 14.536 | 5.678 | 81 | 389 | 97 | 1.638 | 21 | 1.191 | 96 |
| 2. | DEWANTARA | 6.029 | 541 | 220 | 99 | 47 | 589 | 7 | 427 | 29 |
| 3. | KUTA MAKMUR | 11.272 | 3.851 | 45 | 260 | 183 | 1.100 | 10 | 436 | 144 |
| 4. | LHOKSUKON | 13.834 | 2.728 | 22 | 327 | 89 | 1.127 | 15 | 1.716 | 120 |
| 5. | MATANGKULI | 4.939 | 1.031 | 18 | 147 | 30 | 735 | 5 | 656 | 54 |
| 6. | MUARA BATU | 6.735 | 1.026 | 202 | 214 | 70 | 522 | 7 | 1.190 | 40 |
| 7. | MEURAH MULIA | 6.854 | 2.793 | 45 | 167 | 34 | 888 | 9 | 328 | 52 |
| 8. | SAMUDERA | 7.199 | 1.362 | 213 | 176 | 37 | 814 | 1 | 205 | 51 |
| 9. | SEUNUDDON | 8.971 | 2.252 | 379 | 215 | 46 | 924 | 5 | 182 | 78 |
| 10. | SYAMTALIRA ARON | 5.290 | 709 | 23 | 67 | 60 | 555 | 11 | 367 | 116 |
| 11. | SYAMTALIRA BAYU | 7.537 | 2.179 | 141 | 209 | 37 | 751 | 6 | 434 | 52 |
| 12. | TANAH LUAS | 6.610 | 2.560 | 15 | 145 | 40 | 870 | 9 | 262 | 67 |
| 13. | TANAH PASIR | 3.924 | 843 | 51 | 125 | 30 | 392 | 4 | 136 | 28 |
| 14. | TANAH JAMBO AYE | 14.451 | 3.226 | 95 | 459 | 96 | 1.579 | 13 | 912 | 95 |
| 15. | SAWANG | 12.760 | 6.472 | 66 | 244 | 103 | 1.691 | 16 | 444 | 95 |
| 16. | NISAM | 7.860 | 2.127 | 15 | 231 | 161 | 182 | 5 | 722 | 57 |
| 17. | COT GIREK | 4.599 | 1.098 | 14 | 102 | 183 | 457 | 14 | 135 | 44 |
| 18. | LANGKAHAN | 5.691 | 3.554 | 31 | 219 | 27 | 328 | 6 | 396 | 28 |
| 19. | BAKTIYA BARAT | 5.251 | 1.786 | 28 | 110 | 22 | 540 | 5 | 103 | 34 |
| 20. | PAYA BAKONG | 3.763 | 1.931 | 19 | 112 | 19 | 413 | 1 | 227 | 25 |
| 21. | NIBONG | 3.735 | 1.073 | 25 | 78 | 20 | 452 | 0 | 33 | 19 |
| 22. | SIMPANG KRAMAT | 4.409 | 951 | 23 | 46 | 36 | 433 | 3 | 75 | 41 |
| 23. | LAPANG | 2.492 | 861 | 160 | 78 | 12 | 245 | 3 | 94 | 12 |
| 24. | PIRAK TIMUR | 2.567 | 826 | 7 | 42 | 30 | 67 | 0 | 231 | 15 |
| 25. | GEUREDONG PASE | 1.918 | 725 | 5 | 33 | 13 | 201 | 0 | 39 | 7 |
| 26. | BANDA BARO | 2.596 | 720 | 8 | 67 | 25 | 193 | 2 | 269 | 22 |
| 27. | NISAM ANTARA | 4.695 | 2.281 | 19 | 197 | 19 | 333 | 1 | 69 | 35 |

Sumber : P3KE, Kemenko PMK RI Tahun 2021

Penyebab utama kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara yaitu pendapatan individu atau keluarga masih di bawah garis kemiskinan. Tingkat kemiskinan Aceh Utara sebesar 17,43 persen sangat relevan terhadap pekerjaan individu yang ada di Aceh Utara. Bila dilihat pada tabel di atas jumlah individu yang tidak bekerja sangat tinggi yaitu sebesar 180.517 jiwa dan ini tersebar di semua kecamatan. Adapun yang menjadi perhatian pemerintah dan swasta terhadap lokasi program yaitu kecamatan Baktiya, Tanah Jambo Aye, Lhoksukon,

Sawang dan Kuta Makmur. Kecamatan-kecamatan tersebut merupakan kecamatan yang tertinggi bagi individu yang tidak bekerja.

Tabel 3.37
Kepemilikan Tempat di Kabupaten Aceh Utara

| No | Kecamatan | Milik Sendiri | Sewa/ Kontrak | Bebas Sewa | Lainnya |
|-----|-----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | Jumlah | 49.379 | 874 | 1.269 | 10.276 |
| 1. | BAKTIYA | 4.636 | 38 | 102 | 861 |
| 2. | DEWANTARA | 1.389 | 77 | 23 | 149 |
| 3. | KUTA MAKMUR | 3.084 | 65 | 80 | 753 |
| 4. | LHOKSUKON | 3.315 | 86 | 69 | 893 |
| 5. | MATANGKULI | 1.375 | 12 | 31 | 213 |
| 6. | MUARA BATU | 1.797 | 52 | 26 | 317 |
| 7. | MEURAH MULIA | 2.044 | 14 | 35 | 512 |
| 8. | SAMUDERA | 1.682 | 30 | 52 | 394 |
| 9. | SEUNUDDON | 2.245 | 73 | 71 | 471 |
| 10. | SYAMTALIRA ARON | 1.177 | 21 | 20 | 378 |
| 11. | SYAMTALIRA BAYU | 2.098 | 31 | 36 | 474 |
| 12. | TANAH LUAS | 1.975 | 28 | 33 | 433 |
| 13. | TANAH PASIR | 933 | 13 | 21 | 273 |
| 14. | TANAH JAMBO AYE | 3.672 | 104 | 147 | 757 |
| 15. | SAWANG | 4.208 | 40 | 45 | 508 |
| 16. | NISAM | 1.998 | 25 | 67 | 492 |
| 17. | COT GIREK | 1.065 | 5 | 227 | 278 |
| 18. | LANGKAHAN | 2.145 | 18 | 35 | 241 |
| 19. | BAKTIYA BARAT | 1.329 | 28 | 15 | 341 |
| 20. | PAYA BAKONG | 1.208 | 4 | 26 | 221 |
| 21. | NIBONG | 915 | 26 | 29 | 267 |
| 22. | SIMPANG KRAMAT | 1.040 | 19 | 21 | 269 |
| 23. | LAPANG | 685 | 10 | 29 | 195 |
| 24. | PIRAK TIMU | 661 | 10 | 11 | 132 |
| 25. | GEUREDONG PASE | 556 | 8 | 6 | 78 |
| 26. | BANDA BARO | 676 | 10 | 6 | 195 |
| 27. | NISAM ANTARA | 1.471 | 27 | 6 | 181 |

Sumber : P3KE, Kemenko PMK RI Tahun 2021

Bila di lihat pada tabel di atas, lokasi untuk intervensi program di bidang Sarana dan Prasarana lebih di utamakan pada kecamatan Kuta Makmur, Nisam, Tanah Jambo Aye, Lhoksukon dan Baktiya, Muara Batu dan Nisam Antara.

BAB IV PRIORITAS PROGRAM

Prioritas Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Aceh Utara tahun 2021-2026 ditetapkan berdasarkan hasil Evaluasi capaian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan tahun sebelumnya. Selain itu, dalam menentukan Prioritas Program penanggulangan kemiskinan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah yang kemudian di muktahirkan dengan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan. Selain itu, Penyusunan Prioritas Program juga mengacu pada program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara tahun 2021-2026.

4.1. Lokasi Program/Teori Perubahan

Lokasi Program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara sangat tergantung pada strategi yang akan di laksanakan. Dalam program penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan strategi diantaranya pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Dari ketiga strategi ini baru kita petakan kecamatan-kecamatan mana jumlah tingkat kesejahteraan di bidang pendidikan, sosial, kesehatan, infrastruktur, ketahanan pangan dan bidang lainnya yang masih rendah, sehingga perlu di lakukan intervensi program pada lokasi-lokasi atau kecamatan tingkat kesejahteraannya masih rendah.

4.2. Analisis Teori Perubahan/Theory Of Change (TOC)

Dalam rangka intervensi program penanggulangan kemiskinan dibidang Pendidikan, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara merumuskan Teori Perubahan dalam rangka optimalisasi kinerja bidang Pendidikan yang ditampilkan dalam kerangka logis sebagai berikut :



Dalam rangka intervensi program penanggulangan kemiskinan dibidang Kesehatan, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara merumuskan Teori Perubahan dalam rangka optimalisasi kinerja bidang Kesehatan yang ditampilkan dalam kerangka logis sebagai berikut :



Dalam rangka intervensi program penanggulangan kemiskinan dibidang Sosial, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara merumuskan Teori Perubahan dalam rangka optimalisasi kinerja bidang Sosial yang ditampilkan dalam kerangka logis sebagai berikut :

TOC BIDANG SOSIAL



4.3. Analisis Keterkaitan

Jika definisi kemiskinan dihubungkan dengan tingkat kesejahteraan, kemiskinan dapat di artikan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kesejahteraan atau dengan kata lain kekurangan akses terhadap sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kekurangan akses disini maksudnya adalah kurangnya pendapatan seseorang.

Pada dasarnya cara perhitungan kemiskinan dapat dibagi menjadi menjadi tiga metode yaitu :

1. Pendapatan

Definisi dari pendapatan adalah jumlah barang maupun jasa yang konsumsi ditambah dengan perubahan dari total asset bersih. Akan tetapi di Indonesia dimana pekerjaan nonformal lebih banyak dari pada pekerjaan formal, sangat sulit untuk menghitung tingkat pendapatan seseorang karena kurang tersedianya data untuk sektor informal.

2. Konsumsi

Pengertian dari konsumsi adalah barang-barang yang dihabiskan atau di pakai oleh seseorang dengan dibeli atau usaha sendiri. Perhitungan angka kemiskinan di Indonesia juga lebih efektif dihitung melalui metode konsumsi. Keadaan ekonomi seseorang akan lebih mudah dilihat melalui perhitungan konsumsi dibandingkan penghitungan pendapatan.

- **Bidang Konsumsi/Pengeluaran**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan pada Bab III, permasalahan utama yang dihadapi oleh Kabupaten Aceh Utara yaitu masih tingginya tingkat kemiskinan yang tercermin dari tingginya persentase dan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Aceh Utara. Untuk menguraikan permasalahan tersebut, maka disusun capaian antara/prakondisi yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yaitu menurunkan tingkat kemiskinan.



Gambar 4.1 Teori Perubahan/ToC Bidang Konsumsi/Pengeluaran

Agar tujuan menurunkan tingkat dan jumlah penduduk miskin dapat tercapai maka prakondisi yang harus dilakukan dan akan dicapai dalam ToC ini ada dua hal yaitu:

1. Pengurangan Behan Pengeluaran Masyarakat Miskin, melalui:
 - a) Perbaikan/pemutakhiran data penerima manfaat;
 - b) Bantuan sosial tepat sasaran;
 - c) Peningkatan akses dan mutu pelayanan dasar tepat sasaran.
2. Peningkatan Pendapatan Masyarakat Miskin, melalui:
 - a) Pelatihan keterampilan dan pemberdayaan potensi lokal;
 - b) Bantuan dan akses permodalan;
 - c) Peningkatan promosi dan pemasaran.

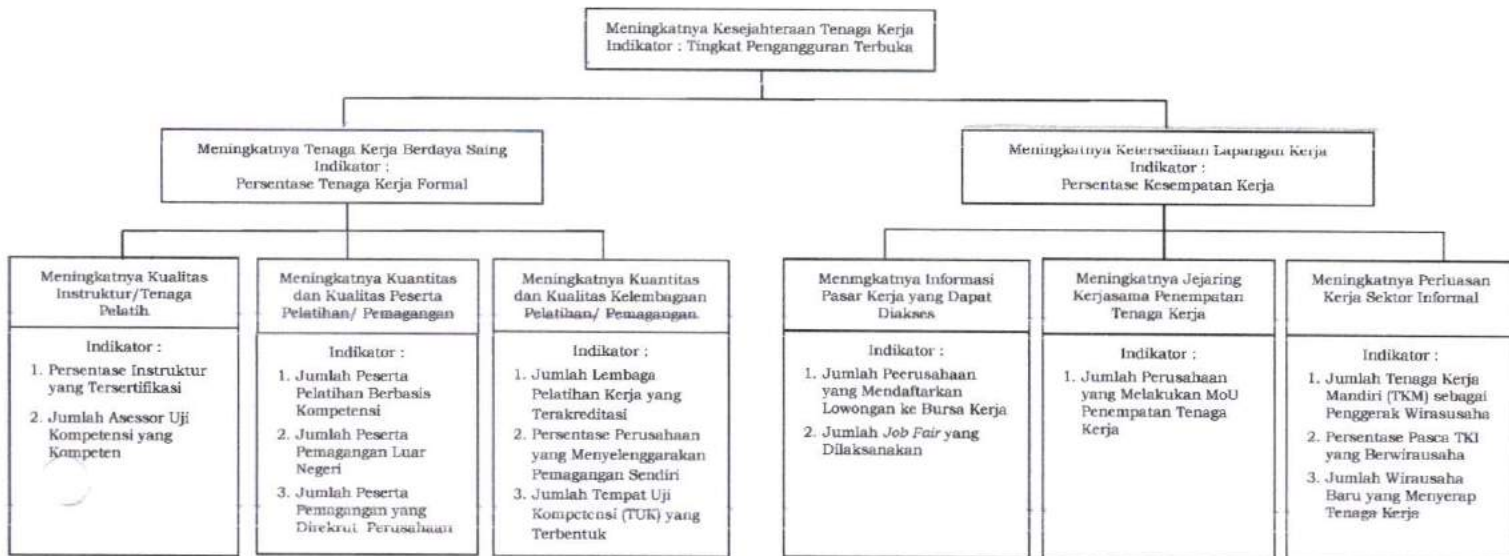
• Bidang Ketenagakerjaan

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, tujuan yang akan dicapai oleh Kabupaten Aceh Utara di bidang ketenagakerjaan yaitu Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja dengan indikator penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka.

Agar tujuan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka dapat tercapai maka prakondisi yang harus dilakukan dan akan dicapai ada 2 hal yaitu:

1. Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja melalui:
 - a) Peningkatan kualitas instruktur/tenaga pelatih;
 - b) Peningkatan kuantitas dan kualitas peserta pelatihan dan pemagangan;
 - c) Peningkatan kuantitas dan kualitas kelembagaan pelatihan dan pemagangan.

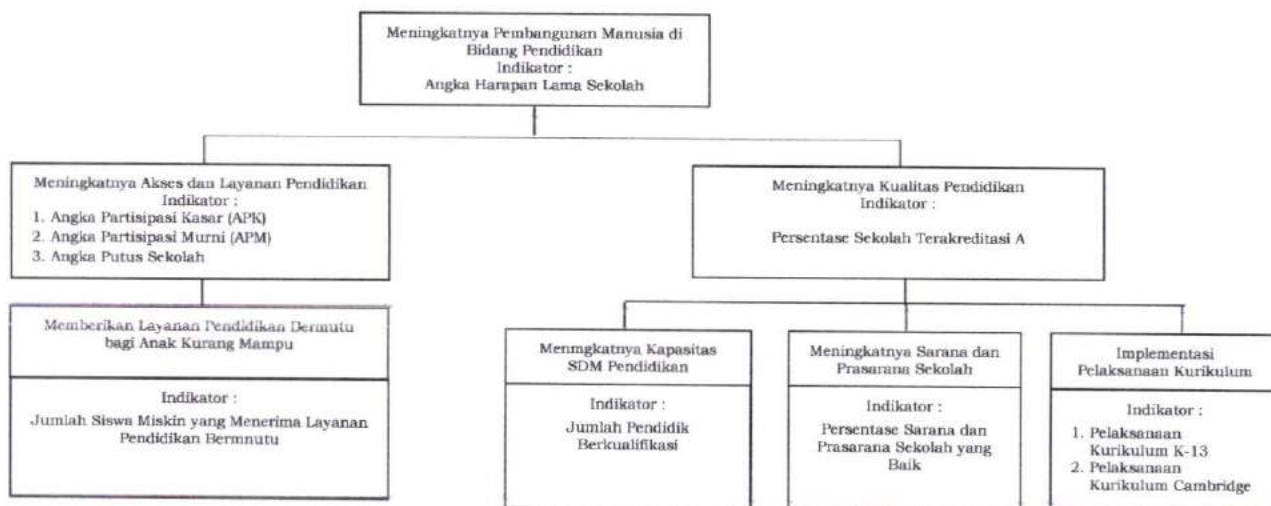
2. Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja, melalui:
- Meningkatnya informasi pasar kerja yang dapat diakses;
 - Peningkatan jejaring kerjasama penempatan tenaga kerja;
 - Perluasan kerja sektor informal.



Gambar 4.2 Teori Perubahan/ToC Bidang Ketenagakerjaan

• **Bidang Pendidikan**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, tujuan yang akan dicapai oleh Kabupaten Aceh Utara di bidang pendidikan yaitu Peningkatan Akses Pendidikan yang Berkualitas dengan indikator Harapan Lama Sekolah. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka disusun capaian antara/prakondisi yang harus dilakukan agar tercapainya tujuan seperti yang tergambar dalam ToC berikut ini.



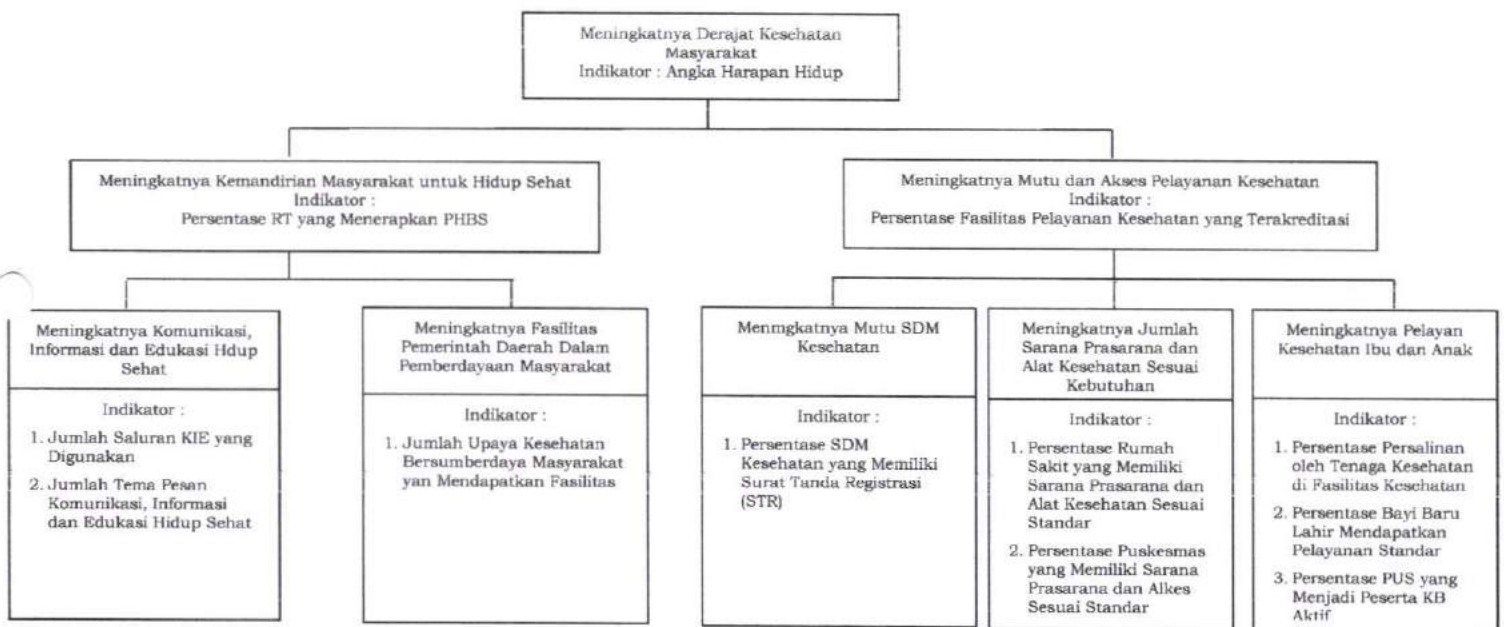
Gambar 4.3 Teori Perubahan/ToC Bidang Pendidikan

Agar tujuan meningkatkan Harapan Lama Sekolah dapat tercapai maka prakondisi yang harus dilakukan dan akan dicapai dalam ToC ini ada 2 hal yaitu:

1. Meningkatnya Akses dan Layanan Pendidikan melalui :
 - a) Pemberian layanan pendidikan bermutu bagi anak kurang mampu
2. Meningkatnya Kualitas Pendidikan, melalui:
 - a) Peningkatan kapasitas SDM pendidikan
 - b) Peningkatan sarana dan prasarana sekolah
 - c) Implementasi pelaksanaan kurikulum.

• **Bidang Kesehatan**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, tujuan yang akan dicapai oleh Kabupaten Aceh Utara di bidang kesehatan yaitu Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat yang tercermin dari Angka Harapan Hidup. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka disusun capaian antara/ prakondisi yang harus dilakukan agar tercapainya tujuan seperti yang tergambar dalam ToC berikut ini.



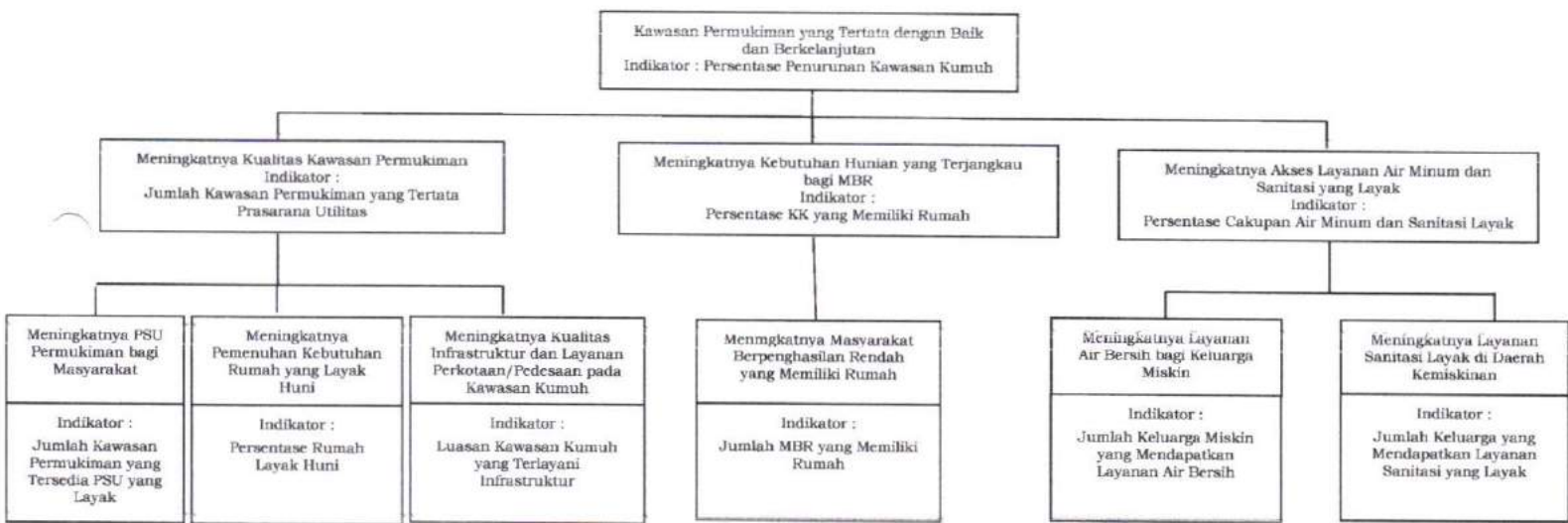
Gambar 4.4 Teori Perubahan/ToC Bidang Kesehatan

Agar tujuan meningkatkan Angka Harapan Hidup dapat tercapai maka prakondisi yang harus dilakukan dan akan dicapai dalam ToC ini ada 2 hal yaitu:

1. Meningkatnya Kemandirian Masyarakat untuk Hidup Sehat, melalui:
 - a) Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi hidup sehat;
 - b) Meningkatnya fasilitasi pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat;
2. Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan, melalui:
 - a) Meningkatnya mutu SDM kesehatan;
 - b) Meningkatnya jumlah sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai kebutuhan;
 - c) Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu dan anak.

• **Bidang Infrastruktur Dasar**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, tujuan yang akan dicapai oleh Kabupaten Aceh Utara di bidang infrastruktur dasar yaitu Kawasan Permukiman yang Tertata dengan Baik dan Berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka disusun capaian antara/prakondisi yang harus dilakukan agar tercapainya tujuan seperti yang tergambar dalam ToC berikut:



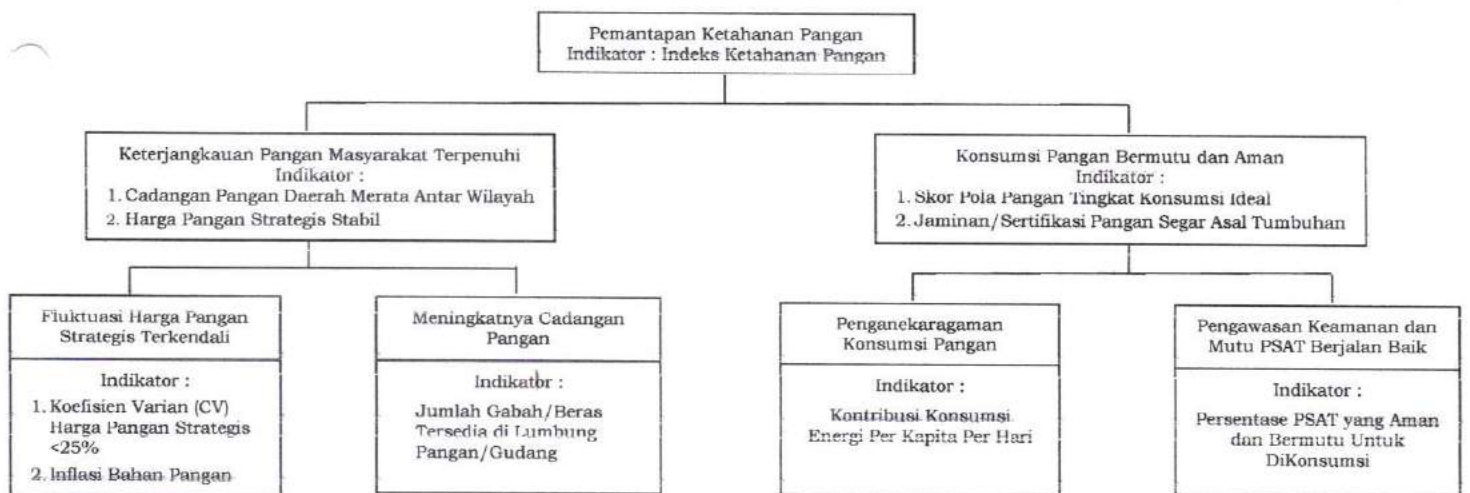
Gambar 4.5 Teori Perubahan/ToC Bidang Infrastruktur Dasar

Agar tujuan meningkatkan kawasan permukiman yang berkelanjutan dapat tercapai maka prakondisi yang harus dilakukan dan akan dicapai dalam ToC ini ada 3 hal yaitu:

1. Meningkatnya kualitas kawasan permukiman, melalui:
 - a) Meningkatnya PSU permukiman bagi masyarakat;
 - b) Meningkatnya pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni;
 - c) Meningkatnya kualitas infrastruktur dan layanan perkotaan/pedesaan pada kawasan kumuh.
2. Meningkatnya kebutuhan hunian yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui peningkatan masyarakat MBR yang memiliki rumah.
3. Meningkatnya akses layanan air minum dan sanitasi yang layak, melalui:
 - a) Meningkatnya layanan air bersih bagi keluarga miskin;
 - b) Meningkatnya layanan sanitasi layak di daerah kemiskinan.

• **Bidang Ketahanan Pangan**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, tujuan yang akan dicapai oleh Kabupaten Aceh Utara di bidang ketahanan pangan yaitu Pemantapan Ketahanan Pangan Masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka disusun capaian antara/prakondisi yang harus dilakukan agar tercapainya tujuan seperti yang tergambar dalam ToC berikut ini.



Gambar 4.6 Teori Perubahan/ToC Bidang Ketahanan Pangan

Agar tujuan Pemantapan Ketahanan Pangan dapat tercapai maka prakondisi yang harus dilakukan dan akan dicapai dalam ToC ini ada 2 hal yaitu:

1. Terpenuhinya Keterjangkauan Pangan Masyarakat, melalui:
 - a) Fluktuasi harga pangan strategis yang terkendali;
 - b) Peningkatan cadangan pangan.
2. Konsumsi Pangan Bermutu dan Aman, melalui:
 - a) Penganekaragaman konsumsi pangan;
 - b) Pengawasan keamanan dan mutu pangan yang berjalan baik.

4.4. Analisis Anggaran

4.4.1. Program Prioritas Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD)

Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) merupakan serangkaian indikasi-indikasi program yang dapat dijadikan landasan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam menyusun RPKD bidang penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara. Matriks Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Aceh Utara untuk tahun 2023-2026 sebagaimana tabel 4.5 berikut :

Tabel 4.5
Prioritas Program RKPD dan Pendanaan

| No | Bidang/ Urusan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kebijakan | Program | Indikator Program | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Lokasi Prioritas | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----|-------------------|---|---|--|--|---|---|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|------|---|--|--|---------------------|--|
| | | | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | | | | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | | | | |
| 1 | Pendidikan | Meningkatnya akses pendidikan | Meningkatnya akses pendidikan | pertumbuhan ekonomi daerah sektor pertanian, industri pengolahan dan perdagangan yang didukung oleh SDM yang berkualitas untuk menurunkan angka kemiskinan dengan memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan | Program Penyelenggaraan Majelis Pendidikan Aceh | Pertimbangan MPD yang menjadi pertimbangan Daerah | 100% | 300.000.000 | 100% | 800.000.000 | 100% | 800.000.000 | 100% | 800.000.000 | 27 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah | | | | |
| 2 | Ketenaga kerja | Menurunnya tingkat pengangguran terbuka | Persentase tingkat pengangguran terbuka | Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah sektor pertanian, industri pengolahan dan perdagangan yang didukung oleh SDM yang berkualitas untuk menurunkan angka kemiskinan dengan memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan | Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi | 100% | 745.000.000 | 100% | 745.000.000 | 100% | 745.000.000 | 100% | 745.000.000 | 27 | Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja | | | | |
| | | | | | Program Penempatan Tenaga Kerja | Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan | 100% | 69.000.000 | 100% | 80.000.000 | 100% | 80.000.000 | 100% | 80.000.000 | | Dinas Penanaman Modal, Sawang, T. Jambo Aye, Transmigrasi dan Tenaga Kerja | | | | |
| | | | | | Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi | Persentase Pembinaan kawasan transmigrasi | 100% | 290.736.771 | 100% | 849.514.300 | 100% | 1.318.816.910 | 100% | 2.068.816.910 | | Dinas Geureudong Pase, Sp. Kramat, Baktiya, Cot Girek, Lhoksukon, Kuta Makmur | | | | |
| 3 | Sosial | Meningkatnya pendapatan masyarakat | Pendapatan perkapita | Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah sektor pertanian, industri pengolahan dan perdagangan yang didukung oleh SDM yang berkualitas untuk menurunkan angka kemiskinan dengan memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan | Program Rehabilitasi Sosial | Persentase Penyandang disabilitas dan eks trauma yang mendapat bantuan pertahun | 5% | 195.600.000 | 5% | 205.380.000 | 5% | 215.649.000 | 5% | 226.431.450 | | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | | |
| | | | | | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | Cakupan penerima manfaat perlindungan dan jaminan sosial | 90% | 8.329.800.000 | 95% | 8.746.290.000 | 95% | 9.183.604.500 | 95% | 9.642.784.725 | 27 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|--|---|
| | | | | | | | 100% | 467.000.000 | 100% | 490.350.000 | 100% | 514.867.500 | 100% | 540.610.875 | Pirak Timu, Matangkuli, Paya Bakong, Col Cirek, Lhoksukon, Tanah Luas, Lapang, Tanah Pasir | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak |
| | | | | | | | 21,47% | 30.000.000 | 28,05% | 45.000.000 | 35,96% | 47.500.000 | 45,35% | 48.000.000 | Lhoksukon, Baktiya, Swang, T. Jambo Aye | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
| | | | | | | | 10,96% | 500.000.000 | 17,53% | 500.000.000 | 19,28% | 500.000.000 | 21,91% | 500.000.000 | Pirak Timu, Matangkuli, Paya Bakong, Col Cirek, Lhoksukon, Tanah Luas, Lapang, Tanah Pasir | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
| | | | | | | | 5% | 49.996.200 | 5% | 100.000.000 | 5% | 200.000.000 | 5% | 200.000.000 | Nisam Antara, Seunuddon, Syamtalira Bayu, Samudera | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
| | | | | | | | 30% | 600.000.000 | 35% | 630.000.000 | 35% | 630.000.000 | 35% | 685.000.000 | 27 Kecamatan | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
| | | | | | | | 0,79% | 20.810.968.850 | 4,97% | 21.851.517.292 | 5,81% | 22.944.093.157 | 0,62% | 24.091.297.814 | 27 Kecamatan | Sekretariat Baitul Mal |
| | | | | | | | 68.845 KPM | 289.975.140.000 | 68.845 KPM | 339.270.913.800 | 68.845 KPM | 396.946.969.146 | 68.845 KPM | 464.427.953.901 | 27 Kecamatan | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengabdian Masyarakat, Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | | | | | | 5% | 100.000.000 | 5% | 100.000.000 | 5% | 200.000.000 | 5% | 200.000.000 | Nisam Antara, Seunuddon, Syamtalira Bayu, Samudera | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|---|--------------------------------------|--|---|---|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|---|---|
| 4 | Kesehatan | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Prevalensi stunting | pertumbuhan ekonomi daerah sektor pertanian, industri pengolahan dan perdagangan yang didukung oleh SDM yang berkualitas untuk menurunkan angka kemiskinan dengan memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Persentase capaian SPM Bidang Kesehatan | 70,00% | 22.772.787.613 | 80,00% | 23.911.426.993 | 90,00% | 25.106.998.343 | 100,00% | 26.362.348.260 | 27 Kecamatan | Dinas Kesehatan |
| | | | | | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Tradisional dan Sertifikat izin produksi makanan dan minuman yang diproduksi oleh industri rumah tangga | Persentase izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan, oprikal, Usaha Mikro Obat Tradisional dan Sertifikat izin produksi makanan dan minuman yang diproduksi oleh industri rumah tangga | 79,00% | 57.522.000 | 80,00% | 102.398.100 | 80,00% | 107.518.005 | 80,00% | 112.893.905 | 27 Kecamatan | Dinas Kesehatan |
| | | | | | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Persentase rumah tangga yang sudah menerapkan PHBS | 15,00% | 189.612.960 | 18% | 199.093.608 | 20% | 209.048.288 | 23% | 219.500.702 | 27 Kecamatan | Dinas Kesehatan |
| | | | | | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) | Prevalensi stunting | 32,00% | 519.616.090 | 28,00% | 519.616.000 | 24,00% | 519.616.090 | 20,00% | 519.616.090 | 27 Kecamatan | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 5 | Ketahanan Pangan | Meningkatnya ketahanan pangan | Persentase Gampang rawan pangan | pertumbuhan ekonomi daerah sektor pertanian, industri pengolahan dan perdagangan yang didukung oleh SDM yang berkualitas untuk menurunkan angka kemiskinan dengan memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Ketersediaan Pangan Utama | 438,78 kg/jiwa / tahun | 84.325.832 | 448,78 Kg/kapita/tahun | 226.544.550 | 458,78 Kg/kapita/tahun | 226.771.095 | 468,78 Kg/kapita/tahun | 226.997.866 | Sawang, Baktiya, T. Jambo Aye, Baktiya Barat, Lhoksukon, Banda Baru | Dinas Pertanian dan Pangan |
| 6 | Pertanian dan perkebunan | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian | Pertumbuhan ekonomi sektor pertanian | pertumbuhan ekonomi daerah sektor pertanian, industri pengolahan dan perdagangan yang didukung oleh SDM yang berkualitas untuk menurunkan angka kemiskinan dengan memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | Produktivitas Perkebunan Andalan | 14,58 Ton/ha | 2.241.000.000 | 15,31 Ton/ha | 2.241.000.000 | 16,07 Ton/ha | 2.490.000.000 | 16,88 Ton/ha | 2.632.750.000 | Sawang, Kuta Makmur, Sp. Kramat, Cot Girek, Geuredong Pase | Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| | | | | | Program Pengendalian dan Penggulangan Bencana Pertanian | Tersedianya Luas Areal OPT/HPT | 175 Ha | 550.000.000 | 100 Ha | 300.000.000 | 100 Ha | 450.000.000 | 100 Ha | 600.000.000 | 27 Kecamatan | Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| | | | | | Program Penyuluhan Pertanian | Meningkatnya Pengetahuan Petani/ Peternak | 105 orang | 50.000.000 | 105 orang | 110.000.000 | 105 orang | 128.000.000 | 105 orang | 140.800.000 | 27 Kecamatan | Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|---|---|---------------|---------------|--|------------------------------|----------------|----------------|---|--|----------------------------|
| | | | | | | | 1.472.390.162 | 5% | 400.400.000 | 5% | 400.800.400 | 5% | 401.201.200 | Sawang, Kuta Makmur, Sp. Pangan Kramat, Cot Girek, Geuredong Pase, Lhoksukon, Baktiya, T. Jambo Aye, Baktiya Barat | Dinas Pertanian dan Pangan |
| | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | Persentase peningkatan produksi tanaman pangan | 5% | 99.994.000 | 2,60% | 100.092.122 | 2,60% | 100.292.406 | 27 Kecamatan | Dinas Pertanian dan Pangan | | | | | |
| | Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian | Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT | 2,00% | 2.435.000.000 | 2,00% | 500.500.000 | 2,00% | 681.244.127 | Muara Batu, Dewantara, Syamtalira Bayu, Samudera, Tanah Pasir, Lapang, Seunuddon, T. Jambo Aye | Dinas Kelautan dan Perikanan | | | | | |
| 7 | Kelautan dan Perikanan | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian | Pertumbuhan ekonomi daerah sektor pertanian, industri pengolahan dan perdagangan yang didukung oleh SDM yang berkualitas untuk menurunkan angka kemiskinan dengan memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan | Pertumbuhan ekonomi sektor pertanian | Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | 2,00% | 1.200.000.000 | 2,00% | 1.000.000.000 | 2,00% | 1.200.000.000 | Muara Batu, Dewantara, Syamtalira Bayu, Samudera, Tanah Pasir, Lapang, Seunuddon, T. Jambo Aye | Dinas Kelautan dan Perikanan | |
| | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya | 2,00% | 638.902.200 | 2,00% | 1.000.000.000 | 2,00% | 1.000.000.000 | Muara Batu, Dewantara, Syamtalira Bayu, Samudera, Tanah Pasir, Lapang, Seunuddon, T. Jambo Aye | Dinas Kelautan dan Perikanan | | | | | |
| 8 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Meningkatnya kinerja sistem irigasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat petani | pertumbuhan ekonomi daerah sektor pertanian, industri pengolahan dan perdagangan yang didukung oleh SDM yang berkualitas untuk menurunkan angka kemiskinan dengan memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan | Persentase panjang jaringan irigasi kewenangan kabupaten kondisi baik | Persentase panjang jaringan irigasi kewenangan kabupaten kondisi baik | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | 53,00% | 8.639.431.436 | 56,00% | 12.200.000.000 | 60,00% | 13.800.000.000 | Sawang, Kuta Makmur, Muarah Mulia, Samudera, Tanah Luas, Lhoksukon, Langkahan, Seunuddon, Baktiya Barat | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |
| | Program Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Persentase penduduk yang mendapat akses air minum yang aman | Persentase penduduk yang mendapat akses air minum yang aman | 72,03% | 9.469.561.800 | 74,43% | 9.592.953.036 | 75,00% | 10.145.312.097 | 78,00% | 10.339.718.339 | 27 Kecamatan | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | | |
| | Program Pengembangan Sistem Air Limbah | Persentase terlayani akses sanitasi atau air limbah | Persentase terlayani akses sanitasi atau air limbah | 70,43% | 10.389.202.036 | 73,95% | 1.576.935.168 | 77,00% | 2.875.173.871 | 80,00% | 2.929.577.349 | 27 Kecamatan | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | | |

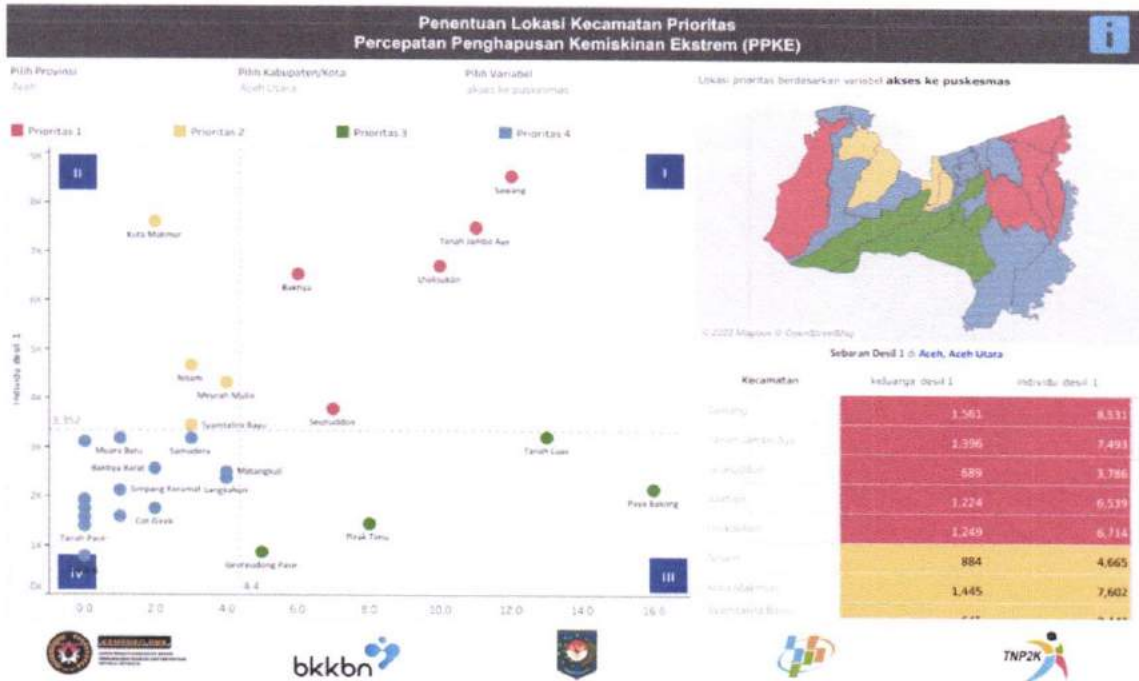
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|------------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------------|---|
| | | Meningkatnya dan ketersediaan rumah layak huni yang terjangkau | Persentase rumah layak huni | | Program Kawasan Perumahan | Cakupan ketersediaan rumah layak huni | 89,92% | 8.819.438.089 | 90,72% | 5.201.811.062 | 91,52% | 5.477.047.284 | 93,32% | 5.574.488.229 | 27 Kecamatan | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 9 | Kebencanaan | Meningkatnya kapasitas masyarakat terhadap pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana | Persentase gampong tanggap bencana | pertumbuhan ekonomi daerah sektor pertanian, industri pengolahan dan perdagangan yang didukung oleh SDM yang berkualitas untuk menurunkan angka kemiskinan dengan memperhatikan penchaungan yang berkelanjutan | Program Penanggulangan Bencana | Indeks Ketahanan Daerah | 22 | 1.270.237.752 | 22 | 1.100.000.000 | 26 | 1.100.000.000 | 30 | 1.100.000.000 | 27 Kecamatan | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |

BAB V LOKASI PRIORITAS

5.1. Analisis Lokasi Prioritas

Analisis lokasi prioritas bertujuan untuk menentukan wilayah kecamatan mana yang memiliki kondisi “kritis” (daerah prioritas) yang perlu segera mendapatkan intervensi (lokus intervensi) berdasarkan kondisi atau *performance* indikator utama dan indikator pendukung. Analisis lokasi prioritas ini menggunakan analisis kuadran, dengan membandingkan antara dua indikator (indikator x dan indikator y) yang memiliki keterkaitan/hubungan. Analisis ini dapat membantu dalam menetapkan wilayah prioritas intervensi kebijakan, sehingga kebijakan yang diambil diharapkan dapat lebih efektif dan tepat sasaran.

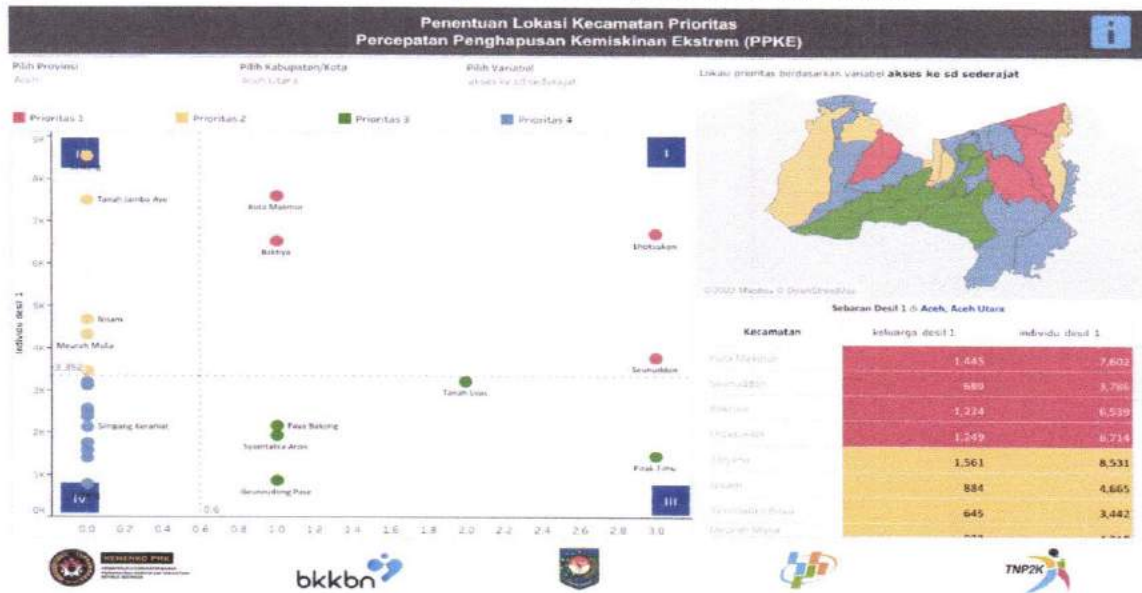
Gambar 5.1
Penentuan Lokasi Kecamatan Prioritas Terhadap Akses ke Puskesmas di Kabupaten Aceh Utara



Sumber : P3KE, Kemenko PMK RI Tahun 2021

Dengan penentuan lokasi kecamatan terhadap akses ke puskesmas yang menjadi Prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3 dan prioritas 4. Kecamatan yang menjadi target atau prioritas 1 (merah) intervensi ada 5 kecamatan yaitu : Sawang, Tanah Jambo Aye, Lhoksukon, Baktiya dan Seunuddon. Sedangkan kecamatan yang mendapat prioritas 2 (kuning) ada 4 yaitu : Kuta Makmur, Nisam, Meurah Mulia dan Syantalira Bayu.

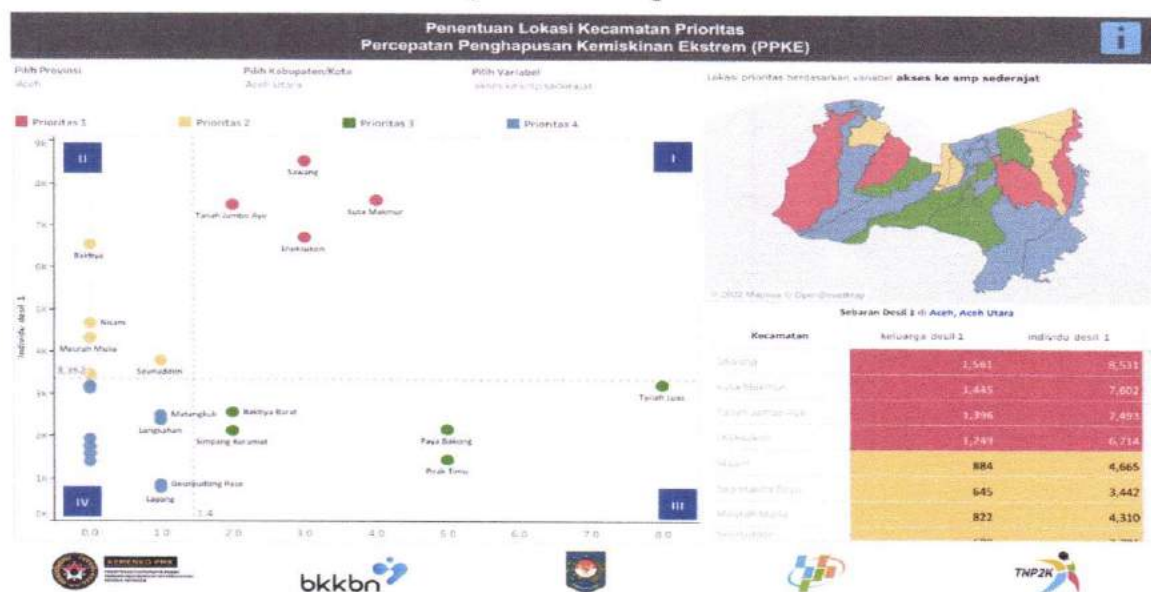
Gambar 5.2
Penentuan Lokasi Kecamatan Prioritas Terhadap Akses ke SD Sederajat di Kabupaten Aceh Utara



Sumber : P3KE, Kemenko PMK RI Tahun 2021

Berdasarkan kuadran, kecamatan yang mendapat prioritas 1 (merah) untuk di intervensi berdasarkan variabel akses ke SD sederajat terdiri dari: Kecamatan Kuta Makmur, Baktiya, Lhoksukon dan Seunuddon. Kecamatan yang mendapat prioritas 2 (kuning) untuk intervensi ada 3 kecamatan yaitu Kecamatan Tanah Jambo Aye, Nisam dan Meurah Mulia. Kecamatan yang mendapat prioritas 3 (hijau) terdapat 5 kecamatan terdiri dari kecamatan Pirak Timu, Tanah Luas, Paya Bakong, Syamtalira Aron dan Geureudong Pase. Sedangkan yang mendapat prioritas 4 (biru) ada 15 kecamatan untuk di intervensi.

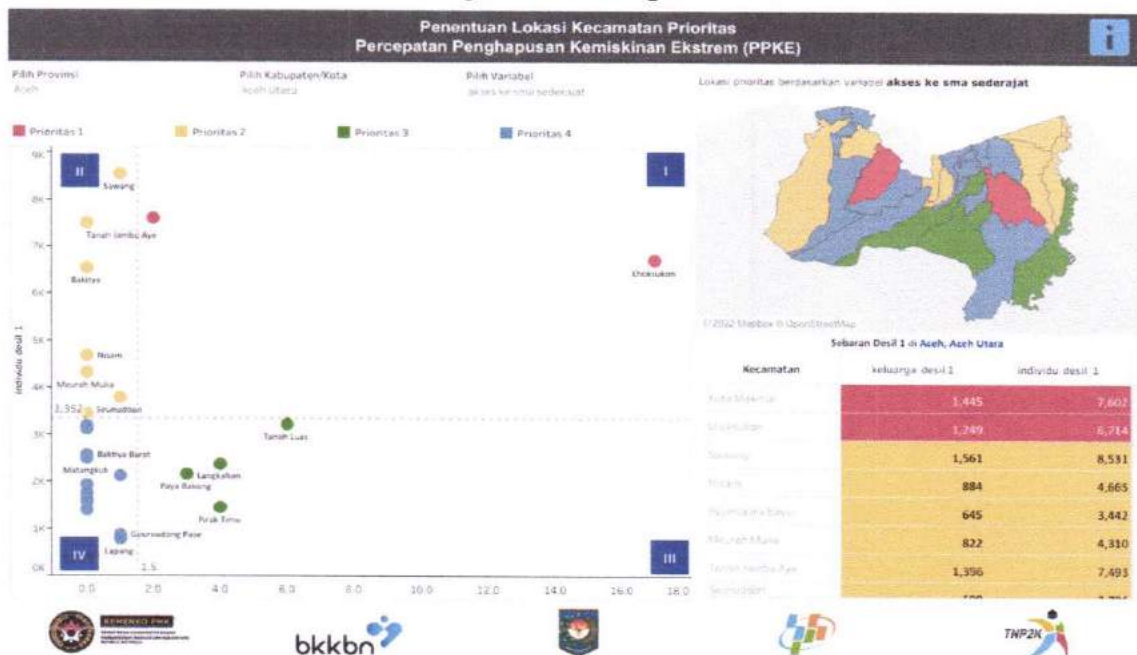
Gambar 5.3
Penentuan Lokasi Kecamatan Prioritas Terhadap Akses Ke SMP Sederajat Di Kabupaten Aceh Utara



Sumber : P3KE, Kemenko PMK RI Tahun 2021

Berdasarkan kuadran diatas, intervensi wilayah untuk variabel akses ke SMP sederajat terdapat 4 kecamatan yang mendapat prioritas 1 (merah) yaitu : Kecamatan sawang, Tanah Jambo Aye, Lhoksukon dan Kuta Makmur. Sedangkan kecamatan yang mendapatkan prioritas 2 terdapat 4 kecamatan yaitu : Baktiya, Meurah Mulia, Nisam dan Seunuddon. Kecamatan yang mendapatkan prioritas 3 terdapat 5 Kecamatan yaitu : Baktiya Barat, Simpang Kramat, Paya Bakong, Pirak Timu dan Tanah Luas. Kemudian kecamatan yang mendapatkan prioritas 4 ada sejumlah 14 kecamatan.

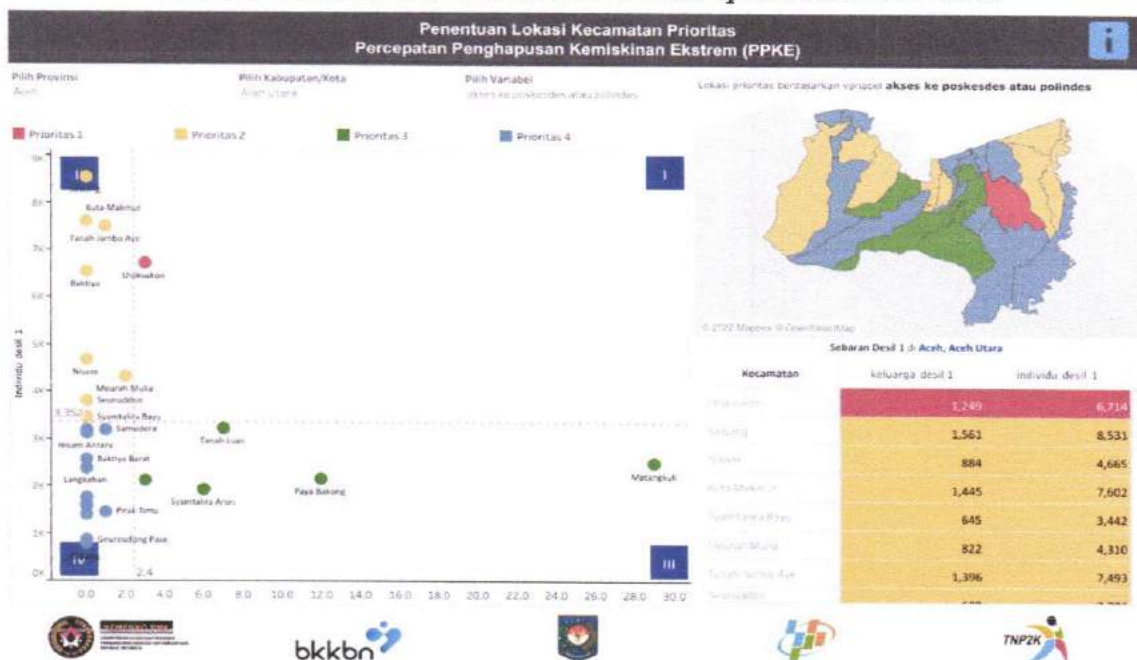
Gambar 5.4
Penentuan Lokasi Kecamatan Prioritas Terhadap Akses ke SMA Sederajat Di Kabupaten Aceh Utara



Sumber : P3KE, Kemenko PMK RI Tahun 2021

Berdasarkan kuadran diatas, intervensi wilayah untuk variabel akses ke SMA sederajat terdapat 1 kecamatan yang mendapat prioritas 1 (merah) yaitu : Kecamatan Lhoksukon. Sedangkan kecamatan yang mendapatkan prioritas 2 terdapat 6 kecamatan yaitu : Sawang, Tanah Jambo Aye, Baktiya, Nisam, Meurah Mulia dan Seunuddon. Kecamatan yang mendapatkan prioritas 3 terdapat 4 Kecamatan yaitu : Tanah Luas, Langkahan, Paya Bakong dan Pirak Timu. Kemudian kecamatan yang mendapatkan prioritas 4 ada sejumlah 16 kecamatan.

Gambar 5.5
Penentuan Lokasi Kecamatan Prioritas Terhadap Akses ke Poskesdes Atau Polindes Di Kabupaten Aceh Utara



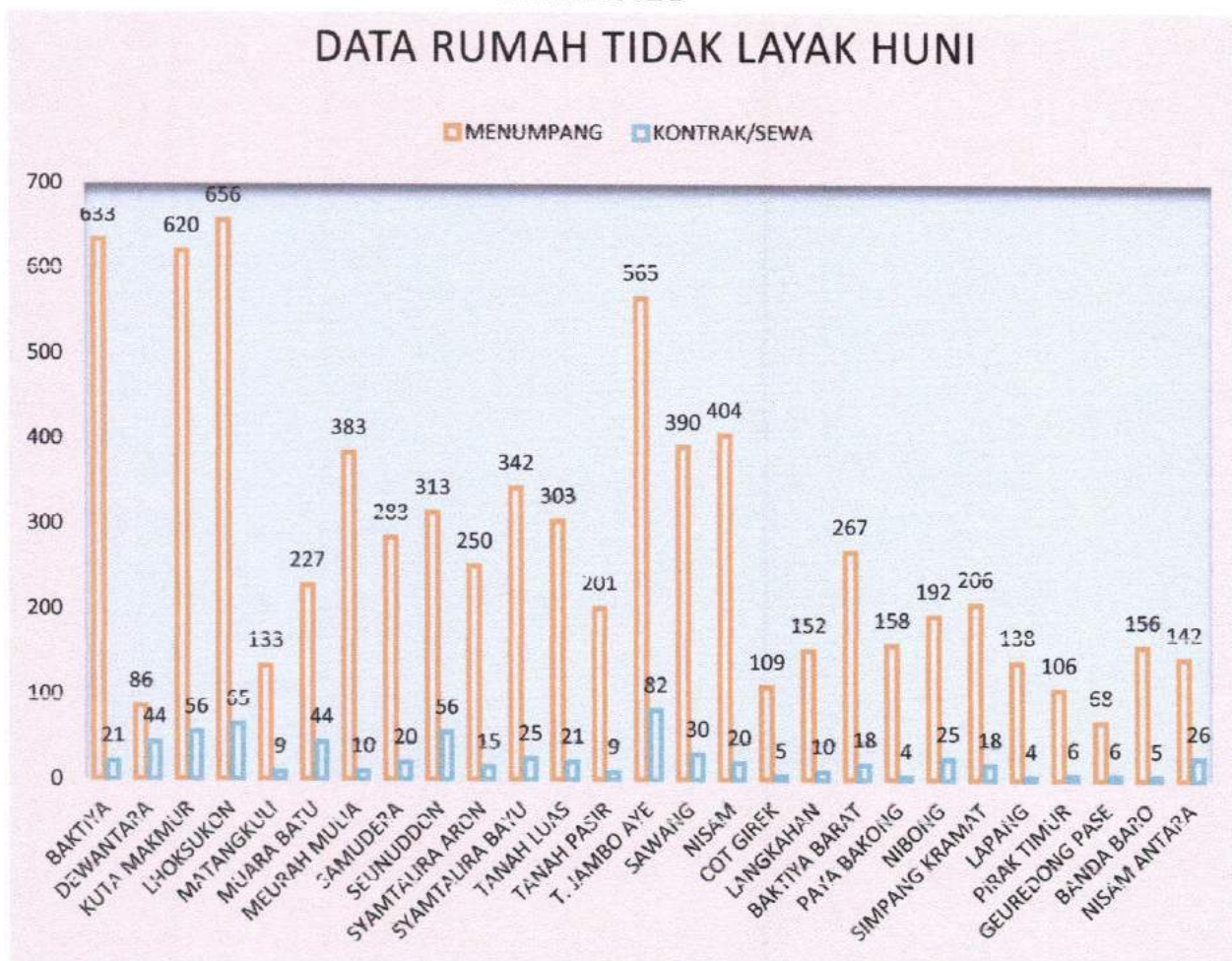
Sumber : P3KE, Kemenko PMK RI Tahun 2021

Berdasarkan kuadran di atas intervensi wilayah penentuan lokasi prioritas berdasarkan variabel akses poskesdes atau polindes yang menjadi Prioritas 1 (merah) terdapat 1 kecamatan yaitu: Kecamatan Lhoksukon. Sedangkan kecamatan yang mendapat prioritas 2 (kuning) ada 4 yaitu : Kuta Makmur, Tanah Jambo Aye, Baktiya, Nisam, Meurah Mulia dan Seunuddon. Kecamatan yang mendapat prioritas 3 (Hijau) terdapat 5 kecamatan yaitu: Matangkuli, Paya Bakong, Syamtalira Aron, Tanah Luas dan Simpang Kramat. Kecamatan yang mendapat prioritas 4 (biru) yaitu: Geureudong Pase, Pirak Timu, Langkahan, Baktiya Barat, Nisam Antara dan Samudera.

Meningkatnya harga rumah atau harga materialnya menyebabkan masyarakat tidak mampu memiliki rumah layak huni. Hal ini diperparah dengan mahalnya harga tanah di pusat-pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Dan selama akses kepada sumberdaya kunci pembangunan di pusat kegiatan ekonomi tidak dapat dicapai oleh masyarakat miskin, baik secara administratif maupun substansial (utamanya tanah di perkotaan), dapat mengakibatkan mereka semakin sulit mengatasi ketidakberdayaannya. Untuk menyiasati ketidakberdayaannya, masyarakat memilih untuk menumpang ataupun menyewa rumah yang berdekatan dengan lokasi mata pencahariannya sehari-hari demi dapat mengurangi beban pengeluaran transportasi.

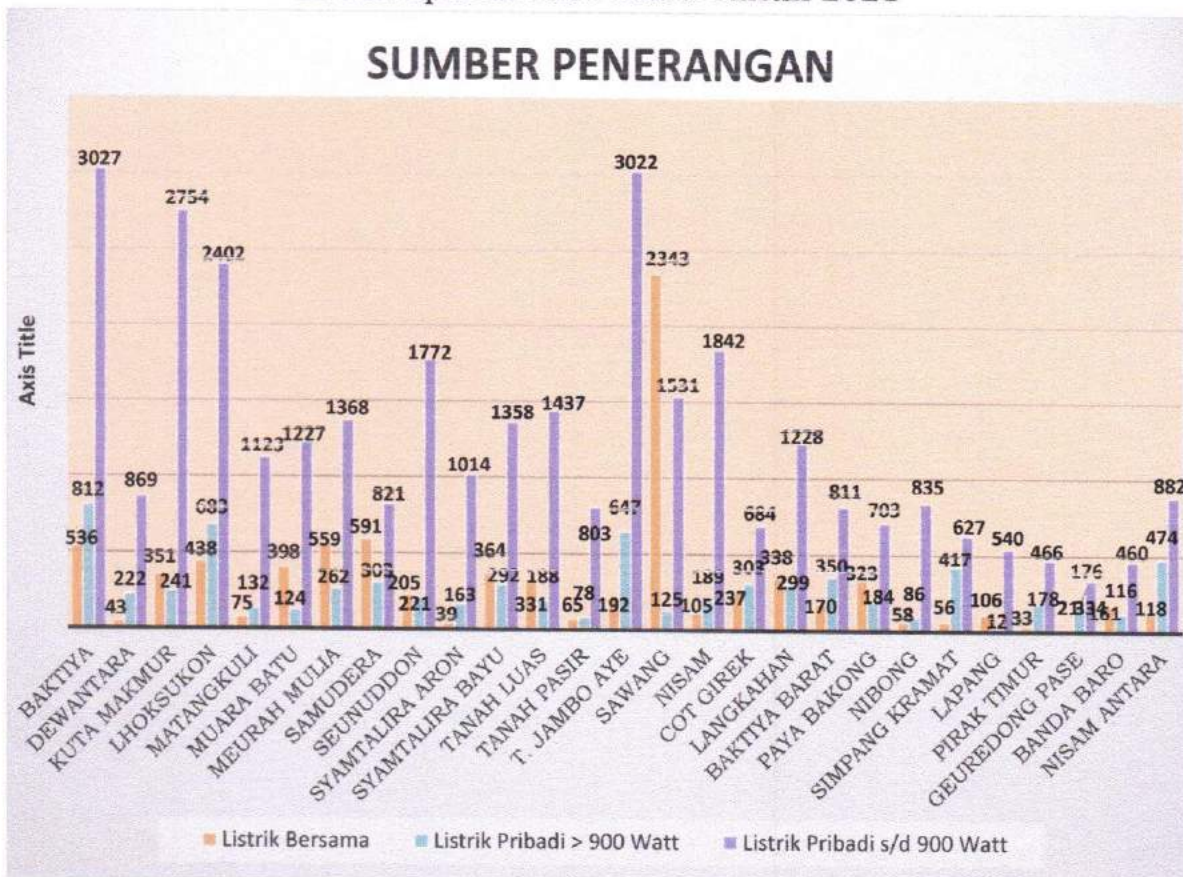
Berdasarkan data P3KE, masyarakat yang masih menumpang rumah terbanyak berada di Kecamatan Lhoksukon yaitu 656 keluarga, disusul Kecamatan Baktiya sebanyak 633 keluarga dan Kecamatan Kuta Makmur sebanyak 620 keluarga. Urutan tersebut dapat menjadi urutan 1, 2, dan 3 untuk lokasi prioritas penanganan kemiskinan.

Gambar 5.6
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2021



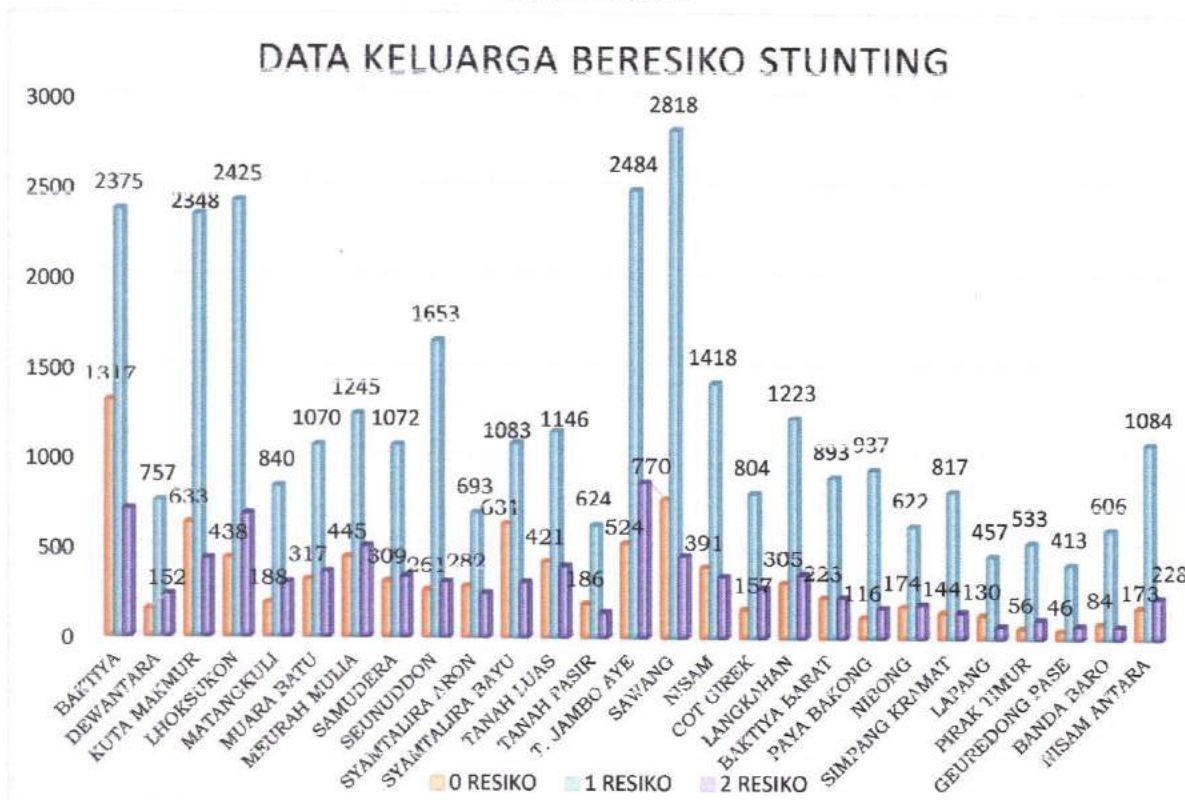
Sumber : P3KE, Kemenko PMK RI Tahun 2021

Gambar 5.7
Jumlah Rumah Tangga Yang Memiliki Sumber Penerangan
Di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021



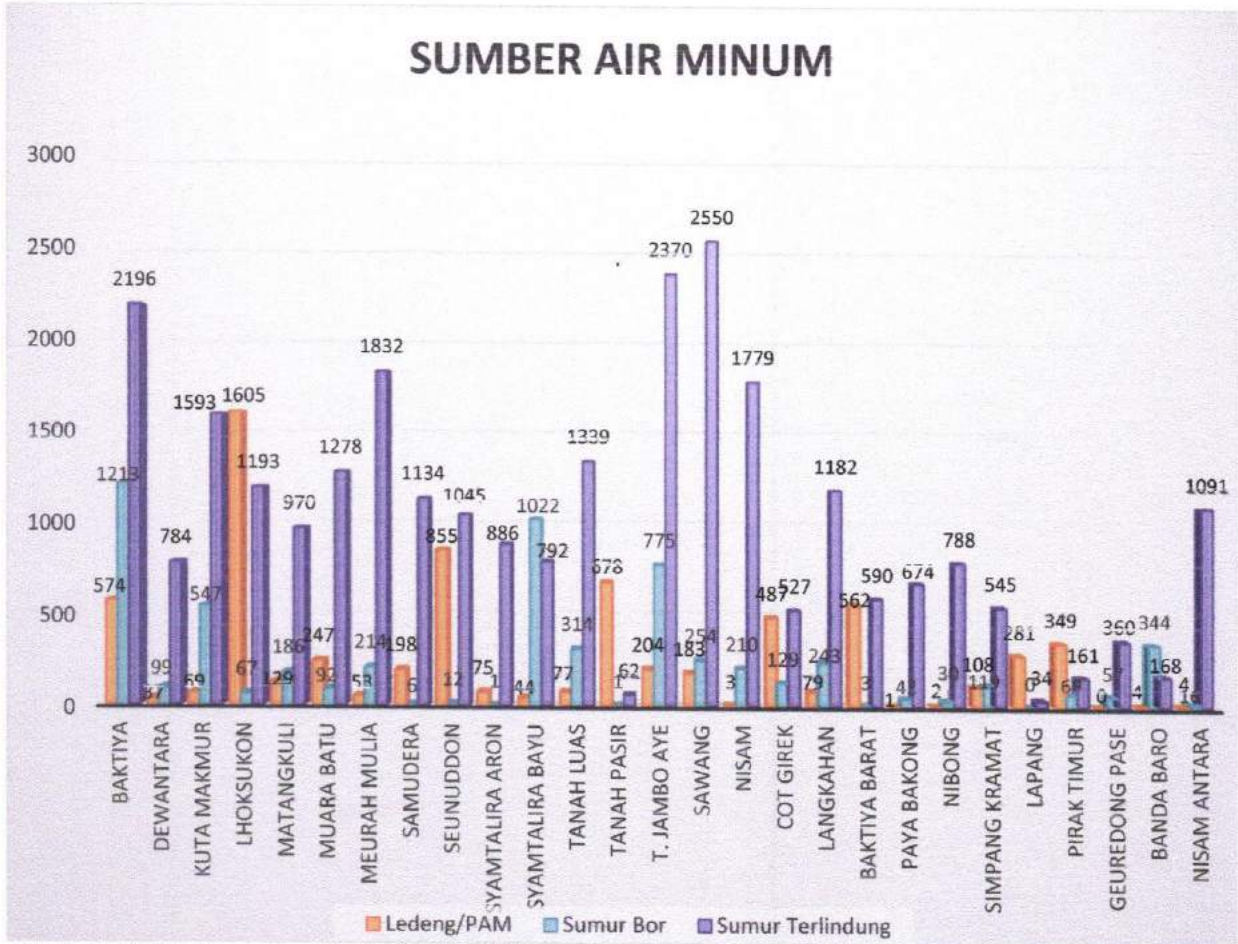
Sumber : P3KE, Kemenko PMK RI Tahun 2021

Gambar 5.8
Jumlah Keluarga Beresiko Stunting Di Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2021



Sumber : P3KE, Kemenko PMK RI Tahun 2021

Gambar 5.9
Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Sumber Air Minum
Di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021



Sumber : P3KE, Kemenko PMK RI Tahun 2021

Gambar 5.10
Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Fasilitas Buang Air Besar
Dengan Septic Tank Di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021



Sumber : P3KE, Kemenko PMK RI Tahun 2021

Tabel 5.1
Jumlah Individu dan Jenis Pekerjaan Di Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2021

| DATA PEKERJAAN | | | | | | | |
|----------------|-----------------|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| NO | Kecamatan | Lainnya | Nelayan | Pedagang | Pekerja Lepas | Petani | Wiraswasta |
| 1 | BAKTIYA | 35 | 58 | 208 | 245 | 2.701 | 869 |
| 2 | DEWANTARA | 7 | 124 | 54 | 180 | 353 | 342 |
| 3 | KUTA MAKMUR | 71 | 38 | 114 | 129 | 2.228 | 718 |
| 4 | LHOKSUKON | 35 | 13 | 213 | 575 | 1.753 | 776 |
| 5 | MATANGKULI | 19 | 12 | 81 | 64 | 654 | 465 |
| 6 | MUARA BATU | 17 | 146 | 114 | 423 | 562 | 352 |
| 7 | MEURAH MULIA | 15 | 32 | 93 | 49 | 1.382 | 523 |
| 8 | SAMUDERA | 18 | 161 | 108 | 41 | 765 | 490 |
| 9 | SEUNUDDON | 28 | 296 | 119 | 47 | 1.092 | 563 |
| 10 | SYAMTALIRA ARON | 41 | 15 | 34 | 160 | 467 | 370 |
| 11 | SYAMTALIRA BAYU | 20 | 95 | 105 | 125 | 1.156 | 351 |
| 12 | TANAH LUAS | 27 | 12 | 68 | 66 | 1.258 | 453 |
| 13 | TANAH PASIR | 10 | 40 | 60 | 61 | 488 | 224 |
| 14 | TANAH JAMBO AYE | 27 | 74 | 296 | 217 | 2.042 | 981 |
| 15 | SAWANG | 29 | 35 | 118 | 74 | 2.839 | 861 |
| 16 | NISAM | 14 | 11 | 119 | 330 | 1.389 | 113 |
| 17 | COT GIREK | 12 | 9 | 55 | 51 | 707 | 239 |
| 18 | LANGKAHAN | 11 | 19 | 83 | 58 | 1.495 | 159 |
| 19 | BAKTIYA BARAT | 17 | 18 | 77 | 25 | 845 | 303 |
| 20 | PAYA BAKONG | 8 | 6 | 43 | 67 | 851 | 224 |
| 21 | NIBONG | 3 | 16 | 41 | 16 | 589 | 262 |
| 22 | SIMPANG KRAMAT | 19 | 19 | 31 | 46 | 591 | 320 |
| 23 | LAPANG | 3 | 103 | 32 | 19 | 364 | 118 |
| 24 | PIRAK TIMU | 5 | 5 | 28 | 123 | 456 | 44 |
| 25 | GEUREDONG PASE | 2 | 5 | 17 | 2 | 392 | 110 |
| 26 | BANDA BARO | 7 | 5 | 33 | 36 | 539 | 117 |
| 27 | NISAM ANTARA | 11 | 9 | 89 | 13 | 1.138 | 197 |
| | TOTAL | 511 | 1.376 | 2.433 | 3.242 | 29.096 | 10.544 |

Sumber : P3KE, Kemenko PMK RI Tahun 2021

Tabel 5.2
Tingkat Pendidikan Di Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2021

| DATA PENDIDIKAN | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| NO | Nama Kecamatan | Siswa SMA/ Sederajat | Siswa SMP/ Sederajat | Tamat Perguruan Tinggi | Tamat SMA/ Sederajat | Tamat SMP/ Sederajat |
| 1 | BAKTIYA | 22 | 27 | 72 | 905 | 2.701 |
| 2 | DEWANTARA | 9 | 7 | 16 | 435 | 353 |
| 3 | KUTA MAKMUR | 15 | 16 | 94 | 1061 | 2.228 |
| 4 | LHOKSUKON | 18 | 22 | 82 | 1019 | 1.753 |
| 5 | MATANGKULI | 13 | 13 | 34 | 426 | 654 |
| 6 | MUARA BATU | 11 | 6 | 49 | 558 | 562 |
| 7 | MEURAH MULIA | 17 | 14 | 57 | 598 | 1.382 |
| 8 | SAMUDERA | 11 | 8 | 39 | 456 | 765 |
| 9 | SEUNUDDON | 5 | 13 | 43 | 494 | 1.092 |
| 10 | SYAMTALIRA ARON | 5 | 2 | 80 | 473 | 467 |
| 11 | SYAMTALIRA BAYU | 10 | 18 | 34 | 392 | 1.156 |
| 12 | TANAH LUAS | 18 | 14 | 47 | 552 | 1.258 |
| 13 | TANAH PASIR | 5 | 6 | 17 | 274 | 488 |
| 14 | TANAH JAMBO AYE | 9 | 9 | 72 | 1.003 | 2.042 |
| 15 | SAWANG | 23 | 14 | 73 | 1.104 | 2.839 |
| 16 | NISAM | 8 | 6 | 66 | 615 | 1.389 |
| 17 | COT GIREK | 8 | 7 | 20 | 328 | 707 |
| 18 | LANGKAHAN | 10 | 18 | 16 | 268 | 1.495 |
| 19 | BAKTIYA BARAT | 6 | 14 | 25 | 328 | 845 |
| 20 | PAYA BAKONG | 16 | 4 | 6 | 276 | 851 |
| 21 | NIBONG | 3 | 11 | 21 | 310 | 589 |
| 22 | SIMPANG KRAMAT | 7 | 4 | 20 | 327 | 591 |
| 23 | LAPANG | 6 | 5 | 10 | 121 | 364 |
| 24 | PIRAK TIMUR | 3 | 3 | 16 | 142 | 456 |
| 25 | GEUREDONG PASE | 4 | 4 | 8 | 111 | 392 |
| 26 | BANDA BARO | 4 | 5 | 15 | 318 | 539 |
| 27 | NISAM ANTARA | 6 | 7 | 21 | 251 | 1.138 |
| | TOTAL | 272 | 277 | 1.053 | 13.145 | 29.096 |

Sumber : P3KE, Kemenko PMK RI Tahun 2021

Tabel 5.3
Jumlah Penerima BPNT Di Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2021

| DATA PENERIMA BPNT | | | |
|--------------------|-----------------|---------------|---------------|
| NO | Nama Kecamatan | Tidak | Ya |
| 1 | BAKTIYA | 1.691 | 2.711 |
| 2 | DEWANTARA | 512 | 632 |
| 3 | KUTA MAKMUR | 1.499 | 1.919 |
| 4 | LHOKSUKON | 1.453 | 2.094 |
| 5 | MATANGKULI | 571 | 761 |
| 6 | MUARA BATU | 720 | 1.030 |
| 7 | MEURAH MULIA | 752 | 1.444 |
| 8 | SAMUDERA | 665 | 1.054 |
| 9 | SEUNUDDON | 793 | 1.429 |
| 10 | SYAMTALIRA ARON | 587 | 633 |
| 11 | SYAMTALIRA BAYU | 791 | 1.229 |
| 12 | TANAH LUAS | 841 | 1.123 |
| 13 | TANAH PASIR | 366 | 582 |
| 14 | TANAH JAMBO AYE | 2.061 | 1.809 |
| 15 | SAWANG | 1.841 | 2.201 |
| 16 | NISAM | 1.071 | 1.078 |
| 17 | COT GIREK | 809 | 427 |
| 18 | LANGKAHAN | 983 | 897 |
| 19 | BAKTIYA BARAT | 708 | 633 |
| 20 | PAYA BAKONG | 747 | 474 |
| 21 | NIBONG | 491 | 493 |
| 22 | SIMPANG KRAMAT | 587 | 521 |
| 23 | LAPANG | 295 | 364 |
| 24 | PIRAK TIMUR | 386 | 311 |
| 25 | GEUREDONG PASE | 317 | 217 |
| 26 | BANDA BARO | 400 | 361 |
| 27 | NISAM ANTARA | 878 | 607 |
| | TOTAL | 22.815 | 27.034 |

Sumber : P3KE, Kemenko PMK RI Tahun 2021

Tabel 5.4
Jumlah Penerima PKH Di Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2021

| DATA PENERIMA PKH | | | |
|-------------------|-----------------|---------------|---------------|
| NO | Nama Kecamatan | Tidak | Ya |
| 1 | BAKTIYA | 2.600 | 1.802 |
| 2 | DEWANTARA | 732 | 412 |
| 3 | KUTA MAKMUR | 2.260 | 1.158 |
| 4 | LHOKSUKON | 2.210 | 1.337 |
| 5 | MATANGKULI | 814 | 518 |
| 6 | MUARA BATU | 1.136 | 614 |
| 7 | MEURAH MULIA | 1.221 | 975 |
| 8 | SAMUDERA | 1.033 | 686 |
| 9 | SEUNUDDON | 1.186 | 1.036 |
| 10 | SYAMTALIRA ARON | 832 | 388 |
| 11 | SYAMTALIRA BAYU | 1263 | 757 |
| 12 | TANAH LUAS | 1205 | 759 |
| 13 | TANAH PASIR | 527 | 421 |
| 14 | TANAH JAMBO AYE | 2.401 | 1.469 |
| 15 | SAWANG | 2.292 | 1.750 |
| 16 | NISAM | 1.273 | 876 |
| 17 | COT GIREK | 885 | 351 |
| 18 | LANGKAHAN | 1.121 | 759 |
| 19 | BAKTIYA BARAT | 836 | 505 |
| 20 | PAYA BAKONG | 815 | 406 |
| 21 | NIBONG | 575 | 409 |
| 22 | SIMPANG KRAMAT | 700 | 408 |
| 23 | LAPANG | 371 | 288 |
| 24 | PIRAK TIMUR | 414 | 283 |
| 25 | GEUREDONG PASE | 361 | 173 |
| 26 | BANDA BARO | 470 | 291 |
| 27 | NISAM ANTARA | 964 | 521 |
| | TOTAL | 30.497 | 19.352 |

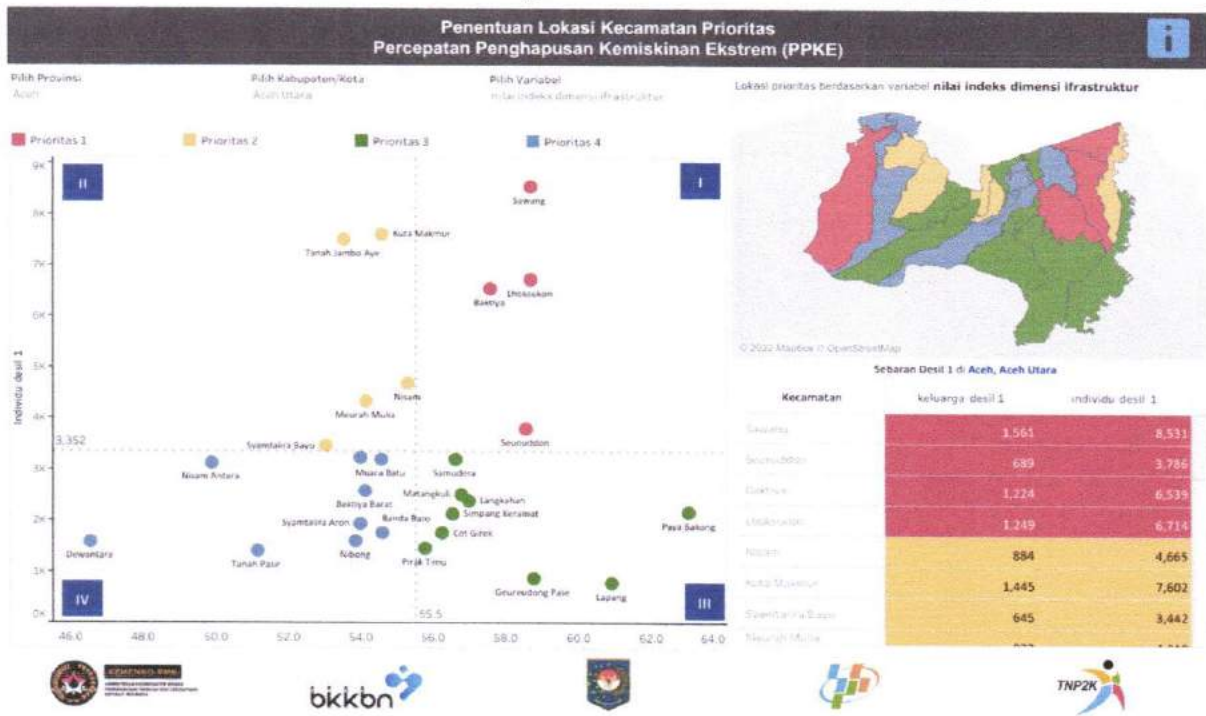
Sumber : P3KE, Kemenko PMK RI Tahun 2021

Tabel 5.5
Jumlah Penerima Sembako Di Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2021

| DATA PENERIMA SEMBAKO | | | |
|-----------------------|-----------------|---------------|---------------|
| NO | Nama Kecamatan | Tidak | Ya |
| 1 | BAKTIYA | 2.336 | 2.066 |
| 2 | DEWANTARA | 627 | 517 |
| 3 | KUTA MAKMUR | 1.802 | 1.616 |
| 4 | LHOKSUKON | 1.805 | 1.742 |
| 5 | MATANGKULI | 666 | 666 |
| 6 | MUARA BATU | 877 | 873 |
| 7 | MEURAH MULIA | 1.010 | 1.186 |
| 8 | SAMUDERA | 883 | 836 |
| 9 | SEUNUDDON | 991 | 1.231 |
| 10 | SYAMTALIRA ARON | 702 | 518 |
| 11 | SYAMTALIRA BAYU | 1.013 | 1.007 |
| 12 | TANAH LUAS | 1.001 | 963 |
| 13 | TANAH PASIR | 410 | 538 |
| 14 | TANAH JAMBO AYE | 2.282 | 1.588 |
| 15 | SAWANG | 2.065 | 1.977 |
| 16 | NISAM | 1.308 | 841 |
| 17 | COT GIREK | 863 | 373 |
| 18 | LANGKAHAN | 1.134 | 746 |
| 19 | BAKTIYA BARAT | 860 | 481 |
| 20 | PAYA BAKONG | 778 | 443 |
| 21 | NIBONG | 556 | 428 |
| 22 | SIMPANG KRAMAT | 651 | 457 |
| 23 | LAPANG | 326 | 333 |
| 24 | PIRAK TIMUR | 403 | 294 |
| 25 | GEUREDONG PASE | 344 | 190 |
| 26 | BANDA BARO | 468 | 293 |
| 27 | NISAM ANTARA | 926 | 559 |
| | TOTAL | 27.087 | 22.762 |

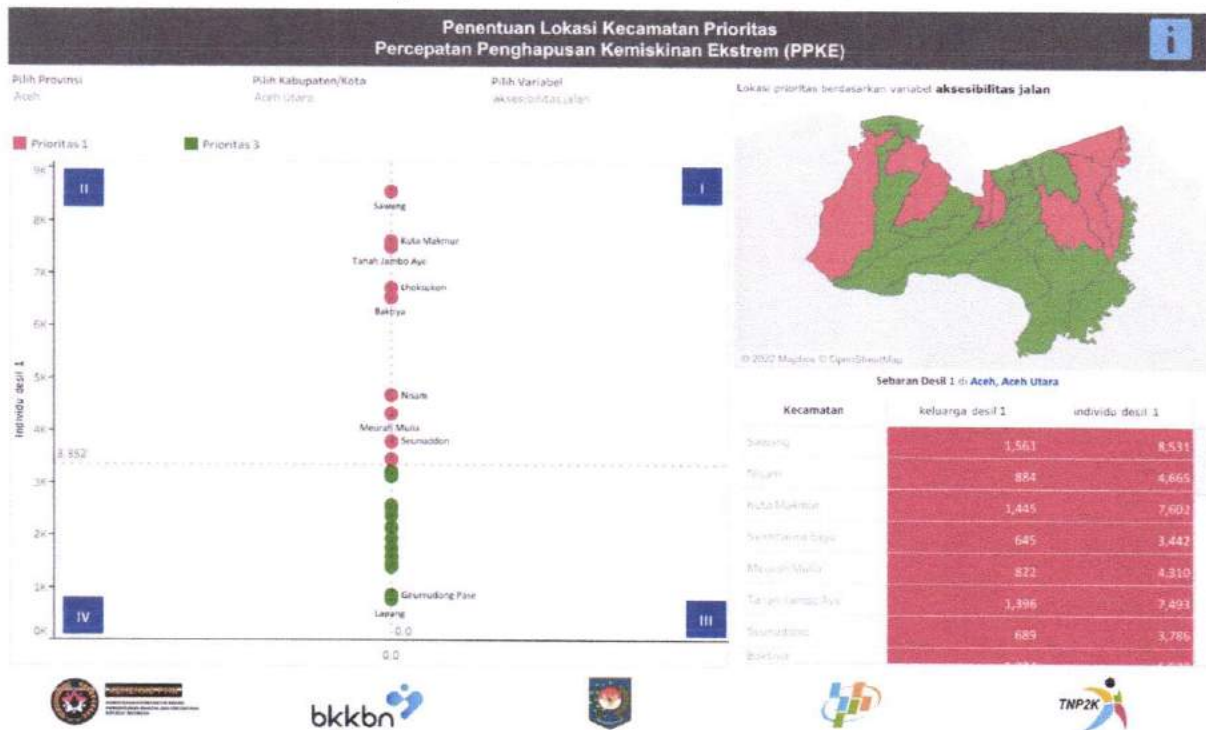
Sumber : P3KE, Kemenko PMK RI Tahun 2021

Gambar 5.11
 Penentuan Lokasi Kecamatan Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) Terhadap Nilai Indeks Dimensi Infrastruktur di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021



Sumber : P3KE, Kemenko PMK RI Tahun 2021

Gambar 5.12
 Penentuan Lokasi Kecamatan Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) Terhadap Aksesibilitas Jalan Di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021



Sumber : PSKE, Kemenko PMK RI Tahun 2021

BAB VI PENUTUP

Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi yang mendesak dan memerlukan upaya penanganan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh. Upaya tersebut perlu diarahkan untuk mengurangi beban pengeluaran, peningkatan pendapatan dan pemenuhan layanan dasar masyarakat untuk menempuh kehidupan yang bermartabat. Besar dan beratnya beban penanggulangan kemiskinan memerlukan dukungan kontribusi seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan.

Memperhatikan kondisi dimaksud, pemerintah dan pemerintah daerah berkomitmen dalam penanggulangan kemiskinan, dengan menempatkan penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas kebijakan pembangunan. Agar pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dapat lebih terarah, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah menyusun rumusan kebijakan tersebut dalam dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2023-2026. Diharapkan dokumen RPKD ini dapat menjadi salah satu cara yang tepat dan terarah dari Pemerintah Daerah dalam menjalankan peran penanggulangan kemiskinan di daerah.

Dokumen RPKD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 ini diharapkan juga menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder dalam rangka percepatan penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara. Oleh karena itu dokumen RPKD ini perlu diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah baik pada rencana jangka menengah yaitu RPD dan Renstra OPD maupun dalam jangka pendek (tahunan) yaitu dalam RKPD ataupun dalam Renja OPD.

Sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem merupakan langkah percepatan pemberantasan kemiskinan ekstrem di Indonesia yang di targetkan tuntas pada tahun 2024 mendatang, maka implementasi RPKD ini perlu dilakukan dan didukung melalui sinergitas program dan anggaran dari seluruh pemangku kepentingan, baik dari unsur DPRD, masyarakat maupun swasta.

Seluruh pemangku kepentingan perlu merespon RPKD ini dengan melakukan hal yang sama untuk menjamin sinergitas dan implementasi serta pencapaian target penurunan angka kemiskinan sesuai dengan kewenangannya. Seluruh pemangku kepentingan diharapkan juga melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dalam koridor kewenangan dan peraturan yang berlaku.

 Pj. BUPATI ACEH UTARA, 
AZWARDI